

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE,
PROFITABILITAS, DAN KOMISARIS INDEPENDEN
TERHADAP MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR
TARIF PAJAK EFEKTIF**
(Studi Pada Perusahaan Industri Sektor Barang Konsumsi Yang
Terdaftar dalam BEI Periode 2013-2018)

SKRIPSI



Oleh

SHERLI JULIANI
NIM : 15520128

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE,
PROFITABILITAS, DAN KOMISARIS INDEPENDEN
TERHADAP MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR
TARIF PAJAK EFEKTIF**
(Studi Pada Perusahaan Industri Sektor Barang Konsumsi Yang
Terdaftar dalam BEI Periode 2013-2018)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

SHERLI JULIANI
NIM : 15520128

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF

**(Studi Pada Perusahaan Industri Sektor Barang Konsumsi Yang
Terdaftar dalam BEI Periode 2013-2018)**

SKRIPSI

Oleh

SHERLI JULIANI

NIM : 15520128

Telah disetujui pada tanggal 08 Mei 2019

Dosen Pembimbing,



**Ditya Permatasari, M.SA.,Ak
NIDT. 19870920 20190201 2 183**

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si., Ak.,CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF

(Studi Pada Perusahaan Industri Sektor Barang Konsumsi
Yang Terdaftar dalam BEI Periode 2013-2018)

SKRIPSI

Oleh
SHERLI JULIANI
NIM : 15520128

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 17 Mei 2019

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji (Penguji I)
Nawirah, SE., MSA., Ak., CA
NIDT. 19860105 20180201 2 185
2. Dosen Pembimbing (Sekretaris)
Ditya Permatasari, M.SA., Ak.
NIDT. 19870920 20180201 2 183
3. Penguji Utama (Penguji II)
Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA
NIDT. 19770702 200604 2 001

Tanda Tangan

()
()
()

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ni:

Nama : Sherli Juliani
NIM : 15520128
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF (Studi Pada Perusahaan Industri Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar dalam BEI pada Periode 2013-2018)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungan saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Mei 2019

Hormat Saya,



Sherli Juliani

NIM: 15520128

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas selesainya salah satu perjuangan dalam menyusun karya tulis yang sederhana ini, semoga dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya ke depan. Karya ini saya susun sebagai bentuk kewajiban dalam menyelesaikan studi dan sebagai bentuk pengabdian pada agama.

Bersamaan dengan rampungnya kewajiban ini, saya persembahkan karya sederhana ini untuk:

Teruntuk kedua orang tua saya tercinta Ayah Slamet Hariadi (Alm), semoga selalu tenang berada di sisi Allah dan semoga kelak bisa berkumpul di akhirat. Tak lupa Ibu saya tersayang, Rima Melati yang tak pernah lelah mendidik saya dan membesarkan saya hingga menjadi diri saya sekarang ini. Terima kasih atas segalanya.

Untuk Bapak Bowo, Pakde Purnomo, kakak saya Sela Mauludia, Fajar Kharisma, Indrawati Rahayu, serta Adik Indriyani Rahayu yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

Untuk ibu Ditya Permatasari, M.SA., Ak selaku pembimbing, saya ucapkan terima kasih atas kesabaran dan kebijaksanaannya dalam membimbing penulis sehingga karya ini bisa terselesaikan dengan baik.

Untuk seluruh dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Maang, terutama dosen jurusan Akuntansi yang telah melimpahkan ilmu dan mendidik saya selama masa perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan barokah di dunia akhirat.

Terima kasih untuk semua sahabat dan teman dekat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan dukungan di kala suka dan duka.

MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula) — **Q.S. Ar-Rahman (55):60**

We do not need magic to transform our world. We carry all of the power we need inside ourselves already — **J.K. Rowling**

Everything and every moment is very special — **L of Infinite**

To learn etiquette, is actually learning how to see others, and respect them — **Zhang Yixing of EXO**

Even if you live for a day / Do something / Put away your weakness.” — **BTS (“No More Dream”)**

Close your eyes to find your dream, then open your eyes and go for it — **Me**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Pada Perusahaan Industri Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Dalam Bei Pada Periode 2013-2018)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2017-2021.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Ditya Permatasari, M.SA.,Ak yang dengan sabar, telaten, dan bijaksana telah memberikan bimbingan beserta masukan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang insyaAllah bermanfaat, barokah dunia akhirat kepada penulis, dan terima

kasih pada seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah melayani dan membantu selama perkuliahan.

6. Ayah Slamet (Alm) dan Ibu Rima, yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan secara moril dan spirituil, serta menguatkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan keselamatan Dunia Akhirat.
7. Bapak Subawa, Pakde Purnomo, Kakak Sela, Fajar, Iin dan Adik Ayu yang telah memberikan doa dan dukungan demi kelancaran tugas akhir ini.
8. Anggi, Sherly, dan Lia (Nur) selaku sahabat tersayang dan penasehat statistik yang telah memberikan ilmunya demi kelancaran tugas akhir skripsi ini.
9. Sahabat tersayang Avinda, Lia, Hulul, dan Isna yang senantiasa memberikan dukungan dan doa selama penyusunan tugas akhir ini.
10. Teman-teman satu “Alumni MSAA” ABA 62 khususnya Umi yang juga membantu dalam penyusunan tugas akhir skripsi.
11. Teman-Teman “Gadis SMA” dan “TGG” yang selalu memberi semangat dan sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir.
12. Seluruh Anggota TOT El-Dinar Finance House Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Teman-teman Akuntansi 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini.
14. Dan Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mampu disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 10 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Batasan Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Pustaka	19
2.2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	19
2.2.2 Pajak	20
2.2.3 Manajemen Pajak	22
2.2.4 Tarif Pajak Efektif	25
2.2.5 Ukuran Perusahaan	27
2.2.6 <i>Leverage</i>	29
2.2.7 Profitabilitas	31
2.2.8 Komisaris Independen	33
2.2.9 Kajian Islam	35
2.2.9.1 Ukuran Perusahaan dalam Islam	35
2.2.9.2 <i>Leverage</i> dalam Islam	36
2.2.9.3 Profitabilitas dalam Islam	38
2.2.9.4 Komisaris Independen dalam Islam	39
2.2.9.5 Manajemen Pajak dalam Islam	40
2.3 Kerangka Konseptual	42
2.4 Hipotesis Penelitian	43
BAB III METODE PENELITIAN	49
3. 1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
3. 2 Lokasi Penelitian	50

3.3	Populasi dan Sampel	50
3.3.1	Populasi.....	50
3.3.2	Sampel	51
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	51
3.5	Data dan Jenis Data	53
3.6	Teknik Pengumpulan Data	53
3.7	Definisi Operasional Variabel	54
3.8	Analisis Data	56
3.8.1	Uji Statistik Deskriptif	56
3.8.2	Uji Asumsi Klasik	57
3.8.3	Uji Regresi Berganda	60
3.8.4	Uji Hipotesis.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		64
4.1	Hasil Penelitian	64
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	64
4.1.2	Hasil Analisis Deskriptif	74
4.1.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	77
4.1.4	Hasil Uji Regresi Berganda	89
4.1.5	Hasil Uji Hipotesis	91
4.2	Pembahasan	96
4.2.1	Pengaruh Parsial Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak.....	96
4.2.1.1	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak	96
4.2.1.2	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Pajak	99
4.2.1.3	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak	100
4.2.1.4	Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak	102
4.2.2	Pengaruh Simultan Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak	103
BAB V PENUTUP		105
5.1	Kesimpulan.....	105
5.2	Keterbatasan Penelitian	107
5.3	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.2	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1	Pengambilan Sampel	52
Tabel 3.2	Daftar Perusahaan Yang Memenuhi Kriteria	52
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel	55
Tabel 4.1	Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian	65
Tabel 4.2	Hasil Analisis Deskriptif	75
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas secara Statistik (Uji Kolmogorov-Smirnov)	79
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas secara Statistik Setelah Menghilangkan <i>Outlier</i> (1) (Uji Kolmogorov-Smirnov)	81
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas secara Statistik Setelah Menghilangkan <i>Outlier</i> (2) (Uji Kolmogorov-Smirnov)	82
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinearitas	83
Tabel 4.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji <i>Park</i>	86
Tabel 4.8	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji <i>Park</i> setelah Menghilangkan <i>Outlier</i>	87
Tabel 4.9	Hasil Uji Autokorelasi	88
Tabel 4.10	Hasil Uji Regresi Berganda	89
Tabel 4.11	Hasil Uji t (Uji Secara Parsial)	92
Tabel 4.12	Ringkasan Hasil Uji t	94
Tabel 4.13	Hasil Uji f (Uji Secara Simultan)	94
Tabel 4.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Konseptual	42
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas secara Diagram (<i>P-Plot Test</i>).....	78
Gambar 4.2	Diagram <i>Boxplot</i> Nilai <i>Unstandardized Residual</i> Uji Normalitas .	80
Gambar 4.3	Diagram <i>Boxplot</i> Nilai <i>Unstandardized Residual</i> Uji Normalitas setelah Menghilangkan <i>Outlier</i> (1).....	81
Gambar 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas Memakai Diagram <i>Scatterplot</i>	84
Gambar 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas Memakai Diagram <i>Scatterplot</i> setelah Menghilangkan <i>Outlier</i>	85
Gambar 4.6	Hasil Uji <i>Durbin-Watson</i> dalam Diagram.....	88



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Perusahaan Sampel Penelitian
- Lampiran 2 Data Tarif Pajak Efektif
- Lampiran 3 Data Ukuran Perusahaan
- Lampiran 4 Data *Leverage*
- Lampiran 5 Data Profitabilitas
- Lampiran 6 Data Komisaris Independen
- Lampiran 7 Data Sampel Penelitian
- Lampiran 8 Hasil Pengujian SPSS
- Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 10 Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Juliani, Sherli. 2019, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Pada Perusahaan Industri Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar dalam BEI Periode 2013-2018)”.

Pembimbing : Ditya Permatasari, M.S.A., Ak.

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Komisaris Independen, Manajemen Pajak, Tarif Pajak Efektif

Pajak merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut membuat pemerintah berharap memperoleh pajak sebesar-besarnya dari subjek pajak untuk pembangunan negara. Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak memiliki tujuan yang bertolak belakang dengan pemerintah. Tujuan itu adalah membayar pajak sehemat mungkin sehingga laba yang diperolehnya lebih banyak. Dalam melaksanakan tujuannya tersebut, perusahaan melakukan upaya-upaya seperti perencanaan pajak agar pajak yang disetorkannya lebih efisien. Kegiatan ini disebut dengan manajemen pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dengan populasi perusahaan industri sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018. Sampel penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 25 perusahaan sampel. Penelitian ini dianalisis dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji regresi berganda dibantu dengan IBM SPSS versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pertimbangan perusahaan untuk memperhitungkan peran komisaris independen, sumber daya perusahaan, maupun laba dalam pelaksanaan manajemen pajak. Hasil lain juga menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sementara itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen secara simultan mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif dengan nilai *R square* sebesar 0,082.

ABSTRACT

Juliani, Sherli. 2019, THESIS. Title: “The Influence of Firm Size, Leverage, Profitability, and Independent Commissioners Based on Tax Management with Effective Tax Rate as The Indicator (Study on Industrial Companies on the Sector Consumer Goods that listed in BEI in 2013-2018 Period)”.

Advisor : Ditya Permatasari, M.S.A., Ak.

Keywords : Firm Size, Leverage, Profitability, Independent Commisioners, Tax Management, Effective Tax Rate

Tax is one of the country’s revenue that has increased year by year. That makes the government expect to obtain maximum tax revenue from tax subjects for the country’s establishment. Company as one of tax subjects has a goal that is contrary with government’s goal. That is paying tax as less as possible for earning more profit. For the sake of the goal, company made efforts such as tax planning for having a more efficient amount of tax payment. This activity called tax management. This research aims to determine the influence of firm size, leverage, profitability, and independent commisioner on tax managemeny with effective tax rate ase the indicator.

This research is an quantitative research by using secondary data which is annual report of industrial companies on the sector consumer goods that listed on BEI in 2013-2018 as the population. The research’s sample were taken by purposive sampling technique so the sample’s amount is 25 companies. This data analysis was using descriptive statistical tests, classic assumption tests, and multiple regression tests assisted with IBM SPSS version 25.

The results showed that firm size, profitability, and independent commisioner partially had no effect on tax management. This is cause the company having lack of cosideration for calculating the role of independent commisioner, corporate resources, and profit in tax management activity. Other result shows that leverage is influential on tax management. Meanwhile, research result also shows that firm size, leverage, profitability, and independent commisioners simultaneously affect tax management with 0,082 R square value.

المستخلص

جوليان، شيرلي. 2019 . البحث الجامعي. تأثير حجم الشركة، والفاعلية المالية (Leverage)، والربحية، والمفوضا مستقلا لمعنيا لإدارة الضريبية معمؤ شرائع لالضريبة الفعلي (دراسة قطاعا لسلعلاستهلاكية الصناعية المدرجة فيبورصة إندونيسيا (BEI) للفترة 2013-2018).
المشرف: ديتاير ماساريلماحستير.
الكلمة الرئيسية: حجمالشركة،الفاعلية المالية،الربحية،المفوضالمستقل،إدارة الضرائب،معدلاتالضريبةالفعالية .

الضريبة هي واحدة من عناصر إيرادات الدولة التي زادت من السنة إلى السنة. هذا يجعل الحكومة تأمل في الحصول على الحد الأقصى للضريبة من موضوع الضرائب لتطوير البلاد. الشركة باعتبارها واحدة من الموضوعات الضريبية لديها هدف مخالف للحكومة. الهدف يعني لدفع ضرائب قدر الإمكان من الناحية الاقتصادية حتى تزيد الأرباح التي يكسبها. في تنفيذ هذه الأهداف، تبذل الشركة جهوداً مثل التخطيط الضريبي بحيث تكون الضرائب المودعة أكثر كفاءة. يسمى هذا النشاط بإدارة الضرائب. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير حجم الشركة، والفاعلية المالية، والربحية، والمفوض المستقل على إدارة الضرائب مع مؤشرات معدل الضريبة الفعالة.

تتم تضمين هذه الدراسة في البحث الكمي باستخدام البيانات الثانوية في شكل تقارير مالية سنوية مع عدد من شركات قطاع صناعة السلع الاستهلاكية المدرجة في بورصة إندونيسيا للفترة 2013-2018 . وتم أخذ عينة البحث بتقنية أخذ العينات الهادفة (Purposive Sampling) للحصول على 25 شركة عينة. وتم تحليل هذا البحث من خلال الاختبار الإحصائي الوصفي، واختبار الافتراض الكلاسيكي، واختبار الانحدار المتعدد، بمساعدة IBM SPSS، الإصدار 25.

أظهرت النتائج هذه الدراسة أن حجم الشركة والربحية والمفوض المستقل لم يكن له أي تأثير جزئياً على إدارة الضرائب من خلال مؤشرات معدل الضريبة الفعالة. بسبب عدم مراعاة الشركة لمراعاة دور المفوض المستقل وموارد الشركة والأرباح. وأظهرت النتائج الأخرى أيضاً أن النفوذ يؤثر على إدارة الضرائب. وفي الوقت نفسه، أظهرت نتائج الدراسة أيضاً أن حجم الشركة والفاعلية المالية والربحية والمفوض المستقل يؤثر في وقت واحد على إدارة الضرائب من خلال مؤشرات معدل الضريبة الفعالة بقيمة R تبلغ 0.082.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara Indonesia terdiri dari empat unsur, meliputi penerimaan pajak yang terbagi menjadi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Salah satu unsur penerimaan negara yang selalu mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun adalah pajak. Peningkatan tersebut menjadikan pajak sebagai penerimaan utama negara. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penerimaan negara berupa pajak dalam negeri dalam APBN pada tahun 2018 sebesar Rp1.579.395,50 miliar, sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp1.029.850,00 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kurang lebih 53% dalam kurun 6 tahun. Khususnya, penerimaan pajak ini berasal dari pajak penghasilan yang ditunjukkan BPS bahwa pada tahun 2018 penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp83.133,50 miliar yakni 54% dari penerimaan pajak negara. Selain itu, alasan penerimaan pajak menjadi penerimaan utama Indonesia adalah proporsi penerimaan pajak dalam negeri adalah 83% dari semua penerimaan negara pada tahun 2018.

Penerimaan pajak penghasilan di suatu negara termasuk dalam faktor penting yang menjamin ketersediaannya dana bagi pembangunan negara berkembang seperti Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menyebutkan Subjek Pajak meliputi orang pribadi, badan usaha yang didirikan atau

berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap. Lebih jelasnya disebutkan dalam pasal 2 ayat (3) bahwa subjek pajak dalam negeri juga meliputi badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi syarat, antara lain:

- a. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- b. pembukuannya diperiksa oleh lembaga pengawasan fungsional Negara.

Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang tidak memenuhi kriteria-kriteria di atas, sehingga perusahaan merupakan salah satu dari subjek pajak. Sebagai salah satu subjek pajak, perusahaan tentu diinginkan negara untuk memberikan kontribusinya secara benar bagi penerimaan negara untuk kepentingan pembangunan negara di masa depan. Pemerintah dalam kaitannya dengan kepentingan kemakmuran negara tentu menginginkan penerimaan pajak yang berkelanjutan itu akan tetap besar untuk menjamin rencana pembangunan ke depannya. Hal tersebut jelas sekali bertolak belakang dengan tujuan perusahaan yang jelas menginginkan laba sebesar-besarnya bagi kelangsungan usahanya. Salah satu cara untuk memaksimalkan penerimaan laba suatu perusahaan dapat dilakukan dengan meminimalkan beban pajak yang harus dikeluarkan.

Banyak perusahaan melakukan perencanaan terlebih dahulu mengenai kewajiban perpajakannya agar dapat memanfaatkan berbagai alternatif supaya pajak yang disetorkannya tersebut lebih efisien dan ekonomis. Kegiatan tersebut disebut dengan manajemen pajak. Kegiatan manajemen pajak ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melanggar atau tidak melanggar undang-undang. Upaya dengan pelanggaran

undang-undang disebut dengan *tax avoidance*, sedangkan upaya dengan tidak melanggar undang-undang disebut dengan *tax evasion*. Dari pengertian tersebut tentu perusahaan tidak boleh melakukan *tax avoidance* jika tidak ingin dikenakan sanksi ataupun denda, yang tentu akan lebih meminimalkan laba yang akan didapatnya. Namun, *tax avoidance* juga merupakan dapat dilaksanakan secara efisien oleh perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam undang-undang perpajakan.

Salah satu contoh kasus manajemen pajak yang ilegal hingga dibawa ke pengadilan adalah risiko perpajakan yang potensial dialami PT. Tambang Asri Lestari (TAL). Kasus berawal ketika TAL berencana meminjam langsung (*direct loan*) pada *Tamborine Stargazer, Pty. Ltd* (TSP) sebesar USD 25 juta untuk lima tahun ke depan. TSP merupakan pemilik saham TAL sebesar 80%, dimana seluruh modal dari TSP telah disetor penuh seluruhnya, karena itu peminjaman direncanakan dilakukan pinjaman tanpa bunga (*non interest bearing loan*), menimbang keadaan TAL yang baru berdiri dan masih dalam fase kegiatan eksplorasi. Sementara itu, tingkat suku bunga pinjaman dolar di pasaran adalah 4% per tahun, serta dana yang berkaitan dengan rencana pinjaman itu, berasal dari penerbitan *global bond* anak perusahaan, *TSP Finance International, Inc.* (TFII). Ditinjau dari UU Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (3), Dirjen Pajak mempunyai wewenang dalam menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan jika di antara TSP dan TAL tidak terdapat hubungan istimewa. Meski hubungan istimewa itu memang ada, tetapi pinjaman sebenarnya berasal dari penerbitan *global bond* TFII, bukan dari TSP. Sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2010 atas pinjaman TAL tersebut seharusnya

dianggap terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar sejumlah 4%. Hal ini akan menimbulkan *withholding tax* PPH Pasal 26 atas biaya bunga, PPh bunga dan sanksi administrasi. Kasus ini menunjukkan bahwa TAL melakukan manajemen pajak untuk menghindari biaya bunga serta pajak atas biaya bunga tersebut.

Kasus selanjutnya adalah kasus Indofood International Finance Ltd dan JP Morgan Chase Bank N.A., cabang London. Kasus ini diputuskan hingga tingkat Mahkamah Agung di Inggris yaitu pada *The Supreme Court Of Judicature Court Of Appeal (Civil Division)*. Kasus ini berlatar belakang bahwa Indofood International Finance Ltd (IIF) yang berkedudukan di Mauritius dan dimiliki 100% oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (PT. ISM) telah menerbitkan obligasi pada tanggal 18 Juni 2002 dan akan jatuh tempo lima tahun berikutnya. Hasil emisi obligasi seluruhnya dipinjamkan pada PT. ISM dengan perjanjian utang yang skema pinjamannya sama dengan skema obligasi yang diterbitkan oleh IIF dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,375% per tahun yang wajib dibayarkan tiap enam bulan. Berdasarkan prospektus obligasinya, ditentukan bahwa IIF berhak melunasi seluruh obligasi yang terutang sebelum jatuh tempo ketika ada perubahan peraturan perpajakan baik di Mauritius atau di Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 2005, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Mauritius telah diterminasi sehingga kewajiban pemotongan pajak atas bunga PT. ISM kepada IIF berubah menjadi 20% dari 10%. Akibatnya, IIF ingin melakukan *buyback* obligasi untuk menghindari pajak atas bunga tersebut, namun, JP Morgan sebagai *trustee* dari pemegang obligasi tidak menyetujui *buyback* yang hendak dilakukan oleh *issuer bond* sebagai akibat diterminasinya Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Mauritius. JP Morgan lalu membawa perkara tersebut ke Pengadilan.

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa perolehan pinjaman merupakan satu faktor penting yang menyebabkan perilaku manajemen pajak, sehingga aspek yang dilihat untuk memperoleh pinjaman berupa ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas dapat mempengaruhi manajemen pajak. Selain itu, komisaris independen sebagai pihak netral dan sebagai salah satu bentuk penerapan *corporate governance* yang juga ikut menyusun kebijakan perusahaan harusnya dapat mencegah manajemen pajak yang ilegal juga termasuk faktor penting. Imelia (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang dikategorikan dalam perusahaan berskala besar menyetor pajak lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil. Sementara itu, Zimmerman dalam Noor *et al.* (2010) menyatakan dalam penelitian yang mereka lakukan bahwa perusahaan ukuran besar menyetor pajak lebih besar daripada perusahaan ukuran kecil. Hal itu disebabkan oleh *political cost* yang menyebabkan besarnya beban pajak yang disetorkan oleh perusahaan besar berjumlah lebih banyak dari biaya seharusnya. Wajarnya, ukuran perusahaan semakin besar maka manajemen pajaknya akan semakin baik, sehingga ketika manajemen pajak perusahaan semakin baik maka tarif pajak efektifnya akan semakin rendah. Meninjau penelitian Sinaga dan Sukartha (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Namun, ada pula hasil penelitian yang diperoleh bahwa ukuran perusahaan sama sekali tidak memiliki pengaruh atas manajemen pajak yaitu penelitian Adnantara dan Dewi (2016).

Leverage (tingkat utang) perusahaan dapat mengakibatkan penurunan jumlah pajak, disebabkan oleh biaya bunga atas utang perusahaan yang dipakai untuk mengurangi pendapatan perusahaan. Karena itu, perusahaan lebih memilih utang sebagai pembiayaannya untuk dapat mengurangi penghasilan mereka yang akan menjadi dasar pengenaan pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian Imelia (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh atas manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya, Adnantara dan Dewi (2016) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh atas manajemen pajak.

Profitabilitas menyatakan kemampuan dari suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan dalam satu periode tertentu. Perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas dalam memaksimalkan manajemen pajak perusahaan selain memanfaatkan utang perusahaan. Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penghasilan yang diperoleh subjek pajak yang dalam konteks ini adalah perusahaan akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan. Penelitian terdahulu oleh Adnantara dan Dewi (2016) yang mendapatkan hasil bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh dengan arah negatif terhadap tarif pajak efektif, sebaliknya penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014) menarik kesimpulan bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak, yang dalam penelitian ini memakai indikator tarif pajak efektif.

Penelitian Adnantara dan Dewi (2016) adalah penelitian yang dijadikan acuan oleh peneliti. Penelitian tersebut menguji pengaruh variabel ukuran perusahaan,

tingkat utang, dan profitabilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator *effective tax rate* (tarif pajak efektif). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan disusun peneliti adalah adanya variabel komisaris independen yang diuji dan juga sampel perusahaan yang digunakan. Penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai pengaruh variabel komisaris independen terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif adalah penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014). Dalam penelitiannya, mereka menyatakan ketika jumlah komisaris independen semakin tinggi maka akan semakin ketat pengawasan terhadap agen. Dengan adanya pengawasan terhadap agen yang ketat dari komisaris independen, maka diharapkan tarif pajak efektif perusahaan sesuai dengan semestinya. Manajer melakukan tindakan manajemen pajak didasari oleh kebutuhan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Salah satu alternatifnya adalah meminimalkan beban yang dibayarkan perusahaan, seperti beban pajak. Hal itu bertolak belakang dengan penelitian Meilinda dan Cahyonowati (2013) yang menunjukkan bahwa keberadaan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar pemenuhan ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas (*founders*) masih berperan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan dapat menurun. Hal itu menunjukkan bahwa komisaris independen dalam perusahaan belum bisa melakukan pengawasan terjadi atau tidaknya manajemen pajak dalam perusahaan.

Penelitian Sinaga dan Sukartha (2018), Adnantara dan Dewi (2016), Imelia (2015), Ardyansah dan Zulaikha (2014), serta Meilinda dan Cahyonowati (2013) memiliki hasil yang berbeda-beda dan ada pula saling bertolak belakang, sehingga membuat peneliti tertarik dalam meneliti kembali mengenai ukuran

perusahaan, likuiditas, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen dalam kaitan pengaruhnya atas manajemen pajak. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan total aset. Pengukuran *leverage* dalam penelitian ini menggunakan indikator *Debt to Equity Ratio* (DER) dan profitabilitas perusahaan dihitung dengan indikator *Return On Equity* (ROE). Pengukuran atas komisaris independen akan menggunakan indikator seberapa persen saham yang dimiliki manajemen. Ditelaah dari dua contoh kasus yang sebelumnya terjadi di Indonesia-Australia dan Inggris, peneliti terdorong untuk menyusun penelitian dengan studi empiris terhadap perusahaan dalam bidang sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu perusahaan yang terindikasi atau terkait dengan kasus manajemen pajak adalah salah satu perusahaan sektor industri barang konsumsi, di mana perusahaan ini mempunyai nilai penjualan yang stabil sehingga diprediksi akan memperoleh laba setiap tahunnya. Selain itu, penelitian akan mengambil data-data perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013 hingga 2018.

Uraian latar belakang di atas mendorong peneliti untuk menyusun penelitian mengenai **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Pada Perusahaan Industri Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Dalam BEI Periode 2013-2018)”**

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam BEI periode 2013-2018?
2. Apakah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam BEI periode 2013-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam BEI periode 2013-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam BEI periode 2013-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang mampu memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat dan berguna dalam disiplin ilmu akuntansi serta mampu dijadikan referensi dan pertimbangan bagi penelitian ke depannya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak, misalnya ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang bisa membantu investor dalam mengambil keputusan berkaitan dengan investasinya. Variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian juga diharapkan dapat digunakan investor untuk meninjau kegiatan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan apakah sudah dilakukan dengan baik dan benar. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan perbandingan laporan keuangan perusahaan setiap periode yang akan menerima investasi darinya.

b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan atau bahan informasi untuk perusahaan dalam membantu perusahaan dalam

melakukan penyusunan kebijakan akuntansi yang digunakan, khususnya jika berkaitan dengan tarif pajak efektif atau manajemen pajak, sehingga perusahaan mampu mencegah praktik manajemen pajak ilegal yang mungkin akan dilakukan oleh agen dengan melihat ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen yang tercantum dalam laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, serta dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal tersebut ke depannya.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat dipakai oleh pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan atau kebutuhan atas hasil penelitian ini, baik digunakan sebagai bahan masukan atau bahan teori untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai bidang dan topik yang berkaitan.

1.5 Batasan Penelitian

Batas penelitian ini berdasarkan paparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang dipakai dalam penelitian adalah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen sebagai variabel independen dan manajemen pajak sebagai variabel dependen.
2. Periode penelitian hanya selama 6 tahun sejak 2013 hingga 2018.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Adnantara dan Dewi(2016) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Properti dan Real Estate	X_1 = Ukuran Perusahaan X_2 = Tingkat Utang X_3 =Profitabilitas Y = Manajemen Pajak (ETR)	Kuantitatif. Data dianalisis dengan model regresi berganda.	Penelitian memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atas manajemen pajak. Selain itu, penelitian menunjukkan hasil lain bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap manajemen pajak.
2	Ardyansah dan Zulaikha (2014) Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> , dan Komisaris Independen terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	X_1 = <i>Size</i> X_2 = <i>Leverage</i> X_3 = <i>Profitability</i> X_4 = <i>Capital Intensity Ratio</i> X_5 =Komisaris Independen Y = <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	Kuantitatif. Metode analisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolaritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi	Penelitian menunjukkan <i>size</i> (ukuran perusahaan) dan komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan atas ETR, tetapi <i>size</i> dengan arah negatif sebaliknya komisaris independen dengan arah positif. Sedangkan <i>leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
3	Sinaga dan Sukartha (2018) Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity Ratio</i> , <i>Size</i> , dan <i>Leverage</i> pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015	X ₁ = Profitabilitas X ₂ = <i>Capital Intensity Ratio</i> X ₃ = <i>Size</i> X ₄ = <i>Leverage</i> Y = Manajemen Pajak (ETR)	Kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda	Penelitian menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh positif profitabilitas, <i>capital intensity ratio</i> , <i>size</i> , dan <i>leverage</i> atas manajemen pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012 sampai 2015. Pengaruh tersebut terjadi secara parsial dan simultan.
4	Imelia (2015) Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak (ETR) pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012	X ₁ = Ukuran Perusahaan X ₂ = Utang X ₃ =Profitabilitas X ₄ = Intensitas Persediaan X ₅ = Intensitas Aset X ₆ =Fasilitas Perpajakan X ₇ =Komisaris Independen Y=Tarif Pajak Efektif	Kuantitatif . Menggunakan uji analisis regresi linier berganda.	Penelitian memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan, sedangkan utang perusahaan, fasilitas perpajakan dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. Hanya 34% pengaruh dari variabel dependen terhadap variabel independen sedangkan sisanya dijelaskan variabel lainnya.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
5	Lisaumi (2017) Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEITahun 2013-2015)	$X_1 = Leverage$ $X_2 = Profitabilitas$ $X_3 = Intensitas Kepemilikan Aset Tetap$ $X_4 = Intensitas Kepemilikan Persediaan$ $X_5 = Status Kepemilikan Perpajakan$ $Y = Manajemen Pajak$	Kuantitatif . Menggunakan uji korelasi Spearman.	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa <i>leverage</i> , intensitas kepemilikan aset tetap, status kepemilikan, fasilitas perpajakan berkorelasi positif yang rendah dengan manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif, sedangkan profitabilitas dan intensitas kepemilikan persediaan mempunyai korelasi positif yang sangat rendah dengan manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.
6	Amelia (2015) Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Komisaris Independen terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)	$X_1 = Ukuran Perusahaan$ $X_2 = Leverage$ $X_3 = Profitabilitas$ $X_4 = Intensitas Persediaan$ $X_5 = Intensitas Aset$ $X_6 = Komisaris Independen$ $Y = Effective Tax Rate$	Kuantitatif . Menggunakan analisis regresi linier berganda.	Peneliti menyimpulkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> . Hasil lain menunjukkan bahwa intensitas aset tetap, <i>leverage</i> , komisaris independen, dan intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh atas <i>effective tax rate</i> .

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
7	Meilinda dan Cahyonowati (2013) Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)	X_1 = Jumlah Dewan Komisaris X_2 = Persentase Komisaris Independen X_3 = Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris & Direksi X_4 = Ukuran Perusahaan X_5 = Kinerja Perusahaan X_6 = Tingkat Utang Perusahaan X_7 = Beda Tarif Pajak Y = Manajemen Pajak	Kuantitatif . Menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi.	Penelitian menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan tingkat utang perusahaan mempengaruhi manajemen pajak secara signifikan. Sementara itu, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi, dan beda tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
8	Zeng (2018) <i>Relationship Between Corporate Social Responsibility And Tax Avoidance: International Evidence</i>	X ₁ = Tata kelola tingkat negara yang lemah X ₂ = Tata kelola tingkat negara yang kuat X ₃ = Rata-rata hukum &kelembagaan X ₄ = Skor CSR X ₅ = Sistem pajak negara X ₆ = Negara <i>common law</i> X ₇ = Perusahaan memakai IFRS X ₈ = GDP perkapita X ₉ = Ukuran perusahaan X ₁₀ = <i>Profitability</i> X ₁₁ = <i>Leverage</i> X ₁₂ = Intensitas aset tak berwujud X ₁₃ = Intensitas modal X ₁₄ = Intensitas inventaris Y= Penghindaran pajak	Metode Kuantitatif Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi.	Penelitian ini menemukan hasil bahwa CSR berkaitan secara positif dengan penghindaran pajak. Hasil lain juga menunjukkan bahwa di negara-negara yang tingkat tata kelola negaranya rendah dan perusahaan dengan skor CSR lebih tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Penelitian ini juga membuktikan bahwa IFRS menghindari pengurangan pajak. <i>Size</i> , GDP perkapita, intensitas modalberhubungan secara negatif dengan penghindaran pajak dengan indikator ETR. Sementara itu, ROA, <i>leverage</i> , intensitas aset tak berwujud, dan intensitas inventaris berhubungan secara positif.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Meninjau dari tabel di atas, penulis dapat merumuskan perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Persamaan dan perbedaan ini akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
Adnantara dan Dewi (2016)	Menggunakan indikator tarif pajak efektif untuk mengukur manajemen laba. Menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi berganda	Menggunakan <i>Return On Total Assets</i> (ROA) sebagai indikator profitabilitas dan <i>Debt Ratio</i> (DR) sebagai indikator tingkat utang. Objek penelitian pada perusahaan properti dan real estate.	Menggunakan <i>Return On Equity</i> (ROE) sebagai indikator profitabilitas dan <i>Debt Equity Ratio</i> sebagai indikator <i>leverage</i> . Menggunakan uji t, f, dan r^2 . Objek penelitian perusahaan industri sektor barang konsumsi.
Ardyansah dan Zulaikha (2014)	Menguji <i>size</i> , <i>leverage</i> , <i>profitability</i> , dan komisaris independen terhadap tarif pajak efektif. Melakukan uji regresi berganda.	Menggunakan ROA sebagai indikator profitabilitas. Melakukan pengujian pengaruh secara parsial. Objek penelitian perusahaan manufaktur.	Menggunakan ROE sebagai indikator profitabilitas. Menguji pengaruh secara parsial dan simultan. Objek penelitian perusahaan industri sektor barang konsumsi.
Sinaga dan Sukartha (2018)	Memakai ETR sebagai indikator manajemen pajak, DER sebagai indikator <i>leverage</i> .	Menggunakan ROA sebagai indikator profitabilitas. Objek penelitian pada perusahaan manufaktur.	Menggunakan ROE sebagai indikator profitabilitas. Objek penelitian pada perusahaan industri sektor barang konsumsi
Imelia (2015)	Melakukan uji regresi berganda. Menggunakan tarif pajak efektif sebagai indikator manajemen pajak.	Objek penelitian pada perusahaan LQ45. Memakai ROA sebagai indikator profitabilitas dan DR sebagai indikator <i>leverage</i>	Objek penelitian pada perusahaan industri sektor barang konsumsi. Memakai ROE sebagai indikator profitabilitas, DER sebagai indikator <i>leverage</i> .

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	
		Terdahulu	Sekarang
Lisaumi (2017)	Menggunakan ROE sebagai indikator profitabilitas dan tarif pajak efektif sebagai indikator manajemen pajak.	Melakukan uji korelasi Spearman dan menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Objek penelitian perusahaan manufaktur.	Melakukan uji t, f, dan r^2 dan menguji pengaruh variabel independen secara parsial dan simultan terhadap variabel dependen. Objek penelitian perusahaan industri sektor barang konsumsi
Amelia (2015)	Menggunakan DER sebagai indikator <i>leverage</i> dan tarif pajak efektif sebagai indikator manajemen pajak. Melakukan uji f, t, dan regresi berganda.	Menggunakan ROA sebagai indikator profitabilitas. Objek penelitian pada perusahaan manufaktur.	Menggunakan ROE sebagai indikator profitabilitas. Objek penelitian pada perusahaan industri sektor barang konsumsi.
Meilinda dan Cahyonowati (2013)	Menguji komisaris independen sebagai variabel independen. Melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji regresi berganda	Menggunakan GAAP ETR dan <i>Cash ETR</i> sebagai indikator manajemen pajak. Menggunakan <i>size</i> dan tingkat utang sebagai variabel kontrol. Objek penelitian perusahaan manufaktur	Menggunakan GAAP ETR sebagai indikator manajemen pajak. Menggunakan <i>size</i> dan tingkat utang sebagai variabel independen. Objek penelitian perusahaan industri sektor barang konsumsi.
Zeng (2018)	Menggunakan tarif pajak efektif sebagai indikator manajemen pajak. Melakukan uji statistik deskriptif.	Menggunakan profitabilitas, <i>leverage</i> , dan <i>size</i> sebagai variabel kontrol.	Menggunakan profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menurut Fahmi (2014) adalah suatu keadaan yang terjadi di suatu perusahaan ketika pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut sebagai agen dan pemilik modal disebut sebagai prinsipal membentuk kontrak kerjasama (disebut "*nexus of contract*"). *Nexus of contract* tersebut berisi kesepakatan-kesepakatan yang menyebutkan bahwa agen harus bekerja secara maksimal dalam memberi kepuasan maksimal kepada pemilik modal seperti menghasilkan laba yang tinggi. Selain itu, teori keagenan juga dibentuk sebagai upaya untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang muncul di saat ada ketidaklengkapan informasi ketika mengadakan kontrak (perjanjian). Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian antara prinsipal (pemberi kerja, seperti pimpinan perusahaan atau pemegang saham) dengan agen seperti manajer atau bawahan (Gudono, 2012) Adanya konflik kepentingan antara agen dan pemilik karena agen dimungkinkan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan, hingga memicu biaya keagenan. Manajer sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan laba para pemilik dengan mendapat kompensasi yang sesuai dengan kontrak.

Implikasi dari keberadaan teori keagenan memungkinkan terjadinya sikap oportunistik di kalangan agen sehingga melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya disegaja, misalnya melakukan *income smoothing*, seperti melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi sesuai dengan tujuan dan keinginan agen, atau melaporkan hasil penjualan dengan kenaikan yang tidak terlalu

tinggi, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi, karena tujuan manajer dan pemegang wajarnya memang berbeda. Pengambilan keputusan oleh manajer sering berpihak pada kepentingan manajer sendiri dan tidak berpihak pada kepentingan pemilik saham, sehingga memunculkan konflik yang sering disebut konflik agensi (*agency conflict*).

Konflik agensi yang timbul awalnya sangat sederhana. Contoh sederhananya yaitu karena adanya asumsi mengenai sifat dasar manusia yang berkaitan pada teori keagenan adalah (1) manusia menomorsatukan kepentingan dirinya sendiri secara umum; (2) mengenai persepsi di masa depan, manusia hanya memiliki daya pikir yang terbatas; dan (3) sesuai dengan jati dirinya, manusia akan menghindari resiko. Manajer dalam hubungan keagenan merupakan pihak yang mempunyai informasi menyeluruh mengenai perusahaan, dimulai dari lingkungan kerja, kapasitas perusahaan, dan prospek perusahaan ke depan. Terkadang, manajer tidak mengungkapkan beberapa informasi mengenai perusahaan kepada investor. Dari hal inilah konflik terjadi. Sebagai solusi, perlu adanya pengendalian dan pengawasan untuk memastikan sikap manajer sudah sesuai apa belum dengan ketentuan dan kebijakan perusahaan. Pengendalian dan pengawasan inilah yang disebut penerapan *corporate governance* dalam perusahaan, yang diharapkan mampu meyakinkan kepada pihak investor atau penyedia dana bahwa informasi yang akan mereka peroleh adalah akurat.

2.2.2. Pajak

Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung dapat ditunjukkan dan yang dipakai untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rochmat

Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo, 2016). Dr. Soeparman Soemahamidjaya dalam Waluyo (2013) mendefinisikan pajak adalah iuran wajib, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, berupa uang atau barang, dengan tujuan menutup biaya produksi barang dan jasa yang kolektif dalam memperoleh kesejahteraan secara umum. Definisi pajak berikutnya berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan pajak sebagai suatu kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak berupa badan atau orang pribadi kepada negara yang mempunyai sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan dipakai membayar keperluan negara yang ditujukan untuk mencapai kemakmuran rakyat sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran yang bersifat wajib rakyat pada negara berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa yang imbalannya tidak didapatkan secara langsung dan digunakan untuk membayai keperluan negara dalam tujuan kemakmuran dan kesejahteraan umum.

Pajak dapat digolongkan berdasarkan pemungutnya menurut Susyanti dan Dahlan (2016) sebagai berikut

- 1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga hasilnya masuk secara langsung ke dalam kas negara. Lembaga pengelolanya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Contoh dari pajak pusat meliputi PPh, PPN dan PPnBm, Bea Materai, Fiskal Luar Negeri, Pajak Ekspor, dan lain sebagainya.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sehingga hasilnya langsung masuk ke dalam kas daerah. Pengelolanya adalah Dinas Pendapatan Daerah. Pajak ini diklasifikasikan lagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota juga memungut retribusi selain pajak daerah.

2.2.3. Manajemen Pajak

Pohan (2016) menyebutkan definisi manajemen pajak adalah seluruh upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang ada di perusahaan berjalan secara efisien dan efektif. Manajemen pajak secara singkat juga dijelaskan oleh Suandy (2016) sebagai upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal, namun legalitasnya tergantung dari instrumen yang digunakan. Selain itu, manajemen pajak menurut Lumbatoruan dalam Suandy (2016) adalah sarana dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin agar menerima laba dan likuiditas yang diharapkan.

Definisi manajemen pajak jika dirangkum dari beberapa definisi di atas adalah upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara efisien dan efektif. Manajemen pajak yang akan dilakukan perusahaan ini berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen, misalnya dalam

perencanaan pajak ini berusaha memanfaatkan peluang-peluang akibat peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak yang dapat memberi keuntungan bagi perusahaan.

Suandy (2016) merumuskan tujuan timbulnya tindakan manajemen pajak dilakukan perusahaan adalah:

- 1) Kewajiban wajib pajak adalah memenuhi kewajiban pajaknya sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran.
- 2) Upaya yang efisien untuk mendapatkan keuntungan dan likuiditas yang seharusnya.

Pohan (2016) juga menyebutkan tujuan dilakukannya perencanaan pajak dalam ranahnya melakukan manajemen pajak meliputi:

- 1) Meminimalkan beban pajak perusahaan yang terutang.
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak yang tercantum dalam laporan keuangan.
- 3) Meminimalisasi terjadinya *tax surprise* apabila dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien, efektif, dan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Selayaknya kegiatan manajemen yang dilakukan perusahaan lainnya, manajemen pajak memiliki fungsi-fungsi pelaksanaannya yang dijelaskan oleh Pohan (2016) antara lain:

- 1) *Tax Planning* merupakan upaya yang dilakukan perusahaan mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang disetor perusahaan benar-benar efisien.

Tujuan utama dilakukannya adalah mencari berbagai celah yang mampu

ditembus dalam koridor perpajakan (*loopholes*), supaya perusahaan bisa memiliki beban pajak dengan jumlah minimal. Selain itu, terdapat tiga macam cara yang bisa dilakukan dalam fungsi ini meliputi *tax avoidance* (penghindaran pajak), *tax evasion* (penyelundupan pajak), dan *tax saving* (penghematan pajak).

- 2) *Tax Administration/Tax Compliance* adalah seluruh upaya yang dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menghitung pajak secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta kepatuhan dalam pembayaran dan pelaporan secara tepat waktu dan yang telah ditetapkan.
- 3) *Tax Audit* merupakan strategi yang dilakukan untuk menangani hasil pemeriksaan pajak ataupun strategi untuk kepentingan mengajukan surat keberatan atau surat banding.
- 4) *Other Tax Matters* adalah masalah yang meliputi fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan perpajakan, misalnya mengkomunikasikan peraturan-peraturan prosedur dan sistem perpajakan kepada pihak-pihak lain dalam perusahaan, contohnya penerbitan faktur penjualan standar yang berkaitan dengan PPN, pemotongan pajak *withholding* (PPh pasal 23/26) yang berhubungan dengan jasa konstruksi, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa profesi, serta termasuk pelatihan bagi staf yang berhubungan dengan masalah pajak dan lain sebagainya.

Cara melihat ada atau tidaknya tindakan manajemen pajak yang dipraktikkan oleh suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menentukan tarif pajak efektif. Memperoleh tarif pajak efektif dapat dilakukan dengan membandingkan pajak yang dibayar perusahaan dengan laba komersial perusahaan sebelum pajak. Perusahaan akan mendapatkan gambaran upaya manajemen perusahaan untuk menekan kewajiban

perpajakan perusahaan dengan adanya penentuan tarif pajak efektif, maka ketika perusahaan mempunyai tarif pajak efektif yang persentasenya lebih besar dari tarif pajak yang ditetapkan, hal itu menunjukkan kurang maksimalnya perusahaan dalam menggunakan insentif perpajakan yang tersedia, sebab dengan melakukan pemanfaatan insentif perpajakan yang ada, perusahaan mampu menurunkan persentase pembayaran pajak dari laba komersial.

Semua kegiatan penekanan kewajiban perpajakan maupun pemanfaatan insentif sejatinya dilakukan untuk menghindari pajak. Kegiatan penghindaran pajak ini tak hanya memiliki dampak positif yang berupa beban pajak yang disetorkan perusahaan lebih kecil, tapi juga memiliki dampak negatif. Hal itu sesuai dengan pendapat Zeng (2018) yang menyatakan bahwa kegiatan penghindaran pajak merupakan kegiatan berisiko sebab membebankan biaya yang besar pada perusahaan, misalnya dengan adanya pengawasan dari publik dan pemerintah, jika diketahui ada tindakan pelanggaran hukum, maka akan merusak reputasi perusahaan.

2.2.4. Tarif Pajak Efektif

Zeng (2018) menyatakan bahwa kegiatan manajemen pajak dapat diukur dengan tiga cara dasar. Cara pertama dalam mengukur kegiatan manajemen pajak adalah dengan tarif pajak efektif tahunan atau biaya pajak secara total (jumlah dari biaya pajak saat ini dan biaya pajak tangguhan) yang tersedia dalam laporan laba rugi. Kedua, manajemen pajak dapat diukur sebagai perbedaan antara pendapatan sebelum pajak dan penghasilan kena pajak. Terakhir, pengukuran manajemen pajak dapat ditemukan dari kesenjangan sisa pajak yang tertera dalam buku pajak. Yang dipakai di sini adalah pilihan pertama yakni tarif pajak efektif.

Amelia (2015) mengindikasikan tarif pajak efektif perusahaan sebagai suatu skala penting yang mengukur beban pajak untuk para pembuat kebijakan dengan kategori usaha tertentu dan dalam pemberian insentif yang diterima oleh wajib pajak. Tarif pajak efektif juga didefinisikan Zeng (2018) sebagai biaya pajak secara total (jumlah dari biaya pajak saat ini dan biaya pajak tangguhan) yang tersedia dalam laporan laba rugi. Penentuan tarif pajak efektif dipakai dalam menakar akibat perubahan kebijakan perpajakan yang ditimbulkan oleh beban pajak perusahaan. Dari kedua definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak efektif digunakan dalam menunjukkan jumlah persentase perusahaan sebenarnya menyeter pajak terhadap laba komersial yang diterima oleh perusahaan. Perusahaan juga mampu melihat berapa jumlah nyata perusahaan menyeter pajak apakah lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan laba komersial sebelum pajak perusahaan tersebut. Selain itu, tarif pajak efektif sering dipakai sebagai alat dalam menarik kesimpulan yang berkaitan dengan sistem perpajakan oleh para pembuat keputusan dan pihak yang berkepentingan.

Tarif pajak efektif dirumuskan oleh Price Waterhouse Copers (PWC) sebagai jumlah keseluruhan pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Dari definisi ini diketahui bahwa tarif pajak efektif bertujuan untuk menentukan perbandingan jumlah pajak sebenarnya yang dibayar perusahaan terhadap laba komersial yang diterima perusahaan dan perbandingan ini dalam bentuk persentase. Perusahaan dapat menemukan berapa pajak yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan dengan hanya melihat tarif pajak efektif. Pajak yang dibayar tersebut dapat dilihat apakah lebih kecil atau lebih besar dari tarif yang sudah ditetapkan dengan dasar laba

komersial sebelum pajak perusahaan tersebut. Hal ini membuat fungsi dari tarif pajak efektif perusahaan berperan lebih penting dalam pemberian insentif kepada wajib pajak dan bagi para pembuat kebijakan untuk jenis usaha tertentu. Sementara itu, tarif pajak efektif di pihak pemerintahan dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan peraturan dan kebijakan perpajakan yang berkaitan dalam penetapan tarif pajak yang berlaku dan dengan insentif yang akan diterima oleh wajib pajak tertentu. Tarif pajak efektif ini menjadi sangat penting digunakan untuk meninjau dampak perbedaan antarkebijakan perpajakan yang berlaku dengan kebijakan akuntansi mengenai beban pajak di dalam perusahaan. (Haryadi dalam Amelia, 2015).

2.2.5. Ukuran Perusahaan

Riyanto (2008) memberikan definisi ukuran perusahaan sebagai suatu skala besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan, atau nilai asetnya. Brigham dan Houston (2010) menyebutkan definisi ukuran perusahaan sebagai skala pengukuran besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang dinilai atau diperlihatkan dengan total penjualan, total aset, biaya pajak, jumlah laba, dan lain sebagainya. Selain itu, pengertian ukuran perusahaan juga disebutkan oleh Denziana dan Monica (2016) yaitu suatu indikator yang memperlihatkan kekuatan finansial perusahaan dan digambarkan dengan total aset, total penjualan, dan rata-rata tingkat penjualan. Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala yang mengukur kekuatan finansial perusahaan dengan ditunjukkan melalui indikator total aset, total penjualan, jumlah laba, biaya pajak, nilai ekuitas, dan lain sebagainya.

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam empat kategori yaitu usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro. Definisi mengenai empat kategori ukuran perusahaan ini dijelaskan dalam pasal 1. Empat kategori ini dibedakan berdasarkan total asetnya tanpa menghitung tanah dan bangunan tempat usaha serta penjualannya per tahun. Secara singkat, usaha besar yang memiliki aset lebih dari sepuluh milyar dengan penjualan lima puluh milyar tiap tahunnya. Usaha menengah berada di bawah usaha besar dengan total aset sekitar lima ratus juta hingga sepuluh milyar dan penjualan tahunannya sekitar dua setengah milyar hingga lima puluh milyar. Usaha kecil dengan penjualan tiga ratus juta sampai dua setengah milyar per tahun dan total aset sebesar lima puluh juta hingga lima ratus juta. Usaha mikro berada di tingkat bawah dengan total aset paling banyak lima puluh juta dan penjualan per tahunnya maksimal tiga ratus juta.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan besar tentu akan lebih mudah mendapatkan modal di pasar modal dibanding perusahaan menengah, perusahaan kecil, apalagi perusahaan mikro. Hal tersebut karena perusahaan besar lebih mampu bertahan dalam industri dan dapat memakai penghasilannya untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi serta bersaing dengan mudah dengan pesaingnya. Meski begitu, menjadi perusahaan berukuran besar juga perlu memperhatikan mengenai hubungan *the political cost theory* dan *the political power theory*. *The political cost theory* menyebabkan perusahaan menjadi sorotan pemerintah dan menjadi pihak yang terkena dampak dari regulasi dari kebijakan pemerintah karena mempunyai tingkat visibilitas yang tinggi. Sebaliknya, *the political power theory* memberi penjelasan mengenai hubungan antara perusahaan besar dengan

sumberdaya yang dimilikinya agar dapat memanipulasi proses politik melaksanakan kegiatan *tax planning* demi tujuan penghematan pajak yang maksimal. Karena itu untuk membuktikan pendapat yang berkebalikan tersebut, perlu dilakukan pengujian atas ada atau tidaknya maupun positif atau negatifnya kaitan ukuran perusahaan dengan tarif pajak efektif.

2.2.6. *Leverage*

Leverage secara singkat dijelaskan oleh Fahmi (2012) sebagai ukuran yang digunakan menganalisis laporan keuangan untuk menunjukkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Rasio *leverage* menurut Fraser dan Ormiston (2008) merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh pendanaan perusahaan menggunakan utang relatif terhadap ekuitas dan kemampuan untuk membayar bunga dan beban tetap lainnya. Harahap (2013) juga menyebutkan definisi *leverage* sebagai rasio yang memberi gambaran mengenai hubungan antara utang perusahaan dengan modal, rasio ini dipakai untuk melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar terhadap modal yang menunjukkan kemampuan perusahaan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, *leverage* bisa didefinisikan sebagai rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan membayar utangnya jika dibiayai dengan modal. Selain itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa *leverage* diukur dengan rumus total utang dibagi dengan modal perusahaan.

Murhadi (2015) menyebutkan bahwa rasio *leverage* adalah rasio utang yang menggambarkan proporsi utang terhadap aset atau ekuitas. Selain itu, Murhadi (2015) juga menjelaskan dalam bukunya bahwa rasio-rasio yang termasuk dalam rasio *leverage* meliputi *Debt Ratio* (DR), *Debt Equity Ratio* (DER), dan *Long Term Debt to*

Equity (LTDE). Hal di atas menunjukkan bahwa dalam mengukur *leverage* perusahaan, maka mampu dilihat dari beberapa indikator di atas, salah satunya adalah *Debt to equity ratio* (DER). DER adalah jenis rasio *leverage* yang dipakai dalam penelitian ini. Definisi *debt to equity ratio* adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan yang didanai oleh utang yang dimiliki perusahaan. Semakin besar rasio ini maka semakin tidak menguntungkan bagi bank (kreditor) karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kebangkrutan atau kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Sebaliknya, ketika semakin besar rasio akan semakin baik bagi perusahaan, sebab perusahaan menunjukkan kemampuannya untuk mendanai aset tanpa perlu mengambil utang dari kreditor.

Hubungan antara pemakaian dana perusahaan yang didapat dari utang dijelaskan dalam rasio *leverage*. Pembiayaan kegiatan operasional perusahaan dengan utang akan memunculkan biaya tetap yaitu biaya bunga. Biaya tetap tersebut dapat mengurangi pendapatan yang mana menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga pembiayaan operasional perusahaan menggunakan utang akan secara langsung mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Noor *et al* (2010) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai rasio *leverage* yang lebih tinggi cenderung memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan perusahaan-perusahaan yang ditelitinya mengeluarkan biaya bunga yang mana akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.

2.2.7. Profitabilitas

Fraser dan Ormiston (2008) berpendapat bahwa profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi perusahaan dalam melakukan pengelolaan aktiva, kewajiban dan ekuitas. Profitabilitas juga digunakan dalam pengukuran laba dan keberhasilan operasi yang dilaksanakan perusahaan dalam suatu periode tertentu (Jusup, 2011). Murhadi (2015) mendefinisikan profitabilitas lebih singkat lagi yakni sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Dari ketiga definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas adalah pengukuran kerja perusahaan dalam suatu periode dilihat dari keuntungan yang diperolehnya.

Gitman dan Zutter (2012) menyebutkan bahwa rasio profitabilitas dapat dihitung melalui beberapa indikator yaitu *Common-Size Income Statements*, *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Earning Per Share* (EPS), *Return on Total Assets* (ROA), dan *Return on Common Equity* (ROE). Penelitian-penelitian sebelumnya mengacu pada penelitian Adnantara dan Dewi (2016) dan Ardyansah dan Zulaikha (2014) memakai ROA sebagai indikator profitabilitas. Hal ini dikarenakan ROA mengacu pada profitabilitas dan efisiensi operasional dan jika dibandingkan dengan *profit margin*, ROA dapat memberikan pengukuran yang memadai atas efektivitas keseluruhan yaitu penggunaan aktiva bersamaan dengan laba dari perusahaan karena *profit margin* tidak memperhitungkan penggunaan aktiva. Sementara itu, ROA terindikasi belum cukup menjadi skala profitabilitas perusahaan karena belum memperhitungkan penggunaan utang. Gitman

dan Zutter (2012) menunjukkan dalam *DuPont Formula* yang dimodifikasi bahwa ROE adalah indikator rasio profitabilitas yang dipengaruhi oleh tiga faktor sekaligus yaitu profitabilitas, efisiensi operasional, dan utang yang merupakan gabungan dari ROA dan *Financial Leverage Mutiplier*. Karena itu ROE dianggap indikator yang paling memperhatikan berbagai sumber daya yang tersedia di dalam perusahaan. Karena itu, penelitian ini menggunakan ROE sebagai indikator profitabilitas mengacu Lisaumi (2017) yang menyebutkan bahwa perusahaan yang mempunyai nilai ROE yang tinggi maka tingkat profitabilitasnya tinggi pula sehingga perusahaan itu akan dikenai pajak yang tinggi pula.

Manajemen dapat dikatakan telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan adalah ketika perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih tinggi dibanding biaya yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan. Perusahaan yang menerima laba atau mendapatkan penghasilan dari kegiatan usahanya diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Pada pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan dalam satu tahun pajak.

Undang-undang di atas sejalan dengan pendapat Rodriguez dan Arias (2012) mengenai salah satu faktor penentu beban pajak adalah profitabilitas, karena perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi akan membayar pajak setiap tahun. Hal itu sangat bertolak belakang ketika perusahaan mengalami kerugian atau memiliki

tingkat profitabilitas yang rendah maka akan menyeter pajak yang lebih sedikit atau bahkan tidak perlu membayar pajak. Hal tersebut disebut dengan kompensasi kerugian. Dampak atas adanya kompensasi kerugian adalah perusahaan bisa mengurangi kewajiban menyeter pajak untuk tahun pajak sebelumnya atau berikutnya. Semua manfaat mengenai beban pajak tersebut hanya akan diperoleh oleh perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Dengan adanya konsep tersebut, tingkat profitabilitas perusahaan dapat secara langsung berpengaruh terhadap tarif efektif perusahaan membayar pajak.

2.2.8. Komisaris Independen

Definisi dari komisaris independen menurut Imelia (2015) adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan secara khusus bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi memiliki urusan langsung dengan organisasi internal perusahaan. Pengangkatan komisaris independen dalam perusahaan dilakukan dengan tujuan pengawasan organisasi dalam menjalankan perusahaan dan sebagai kubu penengah yang berada di antara pihak pemegang saham dan komisaris dalam ketika konflik terjadi. Ardyansah dan Zulaikha (2014) juga menyatakan bahwa komisaris independen diberikan peran penting dalam perannya dalam menjadi penengah diantara kedua belah pihak yang mana diharuskan bersikap objektif dan mencegah lebih banyak risiko dalam konflik internal.

Salah satu alasan atas peran penting dari komisaris independen dalam penerapan *corporate governance* adalah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan belum mampu memberikan jaminan atas terlaksananya prinsip-prinsip *corporate governance*,

khususnya dalam memberi perlindungan terhadap investor. Dengan adanya komisaris independen, maka perusahaan diharapkan memiliki iklim yang lebih independen, objektif, dan menjaga kepercayaan serta keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan *stakeholder* lainnya.

Perusahaan publik, khususnya yang ada di Indonesia dan sahamnya dipasarkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sangat membutuhkan keberadaan komisaris independen. Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 memberikan kewajiban bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen di perusahaan minimal berjumlah 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris. Dewan Komisaris yang bisa dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tercatat.

Komisaris independen mengarahkan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang sudah ada di perusahaan dan mengawasinya dengan baik. Pengarahan dan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen tersebut supaya tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi antara manajemen perusahaan (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Peran komisaris independen adalah penengah dan pihak netral antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam penyusunan kebijakan yang tidak melanggar hukum. Salah satu contoh kebijakan tersebut adalah penentuan strategi yang terkait dengan pajak.

2.2.9. Kajian Islam

2.2.9.1. Ukuran Perusahaan dalam Islam

Ukuran sebuah perusahaan dapat secara mudah dilihat dengan mengetahui total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut yang tercantum dalam laporan keuangan itu. Hal itu disebabkan oleh dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, perusahaan menggunakan aktivanya. Ketika jumlah aktiva suatu perusahaan termasuk banyak, maka perusahaan dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan lancar dan dapat melakukan penjualan secara meluas, sehingga dapat disebut perusahaan besar.

Ketika suatu perusahaan memiliki jumlah aktiva yang besar, maka perusahaan tidak diperolehkan menggunakannya tanpa perhitungan yang benar. Islam memberi perintah hambanya dalam memakaiharta sesuai dengan tempatnya secara benar dan juga tidak membelanjakannya secara boros. Secara mudah, aktiva yang dimiliki perusahaan ini dianggap sebagai harta yang dimiliki perusahaan. Dalam kaitannya dengan harta yang dimiliki umat Islam, Al-Quran menjelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
 الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis

emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

(QS. Ali Imran:14)

Mardani (2012) menyebutkan bahwa Islam memprioritaskan kebebasan seseorang untuk memiliki sesuatu, selama tidak menentang syariat Islam. Seseorang bebas menginvestasikan harta yang dimilikinya dan meraih keuntungan semaksimal mungkin dengan catatan harus dengan jalan yang tidak melanggar syariat Islam. Kedudukan harta dalam Islam sebagai suatu amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah dan dipakai untuk kemaslahatan dirinya sendiri maupun masyarakat.

Berdasarkan tafsir di atas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus mengelola hartanya dengan benar, khususnya dalam penggunaan asetnya dalam kegiatan yang dijalannya. Perusahaan juga harus menjaga amanat berupa harta yang diberikan Allah dengan benar. Hal ini disebabkan harta ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Harta sangat sering membutuhkan mata dan menggoda hati, sehingga Allah terus-menerus mengingatkan manusia agar tidak tergiur oleh harta melalui Al-Quran dan Hadits. Manusia juga jangan sampai diperbudak oleh harta sehingga menjadikan manusia lupa akan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi.

2.2.9.2. Leverage dalam Islam

Muamalah utang-piutang (*leverage*) merupakan *muamalah* yang hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Hubungan utang-piutang antar hamba yang didasari atas

perintah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Selain itu, bagi saipa yang berhutang untuk selalu memegang amanat tersebut dengan tanggung jawab baik dengan dicatat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282.

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ ... الْحَقُّ

Artinya: "...Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...." (QS.Al-Baqarah: 282)

Hamka (2002) menyebutkan dalam Tafsir Al-Azhar mengenai ayat ini bahwa kepada kalian orang yang beriman kepada Allah supaya utang piutang itu ditulis, itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Berdasarkan tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum utang dalam Islam memang diperbolehkan, namun Rasulullah lebih menyarankan umatnya untuk berhati-hati ketika dalam hubungan utang-piutang karena utang bisa mengundang kehinaan dan dapat menjadi alasan seorang hamba masuk surga maupun alasan hamba masuk neraka. Karena itulah, perlu dilakukan pencatatannya atas transaksi utang-piutang yang ada. Ketika seorang hamba tidak dapat memenuhi utangnya apalagi utang yang belum dicatat maka sama saja hamba tersebut tidak menepati janji yang sama dengan ciri seseorang yang munafik yang tidak tepat janji.

Hal itu akan menjadi alasan mengapa utang dapat menjadi alasan seorang hamba masuk neraka. Bahkan ketika utang tidak dapat dipenuhi, maka akan menyebabkan suatu perusahaan bangkrut yang mana akan merugikan berbagai pihak, sehingga perusahaan harus sangat berhati-hati dalam pengelolaan utang.

2.2.9.3. Profitabilitas dalam Islam

Profitabilitas selalu dikaitkan dengan keuntungan yang didapat perusahaan. Perusahaan melakukan kegiatan penjualannya agar dapat memperoleh keuntungan. Dalam Islam, ketika manusia memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut harus bebas dari unsur riba yang dapat mengubah keuntungan yang awalnya halal itu menjadi haram. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
 ۞ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(QS. Al-Baqarah: 168)

Mardani (2012) menyebutkan bahwa riba yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah riba nasi’ah yakni yang diyakini sebagian besar ulama hukumnya haram meski tidak berlipat ganda. Hal ini karena riba nasi’ah adalah pembayaran tambahan yang disyaratkan orang yang meminjamkan. Berbeda dengan riba fadhhl yang diperbolehkan

karena merupakan transaksi penukaran barang dengan barang sejenis, tetapi jumlahnya lebih banyak karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian.

Sesuai dengan tafsir di atas, transaksi penjualan yang seharusnya dilakukan perusahaan tidak boleh mengandung riba. Keuntungan yang diambil juga harus bebas dari riba khususnya riba nasi'ah. Keuntungan yang diambil tentu tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan riba. Oleh karena itu, perusahaan hanya boleh menggunakan keuntungan yang halal saja untuk dipakai dalam kegiatan operasional perusahaannya. Keuntungan yang diperoleh juga harus ditempuh melalui cara-cara yang halal dan jauh dari cara haram.

2.2.9.4. Komisaris Independen dalam Islam

Pengangkatan komisaris independen di dalam perusahaan memiliki peran dalam menjadi pihak penengah atau netral ketika terjadi konflik antara pihak pemegang saham dan komisaris internal dan pengawasan organisasi dalam menjalankan perusahaan. Adanya komisaris independen juga untuk mendukung *good corporate governance* dalam perusahaan. Karena itu komisaris independen memiliki tanggung jawab besar akan tugasnya. Islam memberi pandangan atas tugas pengawasan yang dilakukan komisaris independen, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."(QS. An-Nisa: 5)

Mardani (2012) menyebutkan memang bahwa ayat ini sesungguhnya ditujukan untuk orang yang belum sempurna akalnya adalah anak yatim yang belum balig atau orang balig yang tidak mampu mengatur harta bendanya atau yang boros membelanjakan uangnya sehingga hartanya disia-siakan. Karena itulah mereka perlu wali atau pengawas sebagai penanggung jawabnya agar hartanya dipelihara dengan pandai.

Allah SWT memberikan pandangan berdasarkan tafsir di atas bahwa tugas pengawasan yang dilakukan komisaris independen sangatlah berat, karena mereka sebagai penanggung jawab atas pengelolaan harta yang dilakukan manajemen. Pihak manajemen bukannya dianggap sebagai orang yang belum sempurna akalnya, tetapi lebih ke orang yang dapat menjadi boros ketika memelihara hartanya. Karena itulah keberadaan komisaris independen sebagai penjamin pemeliharaan harta yang ada di perusahaan dengan tepat dan tidak disalahgunakan sehingga pengeluarannya menjadi boros.

2.2.9.5. Manajemen Pajak dalam Islam

Manajemen pajak dalam pembahasan ini memang mengenai tindakan perusahaan dalam meminimalkan jumlah pajak, yang jelas bukan sebagai tindakan penghindaran pajak yang melanggar aturan dalam perpajakan (ilegal). Meski begitu, meminimalkan jumlah pajak sama saja dengan tidak memiliki akhlak yang jujur. Islam

memandang para manajer maupun akuntan harus memiliki akhlaq jujur, menepati amanah, dan jujur dalam melaporkan hasil dalam laporan keuangannya, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."(QS. Al-Baqarah: 188)

Al-Quthubi (2007) dalam *Tafsir Al-Qurthubi* menyatakan bahwa makna yang terdapat dalam ayat tersebut adalah larangan penggunaan harta untuk para penguasa dan menyogok mereka dengan tujuan agar penguasa memberi keputusan sehingga dapat membuat harta bertambah banyak. Berdasarkan tafsir tersebut, kegiatan untuk memperoleh harta atau keuntungan dengan cara yang curang atau tidak benar. Islam juga tidak memperbolehkan kepada siapa saja, khususnya para pelaku bisnis untuk berbuat curang yang mana perbuatan tersebut akan merugikan orang lain, apalagi dalam hal pajak yang merupakan kewajiban bagi umat muslim yang sudah sejak dulu ada bersisihan dengan zakat.

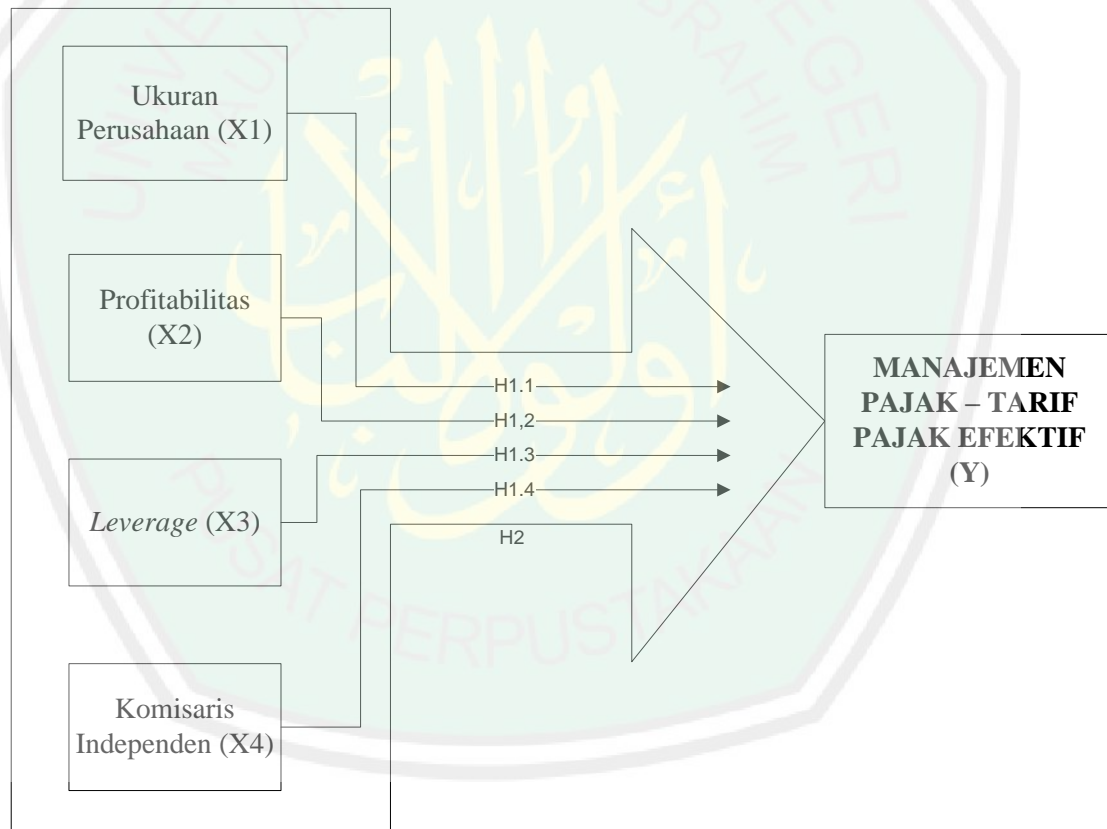
Pajak sebagaimana sebagai pendapatan suatu negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Oleh sebab itu, pajak merupakan kewajiban setiap rakyat untuk membayarnya, sehingga ketika suatu perusahaan diharuskan membayar pajak sebagai salah satu wajib pajak, maka perusahaan harus memenuhinya dengan jujur dan benar,

serta tidak boleh ada kecurangan seperti menyogok pemerintah. Perusahaan harus jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.3 Kerangka Konseptual

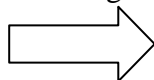
Skema kerangka konseptual dalam penelitian mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual

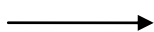


Sumber : Data diolah oleh peneliti

Keterangan:



= Diduga berpengaruh secara simultan



= Diduga berpengaruh secara parsial

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah suatu penelitian, yang mana masalah tersebut diumuskan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2014).

Hipotesis yang disusun peneliti atas rumusan dalam penelitian ini meliputi:

2.4.1 Pengaruh Secara Parsial Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak

2.4.1.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Ukuran atau skala suatu perusahaan dapat dilihat dari banyak sedikitnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ketika suatu perusahaan memiliki aset dalam jumlah banyak, tentu produktivitas perusahaan juga meningkat yang juga akan meningkatkan laba perusahaan yang akan menjadi dasar pengenaan pembayaran pajak. Menurut Rodriguez dan Arias dalam Amelia (2015), perusahaan berskala besar cenderung mempunyai ruang yang lebih leluasa dalam perencanaan pajaknya dengan pengadopsian praktek akuntansi yang efektif dengan tujuan penurunan tarif pajak yang dibayarkan perusahaan.

Ardyansyah dan Zulaikha (2014) menyimpulkan bahwa keuntungan besar yang didapat oleh perusahaan mengindikasikan semakin besar pula pajak yang harus dibayar perusahaan. Oleh karena itu, manajer akan berupaya menurunkan tarif pajak yang dibayar perusahaan dengan menampilkan laba yang tetap besar, dimana dengan mengalihkannya ke dalam pajak ditahan. Zeng (2018) serta Sinaga dan Sukartha (2018) berpendapat sebaliknya, yakni ukuran perusahaan berhubungan negatif dengan manajemen pajak. Hal ini mendukung argumen bahwa perusahaan besar dibebankan

lebih banyak biaya politik dan reputasi jika terlibat dengan manajemen pajak. Adnantara dan Dewi (2016) dan Imelia (2015) tidak sejalan dengan argumen tersebut dengan membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak memberi pengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut berdasarkan perbedaan hasil beberapa penelitian sebelumnya:

H1.1: Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak

2.4.1.2. Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak

Leverage merupakan sumber pembiayaan dari pihak luar yang menjadi kewajiban keuangan perusahaan. *Leverage* memiliki arti jumlah kewajiban perusahaan yang timbul dari transaksi masa lampau dan harus dipenuhi dengan pembayaran kas, barang, atau jasa di masa depan. Menurut Tierya dalam Amelia (2015), *leverage* juga berbanding terbalik dengan laba sehingga ketika semakin tinggi kewajiban perusahaan maka laba akan semakin rendah karena adanya penambahan beban bunga kewajiban yang dibayar. Dengan adanya beban bunga tersebut, banyak perusahaan memilih pendanaan dari utang untuk menekan biaya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Beban bunga utang yang muncul itu akan menjadi pengurang pajak sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang lebih tinggi.

Liu dan Cao dalam Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa perusahaan yang mempunyai lebih banyak utang maka akan memiliki nilai tarif pajak efektif yang lebih rendah. Hal tersebut terjadi karena biaya bunga dari utang dipakai mengurangi penghasilan perusahaan sebelum pajak. Zeng (2018) juga menemukan hasil bahwa *leverage* berhubungan secara positif untuk kegiatan manajemen pajak,

yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan leverage lebih tinggi akan menghindari lebih banyak pajak. Sinaga dan Sukartha (2018) serta Imelia (2015) membuktikan dalam penelitiannya bahwa tingkat utang (*leverage*) benar-benar berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan Adnantara dan Dewi serta Ardyansah dan Zulaikha menemukan hasil yang bertolak belakang, yaitu tidak ada pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka hipotesis keduanya yaitu:

H1.2: Diduga *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak

2.4.1.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam suatu tahun pajak. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak yang telah disebutkan dalam undang-undang, maka penghasilan dari suatu perusahaan juga merupakan suatu objek pajak. Penghasilan suatu perusahaan ditunjukkan melalui tingkat laba atau profitabilitasnya, karena itu perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi tentu akan melakukan penyeteroran jumlah pajak yang lebih dibanding dengan perusahaan yang mendapat laba yang lebih sedikit.

Kenaikan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dapat terjadi akibat kenaikan sumber pendanaan atau kapasitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Natalia, 2012). Ketika kemampuan menghasilkan laba perusahaan itu tinggi maka perusahaan perlu menyiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar penghasilan yang didapat. Lisaumi (2017) juga menyebutkan bahwa perusahaan yang

mempunyai nilai ROE yang tinggi maka tingkat profitabilitasnya tinggi pula sehingga perusahaan itu akan dikenai pajak yang tinggi pula. Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian Zeng (2018) yang memiliki hasil bahwa antara kemampuan menghasilkan laba perusahaan dengan *effective tax rate* (ETR) memiliki hubungan yang positif. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Adnantara dan Dewi (2016) mendapatkan hasil negatif mengenai pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif. Sementara itu, Ardyansah dan Zulaikha menemukan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1.3: Diduga profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak

2.4.1.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak memiliki kaitandengan anggota Direksi, pemegang saham utama, atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Keberadaan komisaris independen berdasarkan undang-undang tersebut dalam perusahaan begitu penting. Menurut Meilinda dan Nur (2013), keberadaan komisaris independen di perusahaan untuk menyediakan pihak netral atas kebijakan yang disusun direksi sehingga dapat mendesak perusahaan dalam menunjukkan informasi yang luas bagi pemegang sahamnya. Pihak netral yang dimaksud di sini karena komisaris independen berasal dari luar dan tidak memiliki hubungan internal secara langsung atau tidak langsung terhadap perusahaan.

Pengarahan dan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen tersebut supaya tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi antara manajemen perusahaan (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Peran komisaris independen adalah penengah dan pihak netral antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam penyusunan kebijakan yang tidak melanggar hukum. Salah satu contoh kebijakan tersebut adalah penentuan strategi yang terkait dengan pajak. Ketika semakin tinggi jumlah komisaris independen ada di perusahaan maka diharapkan tarif pajak efektif perusahaan juga semakin rendah. Penelitian dari Ardyansah dan Zulaikha (2014) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan arah positif, sebaliknya Amelia (2015) menemukan hasil bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh atas manajemen pajak. Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut

H1.4: Diduga komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak

2.4.2 Pengaruh Secara Simultan Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan dalam kepentingan perpajakannya diharuskan melakukan penebitan laporan keuangannya secara berkala. Kinerja perusahaan secara setahun baik dalam bentuk aset yang dimiliki, utang, keuntungan yang diperoleh, baik dengan keterangan mengenai dewan komisaris yang ada tentu merupakan hal yang wajib tercantum dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan laporan yang diterbitkan sebagai dasar penentuan jumlah pajak yang harus disetorkan perusahaan tersebut.

Karena itu, keempat hal tersebut penting untuk diperhatikan kaitannya dengan kepentingan perpajakan perusahaan.

Amelia (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dari indikator total aset, *leverage*(utang) dari *debt to equity ratio*, profitabilitas dari ROA, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan komisaris independen dari perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian kuantitatif jika ditinjau dari jenis data dan hasil yang diharapkan. Penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan ilmiah yang menganggap suatu realitas dapat dikelompokkan, terukur, teramati, dan konkrit. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa hubungan atau afiliasi variabel dalam penelitian kuantitatif memiliki sifat sebab akibat yang mana data yang diolah adalah data angka. Alat untuk melakukan analisis data berbentuk kuantitatif biasanya memakai alat statistik.

Penelitian ini berdasarkan ciri karakteristiknya termasuk ke dalam kategori *explanatory research* yang menurut Sugiyono (2014) merupakan metode penelitian yang bermaksud menunjukkan adanya kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antar variabel. Ditinjau dari tingkat penjelasan, penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif, dimana peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan hubungan kausal antar variabel ukuran perusahaan (X1), *leverage* (X2), profitabilitas (X3), komisaris independen (X4), dan tarif pajak efektif (Y).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti akan memperoleh data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperoleh dengan media internet melalui situs resmi dari BEI yaitu <http://www.idx.co.id>. Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Faktor yang mempengaruhi pemilihan perusahaan industri barang konsumsi sebagai objek penelitian ini meliputi:

- 1) Perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI merupakan perusahaan yang memproduksi barang yang biasa dikonsumsi masyarakat secara langsung, sehingga produknya mudah dijumpai dan didapat.
- 2) Dibanding sektor industri dasar & kimia ataupun sektor aneka industri, kuantitas penjualan sektor industri barang konsumsi paling tinggi, serta contoh kasus manajemen pajak yang diketahui publik salah satunya dari perusahaan industri sektor barang konsumsi, yaitu PT. Indofood Sukses Makmur pada tahun 2002.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek serta subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang inginditeliti dan dipelajari oleh peneliti sehingga dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). Penelitian ini memiliki populasi berupa seluruh perusahaan sektor industri barang konsumsi yang *go public* dan terdaftar di BEI sejak tahun 2013 sampai 2017.

3.3.2 Sampel

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa sampel merupakan suatu bagian dari populasi dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ketika suatu populasi terlalu besar, maka peneliti boleh mengambil sampel dari populasi tersebut. Adapun sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan telah diaudit pada Tahun 2013-2018, serta data-data terkait dengan variabel yang diteliti tersedia secara lengkap dalam laporan keuangan yang sudah diaudit Tahun 2013-2018.
- 2) Perusahaan yang memperoleh laba dalam lima tahun berturut-turut terhitung sejak tahun 2013. Pertimbangan ini dipakai karena pajak penghasilan suatu perusahaan dikenakan atas laba perusahaan, sehingga ketika perusahaan merugi maka perusahaan tidak perlu membayar pajak penghasilan.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini memakai teknik *sampling* berupa *nonprobability sample*, yaitu *purposive sampling*, dimana sampel dipilih atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dipakai dalam pemilihan sampel pada penelitian ini antara lain:

- 1) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan telah diaudit pada Tahun 2013-2018.
- 2) Perusahaan yang memperoleh laba dalam enam tahun berturut-turut terhitung sejak tahun 2013.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perusahaan yang memenuhi kriteria adalah:

Tabel 3.1
Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan sektor industri barang konsumsi terdaftar di BEI Tahun 2018	51
Tidak ada laporan keuangan kontinyu 2013-2018	14
	37
Memperoleh laba selama lima tahun berturut-turut	12
Jumlah	25
Total sampel (6 tahun)	150

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2019

Tabel 3.2
Daftar Perusahaan Yang Memenuhi Kriteria

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk.
2	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
3	CINT	Chitose Internasional Tbk.
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
5	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.
6	GGRM	Gudang Garam Tbk.
7	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.
8	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
10	KAEF	Kimia Farma Tbk.
11	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
12	MERK	Merck Tbk.
13	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2019

Tabel 3.2
Daftar Perusahaan Yang Memenuhi Kriteria (lanjutan)

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
14	MYOR	Mayora Indah Tbk.
15	PEHA	Phapros Tbk.
16	PYFA	Pyridam Farma Tbk
17	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
18	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
19	SKBM	Sekar Bumi Tbk.
20	SKLT	Sekar Laut Tbk.
21	TCID	Mandom Indonesia Tbk.
22	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk.
23	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
24	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
25	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2019

3.5 Data dan Jenis Data

Penelitian ini data penelitian berupa data sekunder. Data sekunder yaitu data yang didapatkan oleh peneliti melalui media perantara yaitu Galeri Investasi UIN Malang dan situs resmi dari Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni www.idx.co.id. Peneliti akan mendapatkan laporan keuangan dan data komisaris independen dari situs tersebut.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memakai metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan observasi. Peneliti akan memulai dengan dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi data sekunder yang diperoleh dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Jalan Gajayana No 50 Malang dan situ resminya yakni www.idx.co.id. Kemudian peneliti akan

melakukan observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah telaah pustaka dengan mengamati literatur dan jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penelitian kali ini.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Sugiyono (2014) memberi penjelasan mengenai variabel adalah suatu hal yang seorang peneliti ingin teliti agar didapatkan informasi dari hasil penelitian tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Definisi operasional variabel menyediakan indikator yang diuji dari suatu variabel serta cara pengukuran atau pengujiannya. Operasionalisasi dan definisi variabel dibutuhkan untuk menghindari adanya pengetahuan ganda. Hal ini juga dapat dijadikan batasan atas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan lima variabel yaitu 4 (empat) variabel independen atau penyebab (X) dan 1 (satu) variabel dependen atau akibat (Y). Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah :

X1 = Ukuran Perusahaan

X2 = *Leverage*

X3 = Profitabilitas

X4 = Komisaris Independen

Y = Tarif Pajak Efektif

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Variabel Independen (X1): Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan sebagai suatu skala besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan, atau nilai asetnya (Riyanto, 2008: 313).	Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>)	$Size = \ln Total Assets$
Variabel Independen (X2): <i>Leverage</i>	<i>Leverage</i> adalah ukuran yang digunakan menganalisis laporan keuangan untuk menunjukkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor (Fahmi, 2012).	<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)	$DER = \frac{Total Debt}{Total Equity}$
Variabel Independen (X3): Profitabilitas	Profitabilitas lebih singkat lagi yakni sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan (Murhadi, 2015: 63).	<i>Return on Common Equity</i> (ROE)	$ROE = \frac{Net Income}{Equity}$
Variabel Independen (X4): Komisaris Independen	Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan secara khusus bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi memiliki urusan langsung dengan organisasi internal perusahaan. (Imelia, 2015)	Komisaris Independen (IND)	$IND = \frac{\sum Komisaris Independen}{\sum Anggota dewan komisaris}$

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2019

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel (lanjutan)

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Variabel Dependen (Y) : Manajemen Pajak	Manajemen pajak adalah seluruh upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang ada di perusahaan berjalan secara efisien dan efektif (Pohan, 2013: 5).	Tarif Pajak Efektif (ETR)	$ETR = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2019

3.8 Analisis Data

Penelitian ini akan menguji hipotesis dengan menggunakan model regresi liner berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.8.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mencari tahu gambaran umum atau deskripsi dari semua variabel yang diteliti. Pengujian ini dilakukan dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran *mean*, *median*, nilai minimal dan maksimal dan standar deviasi variabel-variabel tersebut. (Ghozali, 2013). Pengujian statistik deskriptif ini dapat memberi penjelasan atas variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Uji statistik deskriptif juga menampilkan ukuran-ukuran numerik yang sifatnya penting bagi data sampel.

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang dipakai. Selain itu, pengujian ini dilakukan juga untuk memastikan model regresi yang dipakai tidak mengandung multikolinearitas dan heteroskedastisitas, serta memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi secara normal (Ghozali, 2013).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan agar didapati apakah residual yang diuji berdistribusi secara normal atau tidak. Ghazali (2013) menyebutkan terdapat dua cara dalam mendeteksi apakah residual yang diuji berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik atau dengan uji secara statistik. Pengujian grafik dilihat dari grafik histogram yang membandingkan data obeservasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus yang diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Ketika garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya mengikuti garis diagonal, maka distribusi data residual tersebut normal. Uji secara statistik dilakukan dengan melakukan uji Kolmogorov-smirnov. Apabila nilai signifikansi dari hasil uji normalitas berada di atas 0,05 artinya terdistribusi secara normal, sedangkan jika nilainya di bawah 0,05, berarti terdistribusi secara tidak normal (Ghozali, 2013).

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi (kaitan) variabel independen. Model regresi yang tepat adalah model yang seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika korelasi tersebut ada maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Ghozali (2013) mengatakan untuk mendeteksi multikolinearitas dapat dilihat dari menganalisis matrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Hasil perhitungan nilai *tolerance* juga memperlihatkan tidak ada variabel independen yang nilainya *tolerance* kurang dari 0,10 yang bermakna tidak terdapat korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Nilai dari VIF juga memperlihatkan hal yang sama antar satu variabel independen dengan yang lain ketika nilai VIF tersebut lebih dari 10, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen satu dengan yang lain dalam model regresi tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bermaksud mencari tahu apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain di dalam suatu model. Jika varians residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas, namun

jika tetap, maka disebut homokedastisitas (Ghozali, 2013). Model regresi yang bagus adalah ketika tidak ada unsur heteroskedastisitas.

Pengujian dilakukan dengan melihat pada gambar plot antara nilai prediksi variabel independen dengan residual. Jika dalam grafik tidak ada pola tertentu yang teratur dan data digambarkan tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka teridentifikasi tidak ada heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji *park* yaitu dengan meregresikan nilai residual dengan masing-masing variabel X (independen). Ghozali (2013) menyebutkan ketika probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka akan teridentifikasi tidak ada heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk menemukan hasil apakah terdapat korelasi (kaitan) antara kesalahan pengganggu di periode t dengan kesalahan pengganggu di periode $t-1$ dalam model regresi linier. Jika berkaitan atau memiliki korelasi berarti terdapat masalah autokorelasi. Menurut Ghozali (2013: 110), model regresi yang termasuk baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam melakukan pengujian ada atau tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan dengan memakai uji *Durbin-Watson*.

Uji *Durbin-Watson* (DW) dapat dilakukan dengan ketentuan yaitu ketika nilai $DW < -2$ maka terjadi autokorelasi secara positif, ketika nilai DW berada di antara -2 dan $+2$ maka tidak terjadi autokorelasi, dan sebaliknya autokorelasi secara negatif akan terlihat ketika nilai DW di atas $+2$.

3.8.3 Uji Regresi Berganda

Analisis regresi bermanfaat dalam melakukan pengukuran kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga untuk memperlihatkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan *random* (acak), yang berarti mempunyai distribusi probabilitik. Variabel independen/bebas diasumsikan mempunyai nilai tetap ketika dalam pengambilan sampel yang berulang (Ghozali, 2013).

Analisis regresi berganda merupakan analisis yang bisa dipakai sebagai model perkiraan atau prediksi atas suatu variabel dependen dari beberapa variabel independen. Adapun model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 SIZE_{it} + \beta_2 DER_{it} + \beta_3 ROE_{it} + \beta_4 IND_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

ETR_{it} : Tarif Pajak Efektif

α : Konstanta

$\beta_{1,2,3}$: Koefisien variabel

$SIZE_{it}$: Ukuran Perusahaan (*Size*)

DER_{it} : *Leverage (Debt to Equity Ratio)*

ROE_{it} : Profitabilitas (*Return on Common Equity*)

IND_{it} : Komisaris Independen

ε_{it} : *Error*

3.8.4 Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Secara Parsial)

Uji t (t -test) menurut Ghazali (2013) termasuk dalam kategori pengujian statistik yang dipakai untuk menemukan seberapa jauh pengaruh variabel independen saat menjelaskan variabel dependen secara individual. Hubungan antar variabel dinilai berdasarkan tingkat signifikansi, apabila ditemukan hasil tingkat signifikansi $< 0,05$, berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Namun apabila tingkat signifikansi yang ditemukan $> 0,05$, dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel X terhadap variabel Y. Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = nilai uji

r^2 = koefisiensi determinasi

r = koefisiensi korelasi

n = jumlah keseluruhan sampel yang diuji

Kriteria dalam hal pengambilan keputusan atas hasil t -test adalah yaitu apabila t hitung $\leq t$ tabel, maka H_0 diterima yang artinya variabel x tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y . Sebaliknya

apabila t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y .

b. Uji F (Uji Secara Simultan)

Ghazali (2013) menyebutkan bahwa uji f adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara keseluruhan atau memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

F = F hitung (akan dibandingkan dengan F tabel)

k = banyaknya observasi

R^2 = Koefisien determinasi

N = banyaknya parameter estimasi

Syarat pengujian yang dipakai dalam uji F adalah bila nilai F lebih tinggi dari 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Ketika H_0 ditolak, maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyebutkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Melakukan perbandingan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih tinggi dibanding nilai F menurut tabel, maka H_0 ditolak dan secara otomatis menerima H_a (Ghozali, 2013).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) secara umum melakukan pengukuran seberapa jauh kemampuan model dalam memberi penjelasan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berupa angka antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2013).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan industri sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan populasi dalam penelitian ini. Perusahaan industri sektor barang konsumsi atau bisa disebut dengan perusahaan *consumer goods* yang secara sederhana diartikan sebagai perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang yang dibutuhkan secara rutin dan terus menerus oleh masyarakat. Barang-barang konsumsi tersebut meliputi bidang makanan dan minuman, rokok, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, farmasi dan peralatan rumah tangga. Salah satu kelebihan bidang ini adalah produk dari perusahaan masih dibutuhkan oleh masyarakat meskipun ketika terjadi krisis. Selain itu, sektor ini juga terklasifikasi sektor yang stabil dilihat dari permintaan akan produk yang stabil dan selalu bertumbuh seiring meningkatnya jumlah penduduk. Dengan kata lain, semua orang tentu membutuhkan makanan dan minuman serta obat-obatan baik ketika terjadi krisis atau tidak. Terdapat sejumlah lima puluh satu perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan industri sektor barang konsumsi dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018.

Objek yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan dan pengolahan data yang bersumber dari *annual report* (laporan tahunan) perusahaan industri sektor barang konsumsi selama lima tahun yakni tahun 2013-2018. Laporan

tahunan perusahaan yang dipakai sebagai objek penelitian ini ditimbang berdasarkan beberapa syarat sesuai dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Adapun beberapa syarat tersebut antara lain:

- 1) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan telah diaudit pada Tahun 2013-2018, serta data-data terkait dengan variabel yang diteliti tersedia secara lengkap dalam laporan keuangan yang sudah diaudit Tahun 2013-2018.
- 2) Perusahaan yang memperoleh laba dalam lima tahun berturut-turut terhitung sejak tahun 2013.

Adapun perusahaan industri sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI yang dipakai sebagai sampel penelitian sejumlah 25 perusahaan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1
Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk.
2	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
3	CINT	Chitose Internasional Tbk.
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
5	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.
6	GGRM	Gudang Garam Tbk.
7	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.
8	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
10	KAEF	Kimia Farma Tbk.
11	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
12	MERK	Merck Tbk.
13	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
14	MYOR	Mayora Indah Tbk.
15	PEHA	Pharos Tbk.

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2019

Tabel 4.1
Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian (lanjutan)

16	PYFA	Pyridam Farma Tbk
17	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
18	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
19	SKBM	Sekar Bumi Tbk.
20	SKLT	Sekar Laut Tbk.
21	TCID	Mandom Indonesia Tbk.
22	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk.
23	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
24	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
25	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2019

Berikut adalah profil singkat perusahaan industri sektor barang konsumsi yang dipakai sebagai sampel penelitian ini:

Akasha Wira International Tbk pertama kali didirikan pada tahun 1985 dengan nama PT. Alfindo Putrasetia kemudian diubah beberapa kali dan menggunakan nama terakhir ini sejak tahun 2010. Penawaran umum saham perdana dilakukan pada tanggal 6 Juni 1997. Water Partners Bottling S.A. (WPB) yang merupakan perusahaan kerjasama antara Nestle S.A. dan Refreshment Product Services (anak perusahaan The Coca Cola Company) mengambil alih mayoritas saham di perseroan pada tahun 2004, sehingga perseroan mulai mengeluarkan air kemasan AdeS dengan kemasan baru dan produk baru yaitu Nestle Pure Life. Namun, sejak 3 Juni 2008, Sofos Pte. Ltd mengakuisisi perusahaan melalui pembelian saham seluruhnya atas WPB dan otomatis menjadi pemegang saham pengendali perusahaan.

Wilmar Cahaya Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1988 di Pontianak dengan nama CV Tjahaja Kalbar. Perusahaan bergerak di bidang industri minyak

nabati yakni minyak kelapa sawit serta produk turunannya, biji tengkawang dan minyak nabati spesialitas. Selain itu, perusahaan juga bergerak di bidang perdagangan lokal, impor, ekspor, dan berdagang hasil hutan serta hasil bumi. Perusahaan ini resmi menjadi perusahaan publik di BEI pada tanggal 9 Juli 1996. Kantor pusat perusahaan sekarang ini sudah berpindah ke Cikarang, Bekasi.

Chitose International Tbk. didirikan tahun 1979 dengan bergerak di bidang furnitur dengan fokus usaha memproduksi berbagai macam kursi termasuk dengan kursi perkantoran, perhotelan, bandara, sekolah, maupun rumah pribadi. Pada tahun 1980, perusahaan ini bekerja sama dengan Chitose Mfg. Col. Ltd., sebuah perusahaan asal Jepang yang memakai kualitas *Japan Industrial Standar*, sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk yang mendapat pengakuan baik dari Standar Nasional Indonesia (SNI) dan juga dari Jepang. Perusahaan mengalami perubahan kepemilikan pada tahun 2000 yakni diakuisisi oleh PT Tritirta Mandiri. Perseroan juga resmi mencatatkan sahamnya pada penawaran umum perdana (IPO) pada tanggal 27 Juni 2014.

Delta Djakarta Tbk pertama kali didirikan pada tahun 1932 di Indonesia sebagai sebuah pabrik pembuatan bir Jerman dengan nama NV Archipel Brouwerij, yang kemudian dibeli oleh firma Belanda yang mengganti namanya menjadi NV De Oranje Brouwerij dan akhirnya menjadi nama perseroan sekarang ini pada tahun 1970. Perseroan ini juga menjadi salah satu perusahaan Indonesia pertama yang mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 1984. Bidang usaha perseroan ini adalah produksi bir Pilsner dan Stout berkualitas untuk pasar domestik maupun ekspor.

Daya Varia Laboratoria Tbk didirikan pada tahun 1976 dan melakukan penawaran saham perdananya pada November 1994. Perseroan mengakuisisi PT Pradja Pharin (Prafa) pada tahun 1995 dan mulai mengembangkan berbagai varian produk Obat Resep dan *Consumer Health*. Pada tahun 2014, Prafa dan perseroan melakukan merger untuk mempermudah proses administrasi dan bisnis, dan perseroan ini yang menjadi entitas induk dengan kantor pusat di Jakarta Selatan. Di masa ini, saham perseroan dimiliki oleh Blue Sphere Singapore Pte. Ltd (BSSPL), afiliasi dari Unilab sebanyak 92,13%.

Gudang Garam Tbk didirikan pertama kali di Kediri pada tahun 1958. Perseroan merupakan produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia dengan memproduksi berbagai macam rokok kretek termasuk produk tradisional sigaret kretek tangan serta jenis rendah tar nikotin (LTN). Perusahaan mencatatkan sahamnya di BEI secara resmi pada tahun 1990. Perseroan juga mengoperasikan fasilitas percetakan kemasan rokok dengan lima anak perusahaan meliputi PT Surya Pamenang, PT Surya Madistrindo, PT Surya Air dan Galaxy Prime Ltd, dan PT Graha Surya Media.

H.M. Sampoerna Tbk didirikan oleh Liem Seong Tee pada tahun 1913 dengan memulai usahanya dengan memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan secara resmi didirikan sebagai perusahaan pada 1930. Perseroan resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dan resmi mendirikan pabrik Sigaret Kretek Mesin (SKM) di Karawang pada tahun 2008. Kantor pusat perseroan terletak di Jakarta dan kantor perwakilan di Jakarta. Pabrik produksi perseroan berjumlah 7 dan terbagi menjadi 2 pabrik produksi SKM dan 5 pabrik produksi SKT.

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk berdiri sebagai entitas terpisah dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sejak 2009. Secara resmi, perseroan mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 2010. Bidang usaha perseroan adalah produksi makanan dan minuman meliputi mie instan, produk susu, makanan ringan, bumbu makanan, nutrisi dan makanan spesial, dan minuman kemasan. Sejak tahun 2008 hingga 2014, perseroan secara resmi mengakuisisi pemegang saham mayoritas PT Indolakto, merek Club, dan merek Milkuat.

Indofood Sukses Makmur Tbk pertama kali didirikan di tahun 1990 dengan nama PT. Panganjaya Intikusuma dan mengganti menjadi namanya sekarang serta mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 1994. Kegiatan usaha perseroan bergerak di bidang industri, agribisnis, perdagangan, dan jasa. Kegiatan usaha dirincikan meliputi industri penggilingan gandum menjadi tepung terigu (Grup Bogasari) yang terintegrasi dengan kegiatan anak perusahaan yang bergerak di industri konsumen bermerek (Indofood CBP), industri agribisnis yang termasuk perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dan tanaman lain, serta distribusinya.

Kimia Farma Tbk berdiri pertama kali di tahun 1971, tepatnya tanggal 16 Agustus. Kegiatan usaha perseroan bergerak di bidang industri kimia dan farmasi, distribusi dan perdagangan, pemasaran, ritel farmasi, serta laboratorium klinik dan klinik kesehatan. Perseroan menawarkan saham umumnya perdana pada tanggal 4 Juli 2001 di BEI. Perseroan memiliki beberapa entitas anak meliputi PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Kimia Farma Apotek, PT Sinkona Indonesia Lestari, dan PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia.

Kalbe Farma Tbk berdiri pada tanggal 10 September 1966 dengan bergerak di bidang usaha farmasi, perdagangan, dan perwakilan. Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI sejak tanggal 30 Juli 1991. Divisi usahanya terbagi menjadi empat kelompok yakni divisi obat resep, divisi nutrisi, divisi produk kesehatan, serta divisi distribusi dan logistik. Saham perseroan yang dimiliki oleh publik sebesar 43,23 %.

Merck Tbk didirikan pada 14 Oktober 1970 dan termasuk ke dalam salah satu perusahaan pertama yang mendaftarkan sahamnya di BEI tahun 1981. Perseroan ini memiliki perusahaan induk, Merck KGaA dengan kantor pusat di Darmstadt, Jerman. Perseroan ini bergerak di bidang industri farmasi, perdagangan, dan impor. Sejak Januari 2015, Merck Group terdiri atas tiga sektor usaha, yaitu *Healthcare (Biopharma, Consumer Health, Allergopharma, Biosimilars)*, *Performance Materials*, dan *Life Science*.

Multi Bintang Indonesia Tbk awalnya didirikan pada tahun 1929 di Medan yang kemudian dipindahkan ke Jakarta hingga sekarang dan mulai beroperasi secara komersial pada 21 November 1931. Perusahaan terdaftar di BEI tanggal 12 Januari 2001. Aktivitas usaha bergerak di bidang produksi minuman beralkohol dan minuman non-alkohol. Perseroan mendirikan entitas anak pada tahun 2014 bernama PT Multi Bintang Indonesia Niaga yang menangani operasi penjualan dan pemasaran. Selanjutnya pada 2017, perseroan kembali mendirikan entitas anak, PT Tirta Prima Indonesia dengan fokus bisnis minuman non alkohol.

Mayora Indah Tbk berdiri pada tahun 1977 di Tangerang. Perusahaan melakukan penawaran umum perdana sahamnya pada tahun 1990. Aktivitas usaha yang dijalankan perseroan adalah bidang industri makanan dan minuman. Produk

yang diproduksi terbagi menjadi 6 divisi meliputi biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan kesehatan. Perseroan memiliki entitas anak yang meliputi PT Sinar Pangan Barat, PT Sinar Pangan Timur, PT Torabika Eka Semesta, PT Kakao Mas Gemilang, dan Mayora Nederland BV.

Phapros Tbk didirikan pada tanggal 21 Juni 1954 di Semarang dengan nama NV Pharmaceutical Processing Industries. Perusahaan ini bergerak di bidang industri produksi dan perdagangan obat-obatan, alat-alat kesehatan, barang-barang kimia, dan barang-barang sejenis. Perseroan sudah memproduksi lebih dari 300 item obat, 172 di antaranya merupakan obat hasil pengembangan sendiri. Sementara itu pada tahun 2018, perseroan sudah meluncurkan 5 produk baru yakni 3 di antaranya obat generik, sedangkan sisanya adalah merek produk dan alat kesehatan.

Pyridam Farma Tbk didirikan pada 27 November 1976 dengan nama PT Pyridam yang awalnya memproduksi dan memasarkan produk veteriner yang kemudian pada tahun 1985 mulai memproduksi produk farmasi. Fasilitas produksi farmasi perseroan meliputi bangunan pabrik dan peralatan dibangun pada tahun 1995 di Cianjur Jawa Barat. Selain itu, perusahaan sejak 2001 menjadi perusahaan publik dan mencatatkan sahamnya.

Nippon Indosari Corpindo Tbk berdiri pada tahun 1995 dengan nama PT Nippon Indosari Corporation sebagai perusahaan penanaman modal asing. Perseroan melakukan penggantian nama yang dipakainya sekarang pada tahun 2003. Kegiatan usaha perseroan adalah memproduksi roti “Sari Roti” dengan pabrik pertama di Cikarang, kedua di Pasuruan, ketiga di Cikarang, keempat di Semarang dan kelima di

Medan. Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana pada tanggal 28 Juni 2010 di BEI

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk awalnya hanya berupa sebuah industri rumah tangga di Yogyakarta tahun 1940. Secara resmi, perusahaan sederhana mulai berdiri pada tahun 1951 dengan nama Sido Muncul di Semarang. Perseroan bergerak dalam bidang industri jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. Penawaran umum perdana saham perseroan dilakukan di tahun 2013.

Sekar Bumi Tbk berdiri pertama kali pada April 1973 dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1993 sebagai salah satu pelopor bidang pengolahan udang beku di Indonesia. Perseroan bergerak di bidang manufaktur produk makanan beku, yaitu hasil laut beku bernilai tambah dan makanan olahan beku. Contoh produk makanan olahan beku meliputi dim sum, bakso ikan dan sapi, udang tempura dan sosis. Selain itu, perseroan juga memproduksi pakan udang dan ikan, kacang mete dan sosis ikan siap makan di bawah merek FINNA, SKB, Bumifood, dan Mitraku.

Sekar Laut Tbk merupakan perseroan yang bergerak di bidang industri krupuk, saos, dan bumbu masak yang secara resmi berdiri pada tahun 1966. Produk-produk saus tomat, sambal, bumbu masak, dan makanan ringan dipasarkan dengan merek "FINNA". Saham perseroan didaftarkan untuk perdagangan di BEI sejak 8 September 1993. Anak perusahaannya meliputi PT Pangan Lestari, PT Pangan Citarasa Nusantara, dan PT Abadi Java Food.

Mandom Indonesia Tbk berdiri dengan nama PT Tancho Indonesia Co., Ltd sebagai *joint venture* antara Mandom Corporation dan NV The City Factory di tahun

1969 yang kemudian berubah nama pada tahun 2000. Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI sejak 30 September 1993. Perseroan bergerak di bidang industri dan perdagangan produk kosmetika, wangi-wangian, *toiletries*, bahan pembersih, kemasan plastik dan barang plastik lain dengan produk ternama merek “Pixy”.

Tempo Scan Pacific Tbk dan entitas anak adal bagian dari kelompok usaha swasta nasional dari Grup Tempo yang berdiri tahun 1953 dengan nama PT Scanchemie. Kegiatan produksi dan perdagangan perusahaan ada di bidang farmasi. Sejak tahun 1977, melalui entitas anaknya, perseroan mulai memproduksi kosmetik dan produk konsumen lainnya. Perseroan menjadi perusahaan publik di BEI pada tahun 1994. Perseroan mempunyai empat divisi usaha yakni, farmasi, produk konsumen dan kosmetik, distribusi, serta penunjang.

Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk didirikan sejak tahun 1960an di bidang industri makanan dan minuman. Secara resmi, perusahaan memproduksi produk di bawah merk dagang “Ultra Milk”, “Morinaga” dan “Teh Kotak”. Pada Tahun 1981, perseroan mulai memproduksi produk keju dengan merk dagang “Kraft” dengan perjanjian lisensi Kraft General Food Ltd, USA. Perusahaan terdaftar di BEI sejak 2 Juli 1990.

Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dengan kegiatan usaha produksi, pemasaran, maupun distribusi barang-barang konsumsi, mencakup sabun, deterjen, es krim, margarin, kecapm bumbu-bumbu masak, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh, serta minuman sari buah yang didirikan tanggal 5 Desember 1933. Saham perseroan dipasarkan pertama kali pada publik pada tahun 1981 dan terdaftar di BEI sejak Januari 1982. Perseroan memiliki 9

pabrik yang berkedudukan di kawasan industri jababeka, Cikarang dan Rungkut, Surabaya.

Wismilak Inti Makmur Tbk memulai usahanya pada tahun 1962 dengan nama PT Gelora Djaja dengan kegiatan usaha memproduksi rokok kretek premium merk dagang Galan, Wismilak, dan Diplomat. Pada tahun 1983, perseroan mendirikan PT Gawih Jaya sebagai perusahaan distributor. Perseroan mengembangkan produk Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan produk rokok filter dengan beragam jenis. Secara resmi, perusahaan merupakan induk dari PT Gelora Djaja dan PT Gawih Jaya pada tahun 1994. Pemasaran saham perdana perseroan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2012 di BEI.

Berdasarkan pemaparan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah laporan tahunan yang digunakan dalam penelitian sejumlah 150 laporan yang berasal dari perusahaan industri sektor barang konsumsi yang sudah memenuhi syarat selama enam tahun yaitu sejak tahun 2013-2018. Penelitian ini akan menguji pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen terhadap manajemen pajak pada 25 perusahaan industri sektor barang konsumsi selama tahun 2013-2018.

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif umumnya dilakukan untuk memberi gambaran suatu data yang bisa ditinjau melalui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, atau standar deviasi dari sampel yang digunakan dalam penelitian. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk mendeskripsikan dan menarik kesimpulan dari data yang dipakai. Berikut

adalah data hasil statistik deskriptif variabel ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, komisaris independen, dan tarif pajak efektif.

Tabel 4.2
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE	150	25,796	32,201	28,77509	1,642309
DER	150	,071	3,029	,73349	,568782
ROE	150	,015	2,271	,26332	,346046
IND	150	,000	,800	,40893	,119936
ETR	150	,060	,386	,25409	,042508
Valid N (listwise)	150				

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, 2019

Tabel di atas merupakan gambaran hasil uji statistik deskriptif yang telah dilakukan dari masing-masing variabel penelitian. Adapun deskripsi dari hasil pengujian adalah sebagai berikut.

1. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat variabel. Penjelasan dari hasil uji analisis deskriptif masing-masing variabel, antara lain:

a. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Data ukuran perusahaan dalam penelitian ini diperoleh dari jumlah aset yang tertera dalam laporan keuangan tahunan 150 sampel. Nilai minimum ukuran perusahaan dari 150 sampel yang dipakai dapat diketahui berjumlah 25,796 yang dimiliki oleh PT. Pyridam Farma Tbk pada tahun 2017, Nilai maksimum ukuran perusahaan juga diperoleh dari tabel di atas adalah berjumlah 32,201 yaitu data ukuran perusahaan milik PT. Indofood Sukses

Makmur Tbk pada tahun 2018. Sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasi ukuran perusahaan berdasarkan 125 sampel masing-masing sebesar 28,77509 dan 1,642309.

b. *Leverage* (DER)

Data yang dapat dideskripsikan dari tabel 4.2 mengenai *leverage* yang diperoleh melalui nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah nilai maksimum diketahui sebesar 0,071 yaitu data dari PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk tahun 2015. Nilai maksimum *leverage* juga diperoleh sebesar 3,029 yang dimiliki oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2014. Sedangkan nilai rata-rata *leverage* dari 150 data dan standar deviasi *leverage* masing-masing sebesar 0,73349 dan 0,568782.

c. Profitabilitas (ROE)

Profitabilitas dalam penelitian ini dilihat dengan indikator *Return On Equity* (ROE) yang sudah dihitung dari masing-masing 150 sampel. Berdasarkan tabel 4.2, diketahui nilai minimum dari profitabilitas adalah 0,015 yaitu data profitabilitas milik PT Sekar Bumi Tbk tahun 2018. Selain itu, diketahui pula nilai maksimum sebesar 2,271 yaitu data dari PT Merck Tbk. tahun 2018. Sedangkan nilai rata-rata profitabilitas dari 150 sampel dan standar deviasi diketahui sebesar 0,26332 dan 0,346046.

d. Komisaris Independen (IND)

Variabel komisaris independen dihitung melalui perbandingan jumlah komisaris independen dan jumlah dewan komisaris yang ada di perusahaan.

Dari 150 sampel yang dipakai, diperoleh hasil uji analisis deskriptif nilai

minimum adalah 0 yang berasal dari data PT Chitose International Tbk pada tahun 2013. Selain itu, diperoleh juga nilai maksimum dari 150 sampel adalah 0,8 yaitu data yang dimiliki PT Unilever Indonesia Tbk selama tahun 2013-2018 berturut-turut. Hasil lain juga diperoleh yaitu nilai rata-rata dan standar deviasi dari komisaris independen masing-masing sebesar 0,25409 dan 0,42508.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dari penelitian ini adalah manajemen pajak yang dihitung dengan indikator tarif pajak efektif (ETR). Berdasarkan 125 sampel yang digunakan diperoleh hasil pengujian yang ditunjukkan dalam tabel 4.2. Nilai minimum dari tarif pajak efektif adalah sebesar 0,060 yang berasal dari data PT. Akasha Wira International Tbk tahun 2018. Selanjutnya, nilai maksimum dari tarif pajak efektif sebesar 0,368 yaitu data dari PT Pyridam Farma Tbk pada tahun 2014. Selain itu, hasil uji statistik deskriptif juga memperoleh hasil nilai rata-rata dan standar deviasi dari tarif pajak efektif masing-masing sebesar 0,35409 dan 0,042508.

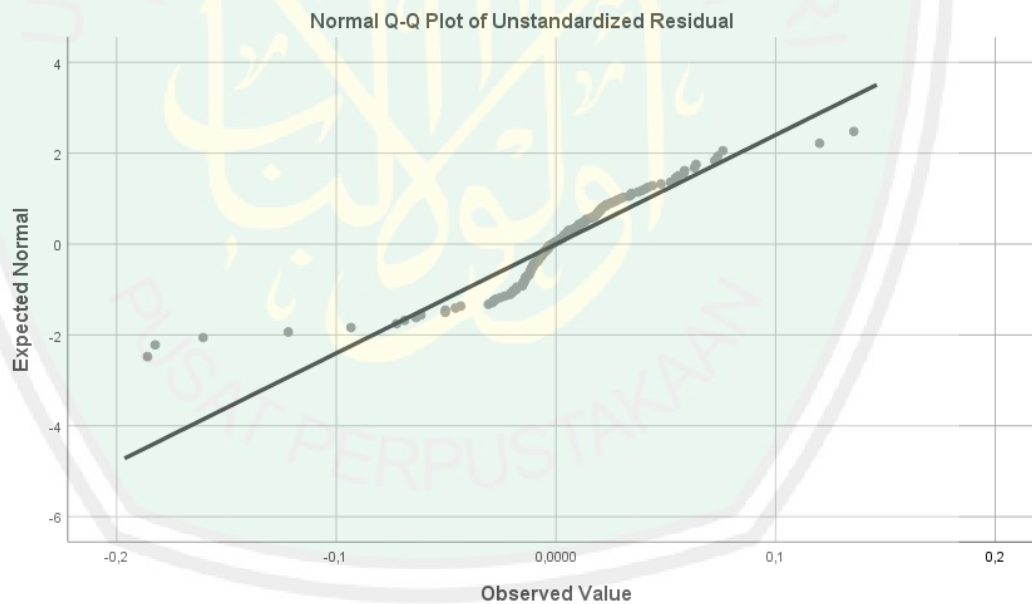
4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dibutuhkan ketika peneliti ingin mengetahui apakah data penelitian memenuhi asumsi-asumsi dasar sebuah penelitian. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas secara grafik dan secara statistik. Uji normalitas secara grafik dilihat melalui *P-Plot Test*, yakni pengujian dengan melihat penyebaran titik pada sumbu diagonal dan grafik normal. Data penelitian dikategorikan sebagai data yang memiliki distribusi normal ketika data menyebar di sekitar garis diagonal dan data mengikuti garis diagonal tersebut. Sebaliknya, data akan dinyatakan tidak normal ketika penyebaran data tidak mengikuti garis diagonal. Hasil *P-Plot Test* dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas secara Diagram (*P-Plot Test*)



Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Grafik di atas menunjukkan penyebaran titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan bergerak mengikuti arah sumbu diagonal tersebut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini dan diuji

melalui uji normalitas layak digunakan karena data berdistribusi secara normal. Pengujian secara statistik juga dilakukan guna lebih meyakinkan pengujian normalitas yang dilakukan. Pengujian secara statistik dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun hasil dari pengujian secara statistik dengan melihat hasil *Kolmogorov-Smirnov Test* adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas secara Statistik (Uji Kolmogorov-Smirnov)

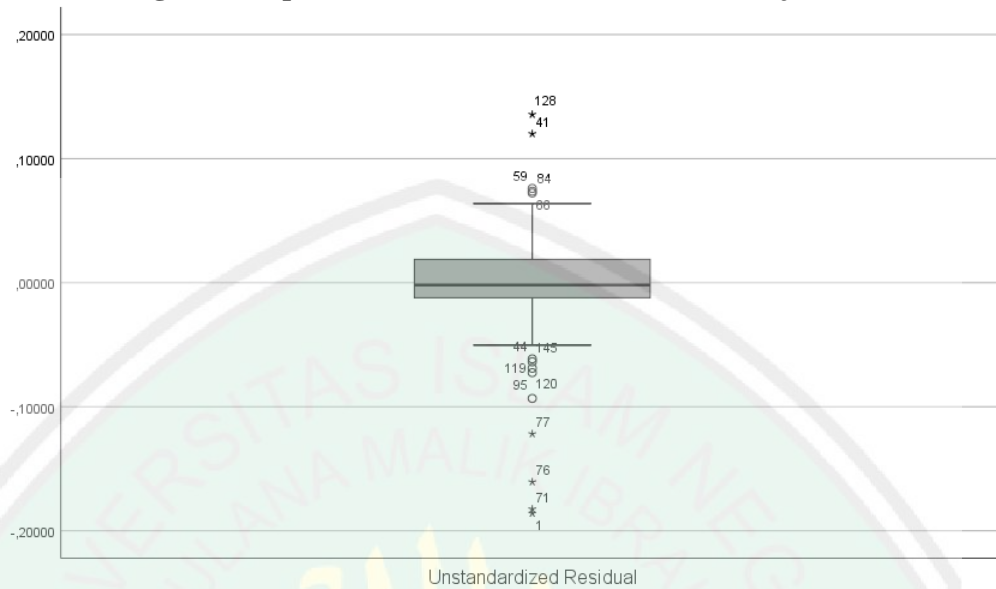
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,183	150	,000	,852	150	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Tabel di atas menunjukkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* memperoleh Asymp Sig sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal, karena nilai Asymp Sig. (p-value) lebih kecil dari 0,05. Karena hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas, maka diperlukan perbaikan data. Langkah perbaikan data yang dilakukan adalah mendeteksi adanya *outlier*. *Outlier* adalah data observasi yang timbul dengan nilai-nilai yang jauh atau beda sama sekali dengan sebagian besar nilai lain dalam kelompok data pengujian. Pendeteksian *outlier* dilakukan dengan melihat diagram *boxplot* berikut ini.

Gambar 4.2
Diagram *Boxplot* Nilai *Unstandardized Residual* Uji Normalitas



Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Diagram *boxplot* di atas menunjukkan rentang data seharusnya yang dapat memenuhi uji normalitas berada dalam dua garis yang terhubung tersebut atau berada dalam kotak berwarna biru. Titik-titik yang berada di luar garis dengan nomor-nomor tertentu di atas adalah menunjukkan data-data *outlier* yang membuat penelitian terklasifikasi berdistribusi tidak normal. Setelah dilakukan penghilangan data yang tertulis di atas, berikut adalah hasil uji normalitas data.

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas secara Statistik Setelah Menghilangkan *Outlier* (1)
(Uji Kolmogorov-Smirnov)

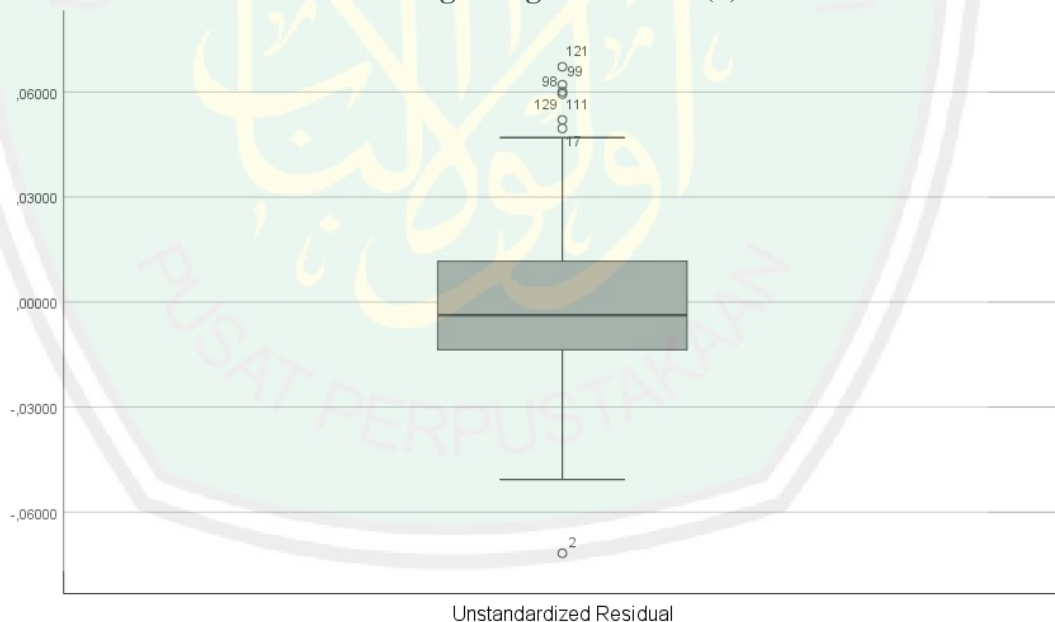
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,115	136	,000	,955	136	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* setelah mengeluarkan *outlier* memiliki nilai signifikansi masih berada di bawah 0,05. Karena itu dengan melihat diagram *boxplot* lagi, maka perlu dihilangkan data *outlier* yang masih menjadikan data berdistribusi tidak normal.

Gambar 4.3
Diagram *Boxplot* Nilai *Unstandardized Residual* Uji Normalitas setelah Menghilangkan *Outlier* (1)



Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

. Titik-titik yang berada di luar garis yang terhubung dengan kotak berwarna biru dengan nomor-nomor tertentu di atas masih menunjukkan data-data *outlier* yang membuat penelitian terklasifikasi berdistribusi tidak normal. Selanjutnya

dilakukan penghilangan data *outlier* kedua yang tertulis di atas, berikut adalah hasil uji normalitas data.

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas secara Statistik Setelah Menghilangkan *Outlier* (2)
(Uji Kolmogorov-Smirnov)

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,066	129	,200 [*]	,985	129	,187

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Tabel di atas menunjukkan nilai Sig. *Kolmogorov-Smirnov* berada di atas 0,05.

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai residual sudah terdistribusi secara normal.

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa H_0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal dan model regresi layak dipakai dalam penelitian ini.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dalam menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen (bebas) dalam model regresi. Multikolinearitas diuji dengan memakai nilai *variance inflation factor* (VIF) atau nilai *tolerance*. Variabel independen dinyatakan tidak memiliki masalah multikolinearitas ketika nilai *tolerance* berada di atas 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Adapun variabel independen yang dilakukan pengujian multikolinearitas meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian dapat dilihat dalam tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	,302	,030		10,234	,000		
SIZE	-,002	,001	-,134	-1,488	,139	,886	1,129
DER	,011	,003	,363	3,425	,001	,637	1,569
ROE	-,009	,006	-,178	-1,478	,142	,495	2,020
IND	-,014	,017	-,093	-,852	,396	,598	1,673

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

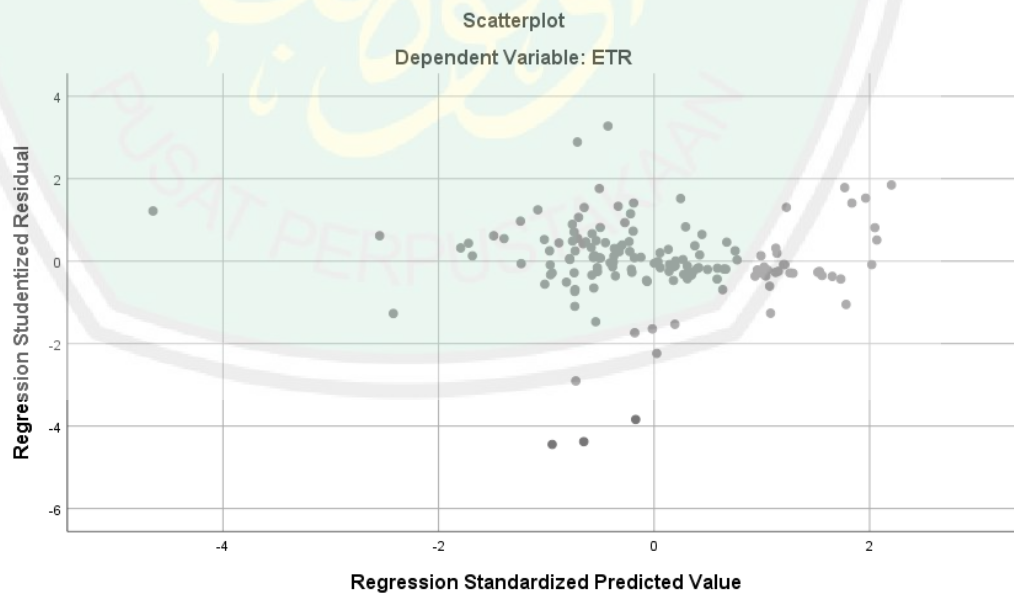
Hasil uji multikolinearitas berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil bahwa variabel ukuran perusahaan (*Size*) mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,886 dan VIF sebesar 1,129, sedangkan variabel *leverage* (DER) menunjukkan nilai *tolerance* dan VIF masing-masing sebesar 0,637 dan 1,569. Sementara itu, variabel profitabilitas (ROE) memiliki nilai *tolerance* dan VIF masing-masing berjumlah 0,495 dan 2,020, serta variabel komisaris independen memperlihatkan nilai *tolerance* 0,598 dan VIF sebesar 1,673.

Uji multikolinearitas di atas menunjukkan hasil perhitungan nilai *tolerance* keempat variabel yang diuji lebih dari 0,10 yang menunjukkan tidak adanya korelasi (kaitan) antar variabel independen yang nilainya 95% atau lebih. Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa tidak ada satupun dari variabel independen yang nilai VIF-nya kurang dari 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesimpulan dari uji multikolinearitas yang dilakukan adalah model persamaan regresi dalam penelitian ini sudah memenuhi asumsi multikolinearitas dan model regresi tersebut dapat digunakan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan mencari tahu apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain ke dalam suatu model. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual suatu pengamatan dengan pengamatan lain, sedangkan homoskedastisitas terjadi ketika varians residual suatu pengamatan memiliki nilai yang sama (konstan). Suatu penelitian diharapkan memiliki model regresinya memiliki homoskedastisitas. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian heteroskedastisitas dengan melihat diagram *scatterplot* dan uji *park*. Penelitian yang memenuhi asumsi homoskedastisitas (non-heteroskestisitas) ketika diagram *scatterplot* tergambar tanpa pola teratur dan data tersebar secara acak, serta nilai signifikan hasil uji *park* berada di atas tingkat kepercayaan 5%.

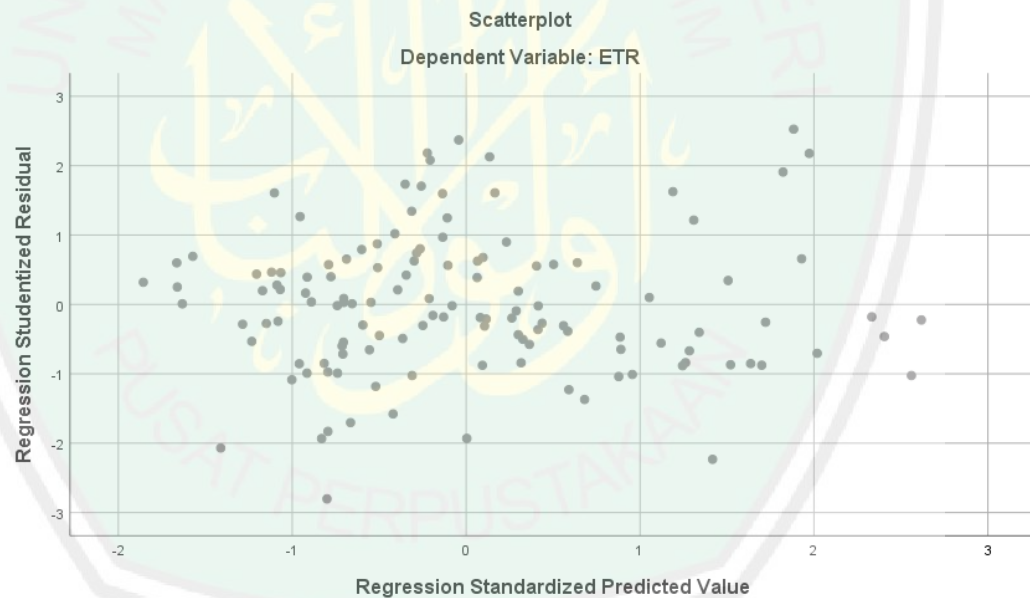
Gambar 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas Memakai Diagram *Scatterplot*



Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Gambar 4.4 menunjukkan grafik *scatterplot* yang memperlihatkan bahwa titik-titik tergambar dalam pola tertentu namun mengumpul dalam beberapa titik. Hal ini membuktikan bahwa asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi atau menunjukkan model regresi ini belum layak dipakai untuk memprediksi tarif pajak efektif berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya, yang meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen. Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas ini perlu dihilangkan beberapa data *outlier* seperti yang sudah dilakukan dalam uji normalitas sebelumnya.

Gambar 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas Memakai Diagram *Scatterplot* setelah Menghilangkan *Outlier*



Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Gambar 4.5 menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding dengan diagram *scatterplot* sebelumnya. Dalam diagram *scatterplot* setelah menghilangkan *outlier* terlihat bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Akibatnya, model regresi ini disimpulkan memenuhi asumsi homoskedastisitas

(non-heteroskestisitas). Selain itu, peneliti juga melakukan uji *park* untuk menguji asumsi non-heteroskedastisitas model regresi. Uji *park* dilakukan dengan meregresikan nilai residual masing-masing variabel independen. Berikut ini adalah hasil uji *park* yang dilakukan.

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	11,528	12,120		,951	,343
	LN_SIZE	-5,973	3,532	-,145	-1,691	,093
	LN_DER	-,033	,236	-,012	-,142	,888
	LN_ROE	-,612	,252	-,226	-2,425	,017
	LN_IND	1,162	,853	,125	1,363	,175

a. Dependent Variable: LN_RESID
Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Tabel di atas menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *park* memberi hasil koefisien parameter untuk variabel ukuran perusahaan (*size*), *leverage* (DER), dan komisaris independen (IND) berada di atas 0,05 sedangkan untuk variabel profitabilitas (ROE) berada di bawah atau kurang dari 0,05. Kesimpulan dari uji *park* ini berarti belum memenuhi asumsi non-heteroskestiditas. Karena itu, perlu dilakukan penghilangan *outlier* seperti sebelumnya, maka dihasilkan hasil berikut ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park
setelah Menghilangkan *Outlier*
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,884	13,822		,570	,569
LN_SIZE	-5,649	4,029	-,131	-1,402	,163
LN_DER	-,068	,250	-,025	-,273	,785
LN_ROE	-,156	,285	-,057	-,547	,585
LN_IND	-1,405	,905	-,158	-1,553	,123

a. Dependent Variable: LN_RESID

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Setelah menghilangkan *outlier*, dapat dilihat bahwa hasil uji *park* sudah memenuhi asumsi non-heteroskedstisitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan koefisien parameter untuk semua variabel independen berada di atas 0,05, sehingga model regresi yang dipakai sudah memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak dipakai untuk penelitian.

d. Uji Autokorelasi

Model persamaan regresi yang baik adalah model yang terbebas dari masalah autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk menganalisis adanya masalah autokorelasi yakni apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau pada nilai *Durbin-Watson* (DW). Pengujian ini dilakukan dengan data yang sudah diolah di SPSS setelah menghilangkan *outlier*. Berikut adalah hasil uji *Durbin-Watson* yang telah dilakukan.

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,332 ^a	,110	,082	,017649	2,012

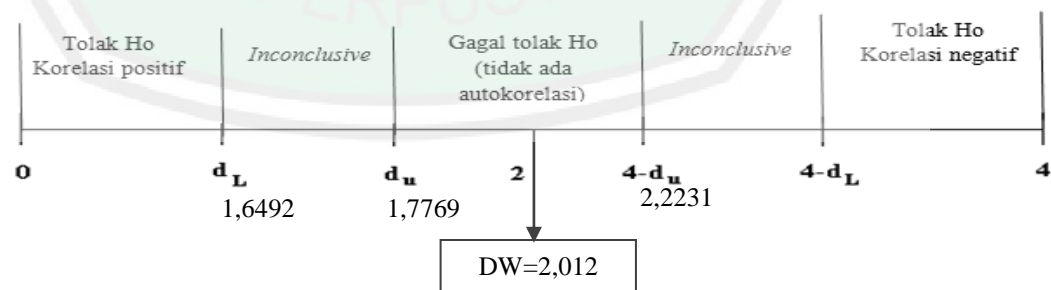
a. Predictors: (Constant), IND, SIZE, DER, ROE

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Hasil Uji Autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 2,012. Ada atau tidaknya korelasi dalam penelitian ini dilihat dari nilai DW tersebut, melalui penggambaran diagram. Selain itu, penggambaran diagram dalam uji autokorelasi juga perlu menentukan nilai d_U dan $4-d_U$. Berdasarkan jumlah sampel (n) yang berupa 129 dan jumlah variabel independen (k) yaitu 4, maka ditemukan d_U dari tabel *Durbin-Watson* sebesar 1,7769, nilai d_L sebesar 1,6492 dan nilai $4-d_U$ sebesar 2,2231. Dengan demikian, nilai DW dapat disimpulkan sebagai $d_U < DW < 4-d_U$ yang berarti penelitian tidak mengandung masalah autokorelasi. Pernyataan ini digambarkan dengan singkat dalam gambar 4.5 berikut ini.

Gambar 4.6
Hasil uji *Durbin-Watson* dalam Diagram



Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

4.1.4 Hasil Uji Regresi Berganda

Uji regresi linier berganda dipakai dalam penelitian ini untuk mengukur nilai dan signifikansi pengaruh yang muncul dalam korelasi antara variabel sebab (independen) terhadap variabel akibat (dependen) serta untuk mengukur ketepatan model regresi yang akan dipakai. Adapun variabel independen yang digunakan meliputi ukuran perusahaan (*size*), *leverage* (DER), profitabilitas (ROE), dan komisaris independen (IND), sedangkan variabel dependen yang dipakai merupakan manajemen pajak (ETR). Adapun hasil uji regresi berganda adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,302	,030		10,234	,000
SIZE	-,002	,001	-,134	-1,488	,139
DER	,011	,003	,363	3,425	,001
ROE	-,009	,006	-,178	-1,478	,142
IND	-,014	,017	-,093	-,852	,396

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Tabel 4.10 menunjukkan hasil bahwa nilai konstanta sebesar 0,302. Hasil lain juga diketahui meliputi nilai konstanta variabel ukuran perusahaan (*size*) sebesar $-0,002$ nilai koefisien *leverage* (DER) sebesar 0,011, nilai koefisien profitabilitas (ROE) sebesar $-0,009$, dan nilai koefisien variabel komisaris independen (IND) sebesar $-0,014$. Dengan demikian, hasil uji regresi berganda dapat ditunjukkan dalam model persamaan regresi sebagai berikut

$$ETR_{it} = 0,302 - 0,002SIZE_{it} + 0,011DER_{it} - 0,009ROE_{it} - 0,014IND_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

a) Konstanta (α) = 0,302

Nilai konstanta ini menunjukkan ketika ukuran perusahaan (*size*), *leverage* (DER), profitabilitas (ROE), dan komisaris independen (IND) mempunyai nilai 0, maka manajemen pajak perusahaan yang menggunakan indikator tarif pajak efektif (ETR) memiliki nilai 0,302.

b) Koefisien ukuran perusahaan (*size*) ($\beta 1$) = -0,002

Berdasarkan nilai di atas, koefisien ukuran perusahaan memiliki hubungan berlawanan arah dengan manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (ETR) karena memiliki nilai negatif. Selain itu, juga diperoleh hasil bahwa ketika nilai tarif pajak efektif meningkat satu satuan maka nilai ukuran perusahaan (*size*) juga akan menurun sebesar 0,002 satuan.

c) Koefisien *leverage* (DER) ($\beta 2$) = 0,011

Variabel *leverage* (DER) memiliki hubungan searah dengan manajemen pajak yang dilihat melalui indikator tarif pajak efektif (ETR) karena memiliki nilai positif ditunjukkan dengan koefisien di atas. Bila nilai tarif pajak efektif mengalami kenaikan satu satuan maka nilai *leverage* (DER) akan mengalami kenaikan pula sebesar 0,011 satuan.

d) Koefisien profitabilitas (ROE) ($\beta 3$) = -0,009

Koefisien profitabilitas (ROE) memiliki hubungan yang berlawanan dengan manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif sebab nilainya yang negatif.

Selain itu, ketika nilai tarif pajak efektif (ETR) meningkat satu satuan maka nilai profitabilitas (ROE) akan menurun sebesar 0,009 satuan.

- e) Koefisien komisaris independen (IND) (β_4) = -0,014

Berdasarkan tabel 4.10, koefisien komisaris independen (IND) mempunyai hubungan yang berlawanan dengan manajemen pajak yang ditunjukkan melalui indikator tarif pajak efektif, karena nilainya negatif. Jika nilai tarif pajak efektif (ETR) mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka nilai komisaris independen akan mengalami penurunan sebesar 0,014 satuan.

4.1.5 Hasil Uji Hipotesis

- a. Hasil Uji t (Uji Secara Parsial)

Uji t adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan menemukan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Uji t ini dilakukan dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H_0 =Tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

H_1 =Terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Langkah selanjutnya setelah mengajukan hipotesis adalah mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji t (uji secara parsial). Dasar pengambilan keputusan uji t dapat dilihat melalui dua cara yaitu dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) dan dengan membandingkan nilai t tabel dengan t hitung yang dihasilkan. Jika dilihat dari nilai signifikansi, H_0 diterima ketika nilai signifikansi lebih dari probabilitas (α) yaitu 0,05 dan H_0 akan ditolak ketika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sementara itu, jika dilihat dengan

membandingkan nilai t tabel dan t hitung, H_0 diterima ketika t hitung kurang dari t tabel atau berada di antara $-t$ tabel dan $+t$ tabel dan H_0 ditolak ketika t hitung lebih besar dari nilai $+t$ tabel atau kurang dari $-t$ tabel. Selain itu, berikut ini adalah rumus untuk mencari nilai t tabel.

$$t_{tabel} = t(\alpha/2; n - k - 1)$$

$$t_{tabel} = t(0,5/2; 129 - 4 - 1) = t(0,25; 124) = 1,97928$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka ditemukan nilai t tabel sebesar 1,97928. Adapun hasil uji t dapat dilihat dalam tabel 4.10.

Tabel 4.11
Hasil Uji t (Uji Secara Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	,302	,030		10,234	,000
SIZE	-,002	,001	-,134	-1,488	,139
DER	,011	,003	,363	3,425	,001
ROE	-,009	,006	-,178	-1,478	,142
IND	-,014	,017	-,093	-,852	,396

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Hasil uji t dalam tabel menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan (*size*) memiliki nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,139 dan nilai t hitung sebesar -1,488. Berdasarkan nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,139, maka H_0 diterima karena nilai Sig. lebih besar dari 0,05, maka variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan nilai t hitung sebesar -1,488, maka H_0 diterima karena nilai t hitung berada di antara -1,97928 dan +1,97928.

Variabel *leverage* (DER) memperlihatkan nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,001 dan nilai *t* hitung sebesar 3,425. Dari kedua nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini disebabkan oleh nilai Sig. yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai *t* hitung lebih besar dari *t* tabel yang berjumlah 1,97928 sehingga H_2 diterima yakni *leverage* mempunyai pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai signifikan (Sig.) dari variabel profitabilitas (ROE) sebesar 0,142, sedangkan nilai *t* hitung sebesar -1,478. Karena nilai Sig. lebih besar dari 0,05 dan nilai *t* hitung lebih kecil dari *t* tabel atau karena bernilai negatif, nilai *t* hitung berada di antara -1,97928 dan +1,97928, maka ditarik kesimpulan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Uji *t* dalam tabel juga memperlihatkan bahwa variabel komisaris independen (IND) nilai signifikan (Sig.) berjumlah 0,396 dan nilai *t* hitung sebesar -0,852. Dua nilai di atas menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal tersebut dikarenakan nilai Sig. lebih besar dari 0,05 dan nilai *t* hitung terletak di antara -1,97928 dan +1,97928 sehingga H_0 diterima yaitu tidak ada pengaruh variabel komisaris independen terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan pengujian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai hubungan antar variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen sebagai berikut.

Tabel 4.12

Ringkasan Hasil Uji t

No	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Pengujian
1	Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>)	Tarif Pajak Efektif (ETR)	Tidak berpengaruh
2	<i>Leverage</i> (DER)		Berpengaruh
3	Profitabilitas (ROE)		Tidak berpengaruh
4	Komisaris Independen (IND)		Tidak berpengaruh

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

b. Hasil Uji f (Uji Secara Simultan)

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh atas variabel dependen. Uji f dilakukan dengan melihat nilai F. Ketika nilai *probability* f lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima, sedangkan jika nilai *probability* f lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Yang mana H_0 penelitian ini adalah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji f (uji simultan).

Tabel 4.13
Hasil Uji f (Uji Secara Simultan)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,005	4	,001	3,841	,006 ^b
	Residual	,039	124	,000		
	Total	,043	128			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), IND, SIZE, DER, ROE

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen yang meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris

independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Hal ini dibuktikan melalui nilai signifikansi (Sig.) f sebesar 0,006 yaitu lebih kecil dari 0,05.

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam memberi penjelasan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi berupa angka antara nol hingga satu. Jika nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sedangkan jika nilainya mendekati 1 maka variabel-variabel independen menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,332 ^a	,110	,082	,017649	2,012

a. Predictors: (Constant), IND, SIZE, DER, ROE

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) atau nilai *adjusted r square* sebesar 0,082 atau 8,2%, dimana bahwa kemampuan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen menjelaskan pengaruhnya terhadap manajemen pajak

dengan indikator tarif pajak efektif sebesar 8,2%, sedangkan 91,8% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Parsial Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak

4.2.1.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan yaitu *t-test* yang menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar $0,139 > 0,05$ dan nilai *t* hitung sebesar $-1,488$. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Hal ini didukung dengan data penelitian yang menunjukkan bahwa ketika suatu perusahaan memiliki total aset yang sama-sama memiliki nilai kecil memiliki tarif pajak efektif yang jauh berbeda lebih dari sepuluh persen. Sebaliknya perusahaan dengan nilai total aset yang besar memiliki tarif pajak efektif yang tidak jauh berbeda dengan perusahaan yang total asetnya sedikit.

Hasil penelitian yang diperoleh memiliki hasil yang konsisten dengan penelitian yang dilakukan Imelia (2015) serta penelitian Adnantara dan Dewi (2016) yang menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap manajemen pajak. Ukuran perusahaan tidak menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan melakukan kegiatan manajemen pajak. Adnantara dan Dewi (2016) menyebutkan bahwa hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tidak dapat memanfaatkan dengan baik tenaga ahli dan lobi politiknya untuk memperoleh insentif pajak guna penghematan pembayaran pajak.

Perusahaan dengan total aset yang besar seharusnya dapat memanfaatkan dengan baik asetnya untuk melakukan manajemen pajak dengan fokus khusus pada pemanfaatan strategi yang baik dan benar dalam menghemat pembayarannya untuk memperoleh laba yang lebih efektif. Perusahaan industri sektor barang konsumsi yang menjalankan aktivitasnya untuk memproduksi produk masyarakat seharusnya dapat membuat perencanaan agar sumber daya yang dimilikinya dalam melakukan perencanaan pajak, namun penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan industri sektor barang konsumsi tidak memanfaatkan sumber dayanya dalam merencanakan perpajakannya.

Tidak adanya pemanfaatan aset dalam melakukan manajemen pajak ini juga dianggap karena tidak semua yang termasuk dalam aset dikenakan pajak secara langsung, sehingga perusahaan tidak terlalu mempermasalahkan jumlah aset mereka yang juga menjadi indikator atas ukuran perusahaan sebagai pemicu manajemen pajak. UU PPh Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dikapitalisasi saat pengeluaran, yang kemudian dibebankan melalui penyusutan. Berdasarkan peraturan tersebut dapat terlihat bahwa nilai aset yang

diproyeksikan dalam laporan keuangan tidak secara langsung menjadi faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dalam perusahaan sektor industri barang konsumsi. Selain itu, penyusunan laporan fiskal pajak mengenai akun-akun yang berhubungan dengan aset, tidak secara gamblang disebutkan dalam total aset tersebut. Hal ini perlu mulai diperhatikan sejak dini mengingat pemberlakuan PP No. 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa perusahaan sebagai wajib pajak badan harus melaporkan seluruh aset yang dimiliki, dimana tarif bagi wajib pajak badan sebesar 25% berdasarkan PP tersebut.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansyah dan Zulaikha (2014), Sinaga dan Sukartha (2018), Lisaumi (2017), Amelia (2015), serta Meilinda dan Cahyonowati (2013). Ketika perusahaan memiliki total aset yang besar maka semakin besar juga sumber daya yang digunakan guna menyusun perencanaan pajak yang akan dilakukan sehingga *tax saving* menjadi lebih optimal (Meilinda dan Cahyonowati, 2013).

4.2.1.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak

Pengujian yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini ditunjukkan melalui nilai signifikan *leverage* sebesar $0,001 < 0,05$ dan *t* hitung sebesar 3,425. Dengan demikian hipotesis kedua diterima yaitu *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak dan dengan arah yang positif.

Hasil penelitian yang diperoleh ini konsisten dengan penelitian Sinaga dan Sukartha (2018) menyebutkan bahwa tarif pajak efektif suatu perusahaan yang rendah disebabkan oleh banyaknya jumlah utang perusahaan tersebut. Hal itu karena biaya bunga yang timbul dari utang menjadi salah satu pengurang jumlah pendapatan perusahaan sebelum pajak. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan industri sektor barang konsumsi banyak menggunakan utang sebagai salah satu alternatif dalam memperoleh insentif pajak guna penghematan pembayaran pajak. Selain itu, perusahaan industri sektor barang konsumsi juga termasuk ke dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki utang yang relatif besar, sehingga memanfaatkannya untuk melakukan manajemen pajak. Tingkat utang yang dimiliki perusahaan mendorong perusahaan lebih giat melakukan perencanaan pajak dengan baik untuk memperoleh laba yang sesuai sehingga dapat menggunakan laba tersebut untuk melunasi utangnya.

Pernyataan penggunaan *leverage* sebagai salah satu alternatif memperoleh insentif pajak juga didukung oleh SE-46/PJ.4/1995 yang membahas tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar Atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito Atau Tabungan Lainnya. Dalam peraturan itu ditegaskan bahwa biaya bunga pinjaman atas pinjaman bank yang tidak ditempatkan dalam deposito yang dapat dibebankan sebagai biaya (menurut pajak). Hal tersebut menunjukkan bahwa beban bunga atas utang merupakan salah satu pengurang pajak. Hal tersebut tentu mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dengan efektif dan salah satunya dengan memanfaatkan utangnya serta biaya bunga yang timbul atas utang tersebut.

Sementara itu, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Adnantara dan Dewi (2016), Amelia (2015), serta Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Amelia (2015) berpendapat bahwa semakin rendah atau semakin tinggi nilai *leverage* suatu perusahaan tidak mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan karena perusahaan yang dipakai sebagai sampel memiliki jumlah utang yang relatif rendah.

4.2.1.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Hipotesis ketiga yang diuji adalah pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak. Berdasarkan uji t yang sudah dilakukan, penelitian ini memperoleh hasil nilai signifikan berjumlah $0,142 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-1,478$. Hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kemampuan perusahaan dilihat dari jumlah laba yang tinggi atau rendah maka tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk giat melakukan perencanaan pajaknya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang diperoleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), dan penelitian Imelia (2015). Penelitian ini sama-sama memiliki t hitung yang bernilai negatif dengan penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan tingkat kemampuan berpendapatan tinggi justru membayar pajak lebih sedikit dibanding perusahaan dengan tingkat pendapatan rendah. Hal itu bisa dipengaruhi oleh pendapatan yang sebenarnya tidak perlu dikenakan pajak malah dikategorikan ke dalam objek pajak, misalnya pendapatan deviden yang tingkat kepemilikannya 25% atau lebih.

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan berupa laba bagi perusahaan industri sektor barang konsumsi berdasarkan hasil penelitian ini baik rendah maupun tinggi tidak mendukung pengoptimalan pemanfaatan insentif pajak guna pembayaran pajak yang lebih hemat. Marfu'ah (2015) menyebutkan bahwa ROA yang merupakan salah satu indikator profitabilitas sama seperti ROE merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan karena berlaku sebagai parameter kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Ketika nilai profitabilitas suatu perusahaan tinggi maka seharusnya perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan seharusnya juga matang. Sehingga, perusahaan tentu menganggap bahwa laba dalam laporan keuangan tinggi atau rendah tidak mendorong perencanaan pajaknya menjadi lebih efektif. Hal ini dapat pula disebabkan oleh berbedanya penentuan laba yang ada dalam laporan keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan laba akuntansi dengan laba yang dikenakan pajak atau laba fiskal, sehingga perusahaan lebih merencanakan pajaknya berdasarkan laba fiskal, bukan pada laba akuntansi. Padahal pemanfaatan insentif pajak melalui perencanaan atau manajemen yang tepat juga berdasarkan laba akuntansi yang digunakan sebagai pengukuran profitabilitas juga dapat menyebabkan kemampuan perusahaan sekaligus perolehan laba akuntansi maupun laba fiskal perusahaan lebih optimal. Pemanfaatan yang benar juga tentu tidak akan melanggar peraturan yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang memperoleh penghasilan dalam tahun pajak berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008.

Sebaliknya, hasil penelitian ini menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2015), Lisaumi (2017), serta penelitian Sinaga dan Sukartha (2018).

Penelitian-penelitian itu menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak.

4.2.1.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan uji t (uji parsial) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak. Nilai signifikan diperoleh sebesar 0,396 dan nilai t hitung berjumlah -0,852. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis keempat ditolak, yakni komisaris tidak berpengaruh secara parsial terhadap manajemen pajak.

Keberadaan komisaris independen di perusahaan adalah sebagai pihak pengawas manajemen. Dengan adanya komisaris independen tersebut, seharusnya manajemen lebih giat dalam menjalankan perusahaannya, salah satunya dengan mengoptimalkan kegiatan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang baik seharusnya dapat dilakukan dengan pengawasan jumlah komisaris yang besar, namun bagi perusahaan industri sketor barang konsumsi, banyak atau sedikitnya jumlah komisaris independen yang ada di perusahaan tidak memberi pengaruh terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan perusahaan.

Hasil penelitian yang diperoleh ini konsisten dengan hasil penelitian Meilinda dan Cahyonowati (2013) serta penelitian Amelia (2015). Hanum dan Zulaikha dalam Amelia (2015) menyatakan bawa penyebab komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, karena komisaris independen melakukan fungsi pengawasannya dengan tidak cukup baik. Hal itu dapat disebabkan karena pengetahuan yang dimiliki oleh anggota komisaris independen mengenai latar

belakang kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan kurang sehingga perumusan strategi perusahaan yang termasuk strategi perpajakannya menjadi kurang efektif.

Meilinda dan Cahyonowati (2013) juga menyatakan bahwa kebanyakan persentase komisaris independen yang berada di perusahaan masih berada di bawah dewan komisaris yang berasal dari manajemen. Hal itu menunjukkan bahwa dewan komisaris dari manajemen masih mendominasi penyusunan kebijakan manajemen pajak dibandingkan komisaris independen yang hanya bisa melakukan pengawasan. Banyak atau tidaknya proporsi komisaris independen yang ada di perusahaan tidak dapat memberi jaminan akan perusahaan berjalan secara efektif. Salah satu penyebabnya adalah komisaris independen hanya bertugas sebagai pengawas kinerja manajemen, tetapi pengambil keputusan di perusahaan tetaplah manajemen perusahaan, sehingga komisaris independen tidak memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan tarif pajak efektif secara langsung.

Sementara itu, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014), Imelia (2015), dan Zeng (2018). Kedua penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa komisaris independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak, yakni dengan arah positif.

4.2.2 Pengaruh Simultan Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak

Pengujian hipotesis terakhir yang dilakukan adalah pengujian hipotesis mengenai pengaruh secara simultan ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen terhadap manajemen pajak. Hasil pengujian ini diperoleh

melalui uji f (uji secara simultan). Berdasarkan uji f, nilai signifikan $0,006 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Hasil pengujian juga didapatkan dari uji koefisien determinasi (R^2) yaitu memiliki hasil bahwa nilai R^2 sebesar 8,2% yang mana menunjukkan bahwa secara bersama-sama ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen menjelaskan tarif pajak efektif dengan kemampuan 8,2% sedangkan sisanya 91,8% dijelaskan oleh variabel lain. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sedikit kemampuan variabel independen yang diuji menjelaskan variabel dependen yang diteliti. Meski begitu, secara bersama-sama keempat variabel ini mampu mempengaruhi manajemen pajak secara signifikan.

Hasil yang diperoleh ini sejalan dengan penelitian Amelia (2015) yang juga memperoleh hasil ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan komisaris independen mempengaruhi tarif pajak efektif secara bersama-sama. Nilai *R square* atas penelitian Amelia (2015) sebesar 11,8%, dibandingkan dengan penelitian ini maka kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen sama-sama bernilai sedikit. Selain itu, nilai *R square* penelitian ini lebih sedikit, kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah variabel dependen yang dipakai dalam penelitian, dan juga populasi penelitian ini merupakan sub sektor dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Amelia (2015)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif . Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan tidak mampu menjadi faktor giat tidaknya perusahaan melakukan manajemen perpajakannya, dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan belum mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan efektif dalam melakukan kegiatan manajemen pajak
2. *Leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif dengan arah positif. Utang yang dimiliki perusahaan menjadi salah satu pendorong giat tidaknya perusahaan melakukan manajemen pajak. Ketika perusahaan memilih utang dan modal sebagai alternatif untuk membayar bunga dan biaya tetap lain yang timbul, maka perusahaan akan giat menggunakan insentif pajak yang dapat menghemat pajak agar laba yang diperolehnya tinggi sehingga dapat menutup utang yang dimilikinya.

3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Hal tersebut mengindikasikan ketika perusahaan berkemampuan memperoleh laba yang tinggi atau rendah, maka tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk giat melakukan perencanaan pajaknya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbedanya penentuan laba yang ada dalam laporan keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan laba akuntansi dengan laba yang dikenakan pajak atau laba fiskal, sehingga perusahaan lebih merencanakan pajaknya berdasarkan laba fiskal, bukan pada laba akuntansi.
4. Komisaris independen tidak memiliki pengaruh atas manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Hal tersebut bermakna bahwa keberadaan manajemen pajak di perusahaan tidak mendorong kegiatan manajemen pajak di perusahaan menjadi semakin efektif meninjau fungsi komisaris independen sebagai pengawas di perusahaan. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan komisaris independen mengenai bisnis perusahaan sehingga tidak dapat menyusun strategi yang tepat bagi perusahaan dan salah satunya mengenai manajemen pajak. Selain itu, komisaris independen di perusahaan ada hanya sebagai pengawas, serta hak pengambil keputusan mengenai strategi di perusahaan masih berada di tangan manajemen perusahaan.
5. Ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan dengan *R square* sebesar 0,082 yang menunjukkan keempat faktor

di atas mampu menjelaskan manajemen pajak sebesar 8,2% sedangkan sisanya 91,8% dijelaskan oleh variabel lain.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tak luput dengan keterbatasan, adapun keterbatasan yang dimiliki penelitian ini meliputi:

1. Variabel yang dipakai terbatas pada 4 variabel independen yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan manajemen pajak.
2. Penelitian hanya terbatas pada 25 perusahaan sektor industri barang konsumsi yang memenuhi persyaratan serta periode penelitian terbatas hanya selama 6 tahun yakni tahun 2013-2018
3. Nilai *R square* dalam hasil penelitian ini hanya 8,2% yang memperlihatkan bahwa 91,8% lainnya dijelaskan oleh variabel lain, hal tersebut dapat disebabkan oleh jumlah variabel yang diteliti hanya sedikit yaitu 4 variabel independen dan 1 variabel dependen.

5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu melengkapi keterbatasan penelitian ini dengan pengembangan hal berikut ini:

1. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini hanya 25 perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk mengganti populasi yang akan digunakan sebagai sampel penelitian seperti membandingkan ketika penelitian menggunakan sektor lain sebagai populasi seperti sektor

pertanian, sektor pertambangan, sektor keuangan dan sektor-sektor lainnya, yang mungkin dapat memperbesar nilai *R square*.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan juga untuk menambah variabel lain dalam penelitian seperti *capital intensity ratio* seperti penelitian Sinaga dan Sukartha (2018), intensitas aset dan fasilitas perpajakan seperti penelitian Imelia (2015), ataupun status kepemilikan seperti penelitian Lisaumi (2017). Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian dengan menambah variabel kontrol atau variabel *intervening*.
3. Saran yang diberikan untuk perusahaan diharapkan untuk mulai memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajaknya, memperhitungkan laba perusahaan yang ada di dalam laporan keuangan sebagai salah satu faktor dalam manajemen pajaknya agar dapat memperlihatkan manajemen pajak perusahaan dengan jelas dan sudah sejalan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya, serta mengatur keberadaan komisaris independen dapat menjadi pengawas dengan baik dan efektif sehingga strategi perusahaan dapat berjalan lancar dan perusahaan dapat membayar pajak dengan sehemat-hematnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an beserta Terjemahan

Al-Hadits beserta Terjemahan

Adnantara dan Dewi. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Properti dan Real Estate, *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata* Vol. 11. No. 2. Agustus 2016. STIE Triatma Mulya.

Al-Quthubi. 2007. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Amelia, Vicky. 2015. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate, *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ardyansyah dan Zulaikha. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR), *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 3 No. 2. Tahun 2014. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Brigham dan Houston. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Denziana dan Monica. 2016. Analisis Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empris Pada Perusahaan Yang Tergolong LQ45 di BEI Periode 2011-2014), *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 7, No.2, September 2016. Halaman 241-254. Universitas Bandar Lampung.

Fraser dan Ormiston. 2008. *Memahami Laporan Keuangan edisi ketujuh*. Jakarta: PT. Indeks.

Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Keuanan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Ghazali, Imam. 2013. *Analisis Multivoriante dengan Program SPSS. Edisi Ketiga*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gitman, Lawrence J. dan Zutter, Chad J. 2012. *Principles of Managerial Finance, 13th Edition*. Boston: Pearson.
- Gudono. 2012. *Teori Organisasi Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Hamka. 2002. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Citra Serumpun Padi
- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Edisi 11*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Imelia, Septi. 2015. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012, *JOM FEKON*. Vol. 2. No. 1. Februari 2015. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Jusup, Al. Haryono. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid II Edisi 7*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Lisaumi, Dina. 2017. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak (Studi Empiris Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
- Marfu'ah, Laila. 2015. Pengaruh *Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*, *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardani. 2012. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan—Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Meilinda dan Cahyonowati. 2013. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak, *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No.3, Tahun 2013. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning—Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: Andi.
- Murhadi, Werner R. 2015. *Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S., & Mastuki, N. 2010. Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics, and Finance*. Vol, 1(2), No.189-193.

Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

PP No. 36 Tahun 2017

Riyanto, Bambang. 2008. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.

SE-46/PJ.4/1995

Sinaga, Ricco R. dan Sukartha, I Made. 2018. Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity Ratio*, *Size*, dan *Leverage* pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.22.3. Maret Tahun 2018), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Manajemen* cetakan ke-1. Bandung: Alfabeta.

Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad.2016.*Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.

Tim FE UIN MALIKI. 2017.*Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Malang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 18

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zeng, Tao. 2018. Relationship Between Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: International Evidence, *Social Responsibility Journal*, <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>, diakses 3 November 2019

www.idx.co.id, diakses 3 November 2018.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Perusahaan Sampel Penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk.
2	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
3	CINT	Chitose Internasional Tbk.
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
5	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.
6	GGRM	Gudang Garam Tbk.
7	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.
8	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
10	KAEF	Kimia Farma Tbk.
11	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
12	MERK	Merck Tbk.
13	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
14	MYOR	Mayora Indah Tbk.
15	PEHA	Phapros Tbk.
16	PYFA	Pyridam Farma Tbk
17	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
18	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido
19	SKBM	Sekar Bumi Tbk.
20	SKLT	Sekar Laut Tbk.
21	TCID	Mandom Indonesia Tbk.
22	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk.
23	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
24	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
25	WIIM	Wisnilak Inti Makmur Tbk.

Lampiran 2

Data Tarif Pajak Efektif

No	Kode Perusahaan	Tahun	Beban PPh	Laba Sebelum Pajak	ETR
1	ADES	2013	Rp 3.538.000.000	Rp 59.194.000.000	0,0598
2	CEKA	2013	Rp 21.484.183.371	Rp 86.553.141.929	0,2482
3	CINT	2013	Rp 9.472.567.077	Rp 51.626.731.627	0,1835
4	DLTA	2013	Rp 87.897.926.000	Rp 358.395.988.000	0,2453
5	DVLA	2013	Rp 49.960.304.000	Rp 175.756.777.000	0,2843
6	GGRM	2013	Rp 1.552.272.000.000	Rp 5.936.204.000.000	0,2615
7	HMSP	2013	Rp 3.691.224.000.000	Rp 14.509.710.000.000	0,2544
8	ICBP	2013	Rp 733.699.000.000	Rp 2.966.990.000.000	0,2473
9	INDF	2013	Rp 1.252.072.000.000	Rp 4.666.958.000.000	0,2683
10	KAEF	2013	Rp 68.483.102.322	Rp 284.125.432.299	0,2410
11	KLBF	2013	Rp 602.070.267.545	Rp 2.572.522.717.231	0,2340
12	MERK	2013	Rp 59.262.982.000	Rp 234.707.739.000	0,2525
13	MLBI	2013	Rp 405.716.000.000	Rp 1.576.945.000.000	0,2573
14	MYOR	2013	Rp 342.515.257.778	Rp 1.356.073.496.557	0,2526
15	PEHA	2013	Rp 14.019.265.000	Rp 56.159.265.000	0,2496
16	PYFA	2013	Rp 2.304.128.607	Rp 8.499.928.945	0,2711
17	ROTI	2013	Rp 52.789.633.241	Rp 210.804.904.162	0,2504
18	SIDO	2013	Rp 176.715.000.000	Rp 582.658.000.000	0,3033
19	SKBM	2013	Rp 20.038.059.647	Rp 78.305.045.915	0,2559
20	SKLT	2013	Rp 5.157.771.350	Rp 16.597.785.538	0,3108
21	TCID	2013	Rp 58.149.236.079	Rp 218.297.701.912	0,2664
22	TSPC	2013	Rp 191.400.294.291	Rp 829.935.403.086	0,2306
23	ULTJ	2013	Rp 111.592.767.209	Rp 436.720.187.873	0,2555
24	UNVR	2013	Rp 1.806.183.000.000	Rp 7.158.808.000.000	0,2523
25	WIIM	2013	Rp 42.797.081.717	Rp 176.119.289.678	0,2430
26	ADES	2014	Rp 10.490.000.000	Rp 41.511.000.000	0,2527
27	CEKA	2014	Rp 15.865.132.224	Rp 56.866.547.178	0,2790
28	CINT	2014	Rp 10.467.163.858	Rp 35.842.459.467	0,2920
29	DLTA	2014	Rp 91.445.380.000	Rp 379.518.812.000	0,2410
30	DVLA	2014	Rp 24.936.967.000	Rp 105.866.443.000	0,2356
31	GGRM	2014	Rp 1.810.552.000.000	Rp 7.205.845.000.000	0,2513
32	HMSP	2014	Rp 3.537.216.000.000	Rp 13.718.299.000.000	0,2578
33	ICBP	2014	Rp 857.044.000.000	Rp 3.388.725.000.000	0,2529
34	INDF	2014	Rp 1.828.217.000.000	Rp 6.229.297.000.000	0,2935
35	KAEF	2014	Rp 79.079.988.771	Rp 315.611.059.635	0,2506
36	KLBF	2014	Rp 642.609.966.418	Rp 2.763.700.548.048	0,2325

37	MERK	2014	Rp 54.907.935.000	Rp 205.958.418.000	0,2666
38	MLBI	2014	Rp 283.495.000.000	Rp 1.078.378.000.000	0,2629
39	MYOR	2014	Rp 119.876.262.161	Rp 529.701.030.755	0,2263
40	PEHA	2014	Rp 16.388.120.000	Rp 61.825.256.000	0,2651
41	PYFA	2014	Rp 1.550.165.979	Rp 4.211.187.980	0,3681
42	ROTI	2014	Rp 64.185.387.029	Rp 252.762.908.103	0,2539
43	SIDO	2014	Rp 130.468.000.000	Rp 646.861.000.000	0,2017
44	SKBM	2014	Rp 20.645.137.227	Rp 109.761.131.334	0,1881
45	SKLT	2014	Rp 7.063.322.474	Rp 23.544.037.458	0,3000
46	TCID	2014	Rp 65.114.435.511	Rp 239.428.829.612	0,2720
47	TSPC	2014	Rp 158.439.557.374	Rp 742.732.619.498	0,2133
48	ULTJ	2014	Rp 91.996.013.563	Rp 375.356.927.774	0,2451
49	UNVR	2014	Rp 1.938.199.000.000	Rp 7.676.722.000.000	0,2525
50	WIIM	2014	Rp 37.236.710.659	Rp 149.541.532.719	0,2490
51	ADES	2015	Rp 11.336.000.000	Rp 44.175.000.000	0,2566
52	CEKA	2015	Rp 35.721.906.910	Rp 142.271.353.890	0,2511
53	CINT	2015	Rp 11.284.522.975	Rp 40.762.330.489	0,2768
54	DLTA	2015	Rp 58.152.543.000	Rp 250.197.742.000	0,2324
55	DVLA	2015	Rp 36.543.278.000	Rp 144.437.708.000	0,2530
56	GGRM	2015	Rp 2.182.441.000.000	Rp 8.635.275.000.000	0,2527
57	HMSp	2015	Rp 3.569.336.000.000	Rp 13.932.644.000.000	0,2562
58	ICBP	2015	Rp 1.086.486.000.000	Rp 4.009.634.000.000	0,2710
59	INDF	2015	Rp 1.730.371.000.000	Rp 4.962.084.000.000	0,3487
60	KAEF	2015	Rp 85.162.555.115	Rp 338.135.061.189	0,2519
61	KLBF	2015	Rp 663.186.962.586	Rp 2.720.881.244.459	0,2437
62	MERK	2015	Rp 51.395.379.000	Rp 193.940.841.000	0,2650
63	MLBI	2015	Rp 178.663.000.000	Rp 675.572.000.000	0,2645
64	MYOR	2015	Rp 390.261.637.241	Rp 1.640.494.765.801	0,2379
65	PEHA	2015	Rp 23.027.209.000	Rp 86.035.135.000	0,2676
66	PYFA	2015	Rp 1.467.826.630	Rp 4.554.931.095	0,3223
67	ROTI	2015	Rp 107.712.914.648	Rp 378.251.615.088	0,2848
68	SIDO	2015	Rp 122.924.000.000	Rp 560.399.000.000	0,2194
69	SKBM	2015	Rp 13.479.285.258	Rp 53.629.853.879	0,2513
70	SKLT	2015	Rp 7.309.446.375	Rp 27.376.238.223	0,2670
71	TCID	2015	Rp 38.647.669.480	Rp 583.121.947.494	0,0663
72	TSPC	2015	Rp 177.892.281.060	Rp 707.110.932.867	0,2516
73	ULTJ	2015	Rp 177.575.035.200	Rp 700.675.250.229	0,2534
74	UNVR	2015	Rp 1.977.685.000.000	Rp 7.829.490.000.000	0,2526
75	WIIM	2015	Rp 46.881.830.192	Rp 177.962.941.779	0,2634

76	ADES	2016	Rp 5.685.000.000	Rp 61.636.000.000	0,0922
77	CEKA	2016	Rp 36.130.823.829	Rp 285.827.837.455	0,1264
78	CINT	2016	Rp 7.553.603.434	Rp 28.172.913.292	0,2681
79	DLTA	2016	Rp 72.538.386.000	Rp 327.047.654.000	0,2218
80	DVLA	2016	Rp 62.333.656.000	Rp 214.417.056.000	0,2907
81	GGRM	2016	Rp 2.258.454.000.000	Rp 8.931.136.000.000	0,2529
82	HMSP	2016	Rp 4.249.218.000.000	Rp 17.011.447.000.000	0,2498
83	ICBP	2016	Rp 1.357.953.000.000	Rp 4.989.254.000.000	0,2722
84	INDF	2016	Rp 2.532.747.000.000	Rp 7.385.228.000.000	0,3429
85	KAEF	2016	Rp 111.427.977.007	Rp 383.025.924.670	0,2909
86	KLBF	2016	Rp 740.303.526.679	Rp 3.091.188.460.230	0,2395
87	MERK	2016	Rp 61.073.314.000	Rp 214.916.161.000	0,2842
88	MLBI	2016	Rp 338.057.000.000	Rp 1.320.186.000.000	0,2561
89	MYOR	2016	Rp 457.007.141.573	Rp 1.845.683.269.238	0,2476
90	PEHA	2016	Rp 34.733.104.000	Rp 121.735.514.000	0,2853
91	PYFA	2016	Rp 1.907.090.128	Rp 7.053.407.169	0,2704
92	ROTI	2016	Rp 89.639.472.867	Rp 369.416.841.698	0,2427
93	SIDO	2016	Rp 148.557.000.000	Rp 629.082.000.000	0,2361
94	SKBM	2016	Rp 8.264.494.258	Rp 30.809.950.308	0,2682
95	SKLT	2016	Rp 4.520.085.462	Rp 25.166.206.536	0,1796
96	TCID	2016	Rp 59.416.261.296	Rp 221.475.857.643	0,2683
97	TSPC	2016	Rp 173.464.664.107	Rp 718.958.200.369	0,2413
98	ULTJ	2016	Rp 222.657.146.910	Rp 932.482.782.652	0,2388
99	UNVR	2016	Rp 2.181.213.000.000	Rp 8.571.885.000.000	0,2545
100	WIIM	2016	Rp 30.372.690.384	Rp 136.662.997.252	0,2222
101	ADES	2017	Rp 12.853.000.000	Rp 51.095.000.000	0,2516
102	CEKA	2017	Rp 35.775.052.527	Rp 143.195.939.366	0,2498
103	CINT	2017	Rp 8.670.611.306	Rp 38.318.872.398	0,2263
104	DLTA	2017	Rp 89.240.218.000	Rp 369.012.853.000	0,2418
105	DVLA	2017	Rp 63.898.628.000	Rp 226.147.921.000	0,2826
106	GGRM	2017	Rp 2.681.165.000.000	Rp 10.436.512.000.000	0,2569
107	HMSP	2017	Rp 4.224.272.000.000	Rp 16.894.806.000.000	0,2500
108	ICBP	2017	Rp 1.663.388.000.000	Rp 5.206.561.000.000	0,3195
109	INDF	2017	Rp 2.513.491.000.000	Rp 7.658.554.000.000	0,3282
110	KAEF	2017	Rp 118.001.844.961	Rp 449.709.762.422	0,2624
111	KLBF	2017	Rp 787.935.315.388	Rp 3.241.186.725.992	0,2431
112	MERK	2017	Rp 61.107.348.000	Rp 205.784.642.000	0,2969
113	MLBI	2017	Rp 457.953.000.000	Rp 1.780.020.000.000	0,2573
114	MYOR	2017	Rp 555.930.772.581	Rp 2.186.884.603.474	0,2542

115	PEHA	2017	Rp 46.082.129.000	Rp 171.348.190.000	0,2689
116	PYFA	2017	Rp 2.471.878.605	Rp 9.599.280.773	0,2575
117	ROTI	2017	Rp 50.783.313.391	Rp 186.147.334.530	0,2728
118	SIDO	2017	Rp 148.090.000.000	Rp 681.889.000.000	0,2172
119	SKBM	2017	Rp 5.880.557.363	Rp 31.761.022.154	0,1852
120	SKLT	2017	Rp 4.399.850.008	Rp 27.370.565.356	0,1608
121	TCID	2017	Rp 63.956.663.719	Rp 243.083.045.787	0,2631
122	TSPC	2017	Rp 186.750.680.877	Rp 744.090.262.873	0,2510
123	ULTJ	2017	Rp 314.550.000.000	Rp 1.026.231.000.000	0,3065
124	UNVR	2017	Rp 2.367.099.000.000	Rp 9.371.661.000.000	0,2526
125	WIIM	2017	Rp 13.901.517.361	Rp 54.491.308.212	0,2551
126	ADES	2018	Rp 17.102.000.000	Rp 70.060.000.000	0,2441
127	CEKA	2018	Rp 30.745.155.584	Rp 123.394.812.359	0,2492
128	CINT	2018	Rp 8.535.926.795	Rp 22.090.078.956	0,3864
129	DLTA	2018	Rp 103.118.133.000	Rp 441.248.118.000	0,2337
130	DVLA	2018	Rp 72.191.936.000	Rp 272.843.904.000	0,2646
131	GGRM	2018	Rp 2.686.174.000.000	Rp 10.479.242.000.000	0,2563
132	HMSF	2018	Rp 4.422.851.000.000	Rp 17.961.269.000.000	0,2462
133	ICBP	2018	Rp 1.788.004.000.000	Rp 6.446.785.000.000	0,2773
134	INDF	2018	Rp 2.485.115.000.000	Rp 7.446.966.000.000	0,3337
135	KAEF	2018	Rp 175.933.518.561	Rp 577.726.327.511	0,3045
136	KLBF	2018	Rp 809.137.704.264	Rp 3.306.399.669.021	0,2447
137	MERK	2018	Rp 12.830.660.000	Rp 50.208.396.000	0,2555
138	MLBI	2018	Rp 447.105.000.000	Rp 1.671.912.000.000	0,2674
139	MYOR	2018	Rp 621.507.918.551	Rp 2.381.942.198.855	0,2609
140	PEHA	2018	Rp 44.277.206.000	Rp 177.569.720.000	0,2494
141	PYFA	2018	Rp 2.869.815.788	Rp 11.317.263.776	0,2536
142	ROTI	2018	Rp 59.764.888.552	Rp 186.936.324.915	0,3197
143	SIDO	2018	Rp 203.988.000.000	Rp 867.837.000.000	0,2351
144	SKBM	2018	Rp 4.932.821.175	Rp 20.887.453.647	0,2362
145	SKLT	2018	Rp 7.613.548.091	Rp 39.567.679.343	0,1924
146	TCID	2018	Rp 61.576.511.908	Rp 234.625.954.664	0,2624
147	TSPC	2018	Rp 187.322.033.018	Rp 727.700.178.905	0,2574
148	ULTJ	2018	Rp 247.411.000.000	Rp 949.018.000.000	0,2607
149	UNVR	2018	Rp 3.076.319.000.000	Rp 12.185.764.000.000	0,2525
150	WIIM	2018	Rp 19.587.786.800	Rp 70.730.637.719	0,2769

Lampiran 3

Data Ukuran Perusahaan

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Aset	Size
1	ADES	2013	Rp 441.064.000.000	26,8125
2	CEKA	2013	Rp 1.069.627.299.747	27,6983
3	CINT	2013	Rp 262.915.458.679	26,2951
4	DLTA	2013	Rp 867.040.802.000	27,4884
5	DVLA	2013	Rp 1.190.054.288.000	27,805
6	GGRM	2013	Rp 50.770.251.000.000	31,5583
7	HMSP	2013	Rp 27.404.594.000.000	30,9417
8	ICBP	2013	Rp 21.267.470.000.000	30,6882
9	INDF	2013	Rp 78.092.789.000.000	31,9889
10	KAEF	2013	Rp 2.471.939.548.890	28,536
11	KLBF	2013	Rp 11.315.061.275.026	30,0572
12	MERK	2013	Rp 696.946.318.000	27,27
13	MLBI	2013	Rp 1.782.148.000.000	28,2088
14	MYOR	2013	Rp 9.710.223.454.000	29,9042
15	PEHA	2013	Rp 642.911.964.000	27,1893
16	PYFA	2013	Rp 175.118.921.406	25,8887
17	ROTI	2013	Rp 1.822.689.047.108	28,2313
18	SIDO	2013	Rp 2.951.507.000.000	28,7133
19	SKBM	2013	Rp 497.652.557.672	26,9332
20	SKLT	2013	Rp 301.989.488.699	26,4337
21	TCID	2013	Rp 1.465.952.460.752	28,0135
22	TSPC	2013	Rp 5.407.957.915.805	29,3189
23	ULTJ	2013	Rp 2.811.620.982.142	28,6648
24	UNVR	2013	Rp 13.348.188.000.000	30,2224
25	WIIM	2013	Rp 1.229.011.260.881	27,8372
26	ADES	2014	Rp 504.865.000.000	26,9476
27	CEKA	2014	Rp 1.284.150.037.341	27,8811
28	CINT	2014	Rp 365.091.839.717	26,6234
29	DLTA	2014	Rp 991.947.134.000	27,6229
30	DVLA	2014	Rp 1.236.247.525.000	27,8431
31	GGRM	2014	Rp 58.220.600.000.000	31,6953
32	HMSP	2014	Rp 28.380.630.000.000	30,9767
33	ICBP	2014	Rp 24.910.211.000.000	30,8463
34	INDF	2014	Rp 85.938.885.000.000	32,0847
35	KAEF	2014	Rp 2.968.184.626.297	28,719
36	KLBF	2014	Rp 12.425.032.367.729	30,1507

37	MERK	2014	Rp 716.599.526.000	27,2978
38	MLBI	2014	Rp 2.231.051.000.000	28,4335
39	MYOR	2014	Rp 10.291.108.029.334	29,9623
40	PEHA	2014	Rp 638.089.962.000	27,1817
41	PYFA	2014	Rp 172.736.624.689	25,875
42	ROTI	2014	Rp 2.142.894.276.216	28,3932
43	SIDO	2014	Rp 2.821.399.000.000	28,6683
44	SKBM	2014	Rp 649.534.031.113	27,1995
45	SKLT	2014	Rp 331.574.891.637	26,5271
46	TCID	2014	Rp 1.853.235.343.636	28,248
47	TSPC	2014	Rp 5.592.730.492.960	29,3525
48	ULTJ	2014	Rp 2.917.083.567.355	28,7016
49	UNVR	2014	Rp 14.280.670.000.000	30,2899
50	WIIM	2014	Rp 1.332.907.675.785	27,9184
51	ADES	2015	Rp 653.224.000.000	27,2052
52	CEKA	2015	Rp 1.485.826.210.015	28,027
53	CINT	2015	Rp 382.807.494.765	26,6708
54	DLTA	2015	Rp 1.038.321.916.000	27,6686
55	DVLA	2015	Rp 1.376.278.237.000	27,9504
56	GGRM	2015	Rp 63.505.413.000.000	31,7821
57	HMSP	2015	Rp 38.010.724.000.000	31,2689
58	ICBP	2015	Rp 26.560.624.000.000	30,9105
59	INDF	2015	Rp 91.831.526.000.000	32,151
60	KAEF	2015	Rp 3.236.224.076.311	28,8054
61	KLBF	2015	Rp 13.696.417.381.439	30,2482
62	MERK	2015	Rp 641.646.818.000	27,1873
63	MLBI	2015	Rp 2.100.853.000.000	28,3734
64	MYOR	2015	Rp 11.342.715.686.221	30,0596
65	PEHA	2015	Rp 680.654.194.000	27,2463
66	PYFA	2015	Rp 159.951.537.229	25,7981
67	ROTI	2015	Rp 2.706.323.637.034	28,6266
68	SIDO	2015	Rp 2.796.111.000.000	28,6593
69	SKBM	2015	Rp 764.484.248.710	27,3625
70	SKLT	2015	Rp 377.110.748.359	26,6558
71	TCID	2015	Rp 2.082.096.848.703	28,3644
72	TSPC	2015	Rp 6.284.729.099.203	29,4691
73	ULTJ	2015	Rp 3.539.995.910.248	28,8951
74	UNVR	2015	Rp 15.729.945.000.000	30,3866
75	WIIM	2015	Rp 1.342.700.045.391	27,9257

76	ADES	2016	Rp 767.479.000.000	27,3664
77	CEKA	2016	Rp 1.425.964.152.418	27,9859
78	CINT	2016	Rp 399.336.626.636	26,7131
79	DLTA	2016	Rp 1.197.796.650.000	27,8115
80	DVLA	2016	Rp 1.531.365.558.000	28,0572
81	GGRM	2016	Rp 62.951.634.000.000	31,7734
82	HMSP	2016	Rp 42.508.277.000.000	31,3807
83	ICBP	2016	Rp 28.901.948.000.000	30,9949
84	INDF	2016	Rp 82.174.515.000.000	32,0399
85	KAEF	2016	Rp 4.612.562.541.054	29,1598
86	KLBF	2016	Rp 15.226.009.210.657	30,354
87	MERK	2016	Rp 743.934.894.000	27,3352
88	MLBI	2016	Rp 2.275.038.000.000	28,453
89	MYOR	2016	Rp 12.922.421.859.142	30,19
90	PEHA	2016	Rp 883.288.615.000	27,5069
91	PYFA	2016	Rp 167.062.795.608	25,8416
92	ROTI	2016	Rp 2.919.640.858.718	28,7025
93	SIDO	2016	Rp 2.987.614.000.000	28,7255
94	SKBM	2016	Rp 1.001.657.012.004	27,6327
95	SKLT	2016	Rp 568.239.939.951	27,0658
96	TCID	2016	Rp 2.185.101.038.101	28,4127
97	TSPC	2016	Rp 6.585.807.349.438	29,5159
98	ULTJ	2016	Rp 4.239.199.641.365	29,0754
99	UNVR	2016	Rp 16.745.695.000.000	30,4492
100	WIIM	2016	Rp 1.353.634.132.275	27,9338
101	ADES	2017	Rp 840.236.000.000	27,4569
102	CEKA	2017	Rp 1.392.636.444.501	27,9622
103	CINT	2017	Rp 476.577.841.605	26,8899
104	DLTA	2017	Rp 1.340.842.765.000	27,9243
105	DVLA	2017	Rp 1.640.886.147.000	28,1263
106	GGRM	2017	Rp 66.759.930.000.000	31,8321
107	HMSP	2017	Rp 43.141.063.000.000	31,3955
108	ICBP	2017	Rp 31.619.514.000.000	31,0848
109	INDF	2017	Rp 87.939.488.000.000	32,1077
110	KAEF	2017	Rp 6.096.148.972.533	29,4387
111	KLBF	2017	Rp 16.616.239.416.335	30,4414
112	MERK	2017	Rp 847.006.544.000	27,465
113	MLBI	2017	Rp 2.510.078.000.000	28,5513
114	MYOR	2017	Rp 14.915.849.800.251	30,3334

115	PEHA	2017	Rp 1.175.935.585.000	27,7931
116	PYFA	2017	Rp 159.563.931.041	25,7957
117	ROTI	2017	Rp 4.559.573.709.411	29,1483
118	SIDO	2017	Rp 3.158.198.000.000	28,781
119	SKBM	2017	Rp 1.623.027.475.045	28,1153
120	SKLT	2017	Rp 636.284.210.210	27,1789
121	TCID	2017	Rp 2.361.807.189.430	28,4904
122	TSPC	2017	Rp 7.434.900.309.021	29,6372
123	ULTJ	2017	Rp 5.186.940.000.000	29,2772
124	UNVR	2017	Rp 18.906.413.000.000	30,5705
125	WIIM	2017	Rp 1.225.712.093.041	27,8345
126	ADES	2018	Rp 881.275.000.000	27,5046
127	CEKA	2018	Rp 1.168.956.042.706	27,7871
128	CINT	2018	Rp 491.382.035.136	26,9205
129	DLTA	2018	Rp 1.523.517.170.000	28,0520
130	DVLA	2018	Rp 1.682.821.739.000	28,1515
131	GGRM	2018	Rp 69.097.219.000.000	31,8665
132	HMSP	2018	Rp 46.602.420.000.000	31,4727
133	ICBP	2018	Rp 34.367.153.000.000	31,1681
134	INDF	2018	Rp 96.537.796.000.000	32,2010
135	KAEF	2018	Rp 9.460.427.317.681	29,8781
136	KLBF	2018	Rp 18.146.206.145.369	30,5295
137	MERK	2018	Rp 1.263.113.689.000	27,8646
138	MLBI	2018	Rp 2.889.501.000.000	28,6921
139	MYOR	2018	Rp 17.591.706.426.634	30,4984
140	PEHA	2018	Rp 1.888.663.546.000	28,2669
141	PYFA	2018	Rp 187.057.163.854	25,9547
142	ROTI	2018	Rp 4.393.810.380.883	29,1112
143	SIDO	2018	Rp 3.337.628.000.000	28,8363
144	SKBM	2018	Rp 1.771.365.972.009	28,2028
145	SKLT	2018	Rp 747.293.725.435	27,3397
146	TCID	2018	Rp 2.445.143.511.801	28,5251
147	TSPC	2018	Rp 7.869.975.060.326	29,6941
148	ULTJ	2018	Rp 5.555.871.000.000	29,3459
149	UNVR	2018	Rp 19.522.970.000.000	30,6026
150	WIIM	2018	Rp 1.255.573.914.558	27,8586

Lampiran 4

Data Leverage

No	Kode Perusahaan	Tahun	Total Debt	Total Equity	DER
1	ADES	2013	Rp 176.286.000.000	Rp 264.778.000.000	0,6658
2	CEKA	2013	Rp 541.352.365.829	Rp 528.274.933.918	1,0248
3	CINT	2013	Rp 77.798.659.892	Rp 185.116.798.787	0,4203
4	DLTA	2013	Rp 190.482.809.000	Rp 676.557.993.000	0,2815
5	DVLA	2013	Rp 275.351.336.000	Rp 914.702.952.000	0,3010
6	GGRM	2013	Rp 21.353.980.000.000	Rp 29.416.271.000.000	0,7259
7	HMSP	2013	Rp 13.249.559.000.000	Rp 14.155.035.000.000	0,9360
8	ICBP	2013	Rp 8.001.739.000.000	Rp 13.265.731.000.000	0,6032
9	INDF	2013	Rp 39.719.660.000.000	Rp 38.373.129.000.000	1,0351
10	KAEF	2013	Rp 847.584.859.909	Rp 1.624.354.688.981	0,5218
11	KLBF	2013	Rp 2.815.103.309.451	Rp 8.499.957.965.575	0,3312
12	MERK	2013	Rp 36.909.443.000	Rp 512.218.622.000	0,0721
13	MLBI	2013	Rp 794.615.000.000	Rp 987.533.000.000	0,8046
14	MYOR	2013	Rp 5.771.077.430.823	Rp 3.938.760.819.650	1,4652
15	PEHA	2013	Rp 250.984.750.000	Rp 391.927.214.000	0,6404
16	PYFA	2013	Rp 81.217.648.190	Rp 93.901.273.216	0,8649
17	ROTI	2013	Rp 1.035.351.397.437	Rp 787.337.649.671	1,3150
18	SIDO	2013	Rp 326.051.000.000	Rp 2.625.456.000.000	0,1242
19	SKBM	2013	Rp 296.528.343.161	Rp 201.124.214.511	1,4744
20	SKLT	2013	Rp 162.339.135.063	Rp 139.650.353.636	1,1625
21	TCID	2013	Rp 182.961.770.795	Rp 1.182.990.689.957	0,1547
22	TSPC	2013	Rp 1.545.006.061.565	Rp 3.862.951.854.240	0,4000
23	ULTJ	2013	Rp 796.474.448.056	Rp 2.015.146.534.086	0,3952
24	UNVR	2013	Rp 9.093.518.000.000	Rp 4.254.670.000.000	2,1373
25	WIIM	2013	Rp 447.651.956.356	Rp 781.359.304.525	0,5729
26	ADES	2014	Rp 209.016.000.000	Rp 295.799.000.000	0,7066
27	CEKA	2014	Rp 746.598.865.219	Rp 537.551.172.122	1,3889
28	CINT	2014	Rp 73.446.018.893	Rp 291.645.820.824	0,2518
29	DLTA	2014	Rp 227.473.881.000	Rp 764.473.253.000	0,2976
30	DVLA	2014	Rp 273.816.042.000	Rp 962.431.483.000	0,2845
31	GGRM	2014	Rp 24.991.880.000.000	Rp 33.228.720.000.000	0,7521
32	HMSP	2014	Rp 14.882.516.000.000	Rp 13.498.114.000.000	1,1026
33	ICBP	2014	Rp 9.870.264.000.000	Rp 15.039.947.000.000	0,6563
34	INDF	2014	Rp 44.710.509.000.000	Rp 41.228.376.000.000	1,0845
35	KAEF	2014	Rp 1.157.040.676.384	Rp 1.811.143.949.913	0,6388
36	KLBF	2014	Rp 2.607.556.689.283	Rp 9.817.475.678.446	0,2656

37	MERK	2014	Rp 162.908.670.000	Rp 553.690.856.000	0,2942
38	MLBI	2014	Rp 1.677.254.000.000	Rp 553.797.000.000	3,0286
39	MYOR	2014	Rp 6.190.553.036.545	Rp 4.100.554.992.789	1,5097
40	PEHA	2014	Rp 229.840.085.000	Rp 408.249.877.000	0,5630
41	PYFA	2014	Rp 75.460.789.155	Rp 97.096.611.306	0,7772
42	ROTI	2014	Rp 1.827.771.921.472	Rp 960.122.354.744	1,9037
43	SIDO	2014	Rp 186.740.000.000	Rp 2.634.659.000.000	0,0709
44	SKBM	2014	Rp 331.624.254.750	Rp 317.909.776.363	1,0431
45	SKLT	2014	Rp 178.206.785.017	Rp 153.368.106.620	1,1620
46	TCID	2014	Rp 569.730.901.368	Rp 1.283.504.442.268	0,4439
47	TSPC	2014	Rp 1.460.391.494.410	Rp 4.132.338.998.550	0,3534
48	ULTJ	2014	Rp 651.985.807.625	Rp 2.265.097.759.730	0,2878
49	UNVR	2014	Rp 9.681.888.000.000	Rp 4.598.782.000.000	2,1053
50	WIIM	2014	Rp 478.482.577.195	Rp 854.425.098.590	0,5600
51	ADES	2015	Rp 324.855.000.000	Rp 328.369.000.000	0,9893
52	CEKA	2015	Rp 845.932.695.663	Rp 639.893.514.352	1,3220
53	CINT	2015	Rp 67.734.182.851	Rp 315.073.311.914	0,2150
54	DLTA	2015	Rp 188.700.435.000	Rp 849.621.481.000	0,2221
55	DVLA	2015	Rp 402.760.903.000	Rp 973.517.334.000	0,4137
56	GGRM	2015	Rp 25.497.504.000.000	Rp 38.007.909.000.000	0,6708
57	HMSP	2015	Rp 5.994.664.000.000	Rp 32.016.060.000.000	0,1872
58	ICBP	2015	Rp 10.173.713.000.000	Rp 16.386.911.000.000	0,6208
59	INDF	2015	Rp 48.709.933.000.000	Rp 43.121.593.000.000	1,1296
60	KAEF	2015	Rp 1.374.127.253.841	Rp 1.862.096.822.470	0,7379
61	KLBF	2015	Rp 2.758.131.396.170	Rp 10.938.285.985.269	0,2522
62	MERK	2015	Rp 168.103.536.000	Rp 473.543.282.000	0,3550
63	MLBI	2015	Rp 1.334.373.000.000	Rp 766.480.000.000	1,7409
64	MYOR	2015	Rp 6.148.255.759.034	Rp 5.194.459.927.187	1,1836
65	PEHA	2015	Rp 230.934.097.000	Rp 449.720.097.000	0,5135
66	PYFA	2015	Rp 58.729.478.032	Rp 101.222.059.197	0,5802
67	ROTI	2015	Rp 1.517.788.685.162	Rp 1.188.534.951.872	1,2770
68	SIDO	2015	Rp 197.797.000.000	Rp 2.796.111.000.000	0,0707
69	SKBM	2015	Rp 420.396.809.051	Rp 344.087.439.659	1,2218
70	SKLT	2015	Rp 225.066.080.248	Rp 152.044.668.111	1,4803
71	TCID	2015	Rp 367.225.370.670	Rp 1.714.871.478.033	0,2141
72	TSPC	2015	Rp 1.947.588.124.083	Rp 4.337.140.975.120	0,4490
73	ULTJ	2015	Rp 742.490.216.326	Rp 2.797.505.693.922	0,2654
74	UNVR	2015	Rp 10.902.585.000.000	Rp 4.827.360.000.000	2,2585
75	WIIM	2015	Rp 398.991.064.485	Rp 943.708.980.906	0,4228

76	ADES	2016	Rp 383.091.000.000	Rp 384.388.000.000	0,9966
77	CEKA	2016	Rp 538.044.038.690	Rp 887.920.113.728	0,6060
78	CINT	2016	Rp 72.906.787.680	Rp 326.429.838.956	0,2233
79	DLTA	2016	Rp 185.422.642.000	Rp 1.012.374.008.000	0,1832
80	DVLA	2016	Rp 451.785.946.000	Rp 1.079.579.612.000	0,4185
81	GGRM	2016	Rp 23.287.406.000.000	Rp 39.564.228.000.000	0,5886
82	HMSP	2016	Rp 8.333.263.000.000	Rp 34.175.014.000.000	0,2438
83	ICBP	2016	Rp 10.401.125.000.000	Rp 18.500.823.000.000	0,5622
84	INDF	2016	Rp 38.233.092.000.000	Rp 43.941.423.000.000	0,8701
85	KAEF	2016	Rp 2.341.155.131.870	Rp 2.271.407.409.194	1,0307
86	KLBF	2016	Rp 2.762.162.069.572	Rp 12.463.847.141.085	0,2216
87	MERK	2016	Rp 161.262.425.000	Rp 743.934.894.000	0,2168
88	MLBI	2016	Rp 1.454.398.000.000	Rp 820.640.000.000	1,7723
89	MYOR	2016	Rp 6.657.165.872.077	Rp 6.265.255.987.065	1,0626
90	PEHA	2016	Rp 261.208.271.000	Rp 622.080.344.000	0,4199
91	PYFA	2016	Rp 61.554.005.181	Rp 105.508.790.427	0,5834
92	ROTI	2016	Rp 1.476.889.086.692	Rp 1.442.751.772.026	1,0237
93	SIDO	2016	Rp 229.729.000.000	Rp 2.757.885.000.000	0,0833
94	SKBM	2016	Rp 633.267.725.358	Rp 368.389.286.646	1,7190
95	SKLT	2016	Rp 272.088.644.079	Rp 296.151.295.872	0,9187
96	TCID	2016	Rp 401.942.530.776	Rp 1.783.158.507.325	0,2254
97	TSPC	2016	Rp 1.950.534.206.746	Rp 4.635.273.142.692	0,4208
98	ULTJ	2016	Rp 749.966.146.582	Rp 3.489.233.494.783	0,2149
99	UNVR	2016	Rp 12.041.437.000.000	Rp 4.704.258.000.000	2,5597
100	WIIM	2016	Rp 362.540.740.471	Rp 991.093.391.804	0,3658
101	ADES	2017	Rp 417.225.000.000	Rp 423.011.000.000	0,9863
102	CEKA	2017	Rp 489.592.257.434	Rp 903.044.187.067	0,5422
103	CINT	2017	Rp 94.304.081.659	Rp 382.273.759.946	0,2467
104	DLTA	2017	Rp 196.197.372.000	Rp 1.144.645.393.000	0,1714
105	DVLA	2017	Rp 524.586.078.000	Rp 1.116.300.069.000	0,4699
106	GGRM	2017	Rp 24.572.266.000.000	Rp 42.187.664.000.000	0,5825
107	HMSP	2017	Rp 9.028.078.000.000	Rp 34.112.985.000.000	0,2647
108	ICBP	2017	Rp 11.295.184.000.000	Rp 20.324.330.000.000	0,5557
109	INDF	2017	Rp 41.182.764.000.000	Rp 46.756.724.000.000	0,8808
110	KAEF	2017	Rp 3.523.628.217.406	Rp 2.572.520.755.127	1,3697
111	KLBF	2017	Rp 2.722.207.633.646	Rp 13.894.031.782.689	0,1959
112	MERK	2017	Rp 231.569.103.000	Rp 615.437.441.000	0,3763
113	MLBI	2017	Rp 1.445.173.000.000	Rp 1.064.905.000.000	1,3571
114	MYOR	2017	Rp 7.561.503.434.179	Rp 7.354.346.366.072	1,0282

115	PEHA	2017	Rp 474.545.233.000	Rp 701.390.352.000	0,6766
116	PYFA	2017	Rp 50.707.930.330	Rp 108.856.000.711	0,4658
117	ROTI	2017	Rp 1.739.467.993.982	Rp 2.820.105.715.429	0,6168
118	SIDO	2017	Rp 262.333.000.000	Rp 2.895.865.000.000	0,0906
119	SKBM	2017	Rp 599.790.014.646	Rp 1.023.237.460.399	0,5862
120	SKLT	2017	Rp 328.714.435.982	Rp 307.569.774.228	1,0687
121	TCID	2017	Rp 503.480.853.006	Rp 1.858.326.336.424	0,2709
122	TSPC	2017	Rp 2.352.891.899.876	Rp 5.082.008.409.145	0,4630
123	ULTJ	2017	Rp 978.185.000.000	Rp 4.208.755.000.000	0,2324
124	UNVR	2017	Rp 13.733.025.000.000	Rp 5.173.388.000.000	2,6546
125	WIIM	2017	Rp 247.620.731.930	Rp 978.091.361.111	0,2532
126	ADES	2018	Rp 399.361.000.000	Rp 481.914.000.000	0,8287
127	CEKA	2018	Rp 192.308.466.864	Rp 976.647.575.842	0,19691
128	CINT	2018	Rp 102.703.457.308	Rp 388.678.577.828	0,26424
129	DLTA	2018	Rp 239.353.356.000	Rp 1.284.163.814.000	0,18639
130	DVLA	2018	Rp 482.559.876.000	Rp 1.200.261.863.000	0,40205
131	GGRM	2018	Rp 23.963.934.000.000	Rp 45.133.285.000.000	0,53096
132	HMSP	2018	Rp 11.244.167.000.000	Rp 35.358.253.000.000	0,31801
133	ICBP	2018	Rp 11.660.003.000.000	Rp 22.707.150.000.000	0,51349
134	INDF	2018	Rp 46.620.996.000.000	Rp 49.916.800.000.000	0,93397
135	KAEF	2018	Rp 6.103.967.587.830	Rp 3.356.459.729.851	1,81857
136	KLBF	2018	Rp 2.851.611.349.015	Rp 15.294.594.796.354	0,18645
137	MERK	2018	Rp 744.833.288.000	Rp 518.280.401.000	1,43712
138	MLBI	2018	Rp 1.721.965.000.000	Rp 1.167.536.000.000	1,47487
139	MYOR	2018	Rp 9.049.161.944.940	Rp 8.542.544.481.694	1,05931
140	PEHA	2018	Rp 1.078.865.209.000	Rp 789.798.337.000	1,366
141	PYFA	2018	Rp 68.129.603.054	Rp 118.927.560.800	0,57287
142	ROTI	2018	Rp 1.476.909.260.772	Rp 2.916.901.120.111	0,50633
143	SIDO	2018	Rp 435.014.000.000	Rp 2.902.614.000.000	0,14987
144	SKBM	2018	Rp 730.789.419.438	Rp 1.040.576.552.571	0,70229
145	SKLT	2018	Rp 408.057.718.435	Rp 339.236.007.000	1,20287
146	TCID	2018	Rp 472.680.346.662	Rp 1.972.463.165.139	0,23964
147	TSPC	2018	Rp 2.437.126.989.832	Rp 5.432.848.070.494	0,44859
148	ULTJ	2018	Rp 780.915.000.000	Rp 4.774.956.000.000	0,16354
149	UNVR	2018	Rp 11.944.837.000.000	Rp 7.578.133.000.000	1,57622
150	WIIM	2018	Rp 250.337.111.893	Rp 1.005.236.802.665	0,24903

Lampiran 5

Data Profitabilitas

No	Kode Perusahaan	Tahun	Net Income	Equity	ROE
1	ADES	2013	Rp 55.656.000.000	Rp 264.778.000.000	0,2102
2	CEKA	2013	Rp 65.068.958.558	Rp 528.274.933.918	0,1232
3	CINT	2013	Rp 42.154.164.550	Rp 185.116.798.787	0,2277
4	DLTA	2013	Rp 288.073.432.000	Rp 676.557.993.000	0,4258
5	DVLA	2013	Rp 125.796.473.000	Rp 914.702.952.000	0,1375
6	GGRM	2013	Rp 4.383.932.000.000	Rp 29.416.271.000.000	0,1490
7	HMSP	2013	Rp 10.818.486.000.000	Rp 14.155.035.000.000	0,7643
8	ICBP	2013	Rp 2.235.040.000.000	Rp 13.265.731.000.000	0,1685
9	INDF	2013	Rp 3.416.635.000.000	Rp 38.373.129.000.000	0,0890
10	KAEF	2013	Rp 215.642.329.977	Rp 1.624.354.688.981	0,1328
11	KLBF	2013	Rp 1.970.452.449.686	Rp 8.499.957.965.575	0,2318
12	MERK	2013	Rp 175.444.757.000	Rp 512.218.622.000	0,3425
13	MLBI	2013	Rp 1.171.229.000.000	Rp 987.533.000.000	1,1860
14	MYOR	2013	Rp 1.013.558.238.779	Rp 3.938.760.819.650	0,2573
15	PEHA	2013	Rp 42.140.000.000	Rp 391.927.214.000	0,1075
16	PYFA	2013	Rp 6.195.800.338	Rp 93.901.273.216	0,0660
17	ROTI	2013	Rp 158.015.270.921	Rp 787.337.649.671	0,2007
18	SIDO	2013	Rp 405.943.000.000	Rp 2.625.456.000.000	0,1546
19	SKBM	2013	Rp 58.266.986.268	Rp 201.124.214.511	0,2897
20	SKLT	2013	Rp 11.440.014.188	Rp 139.650.353.636	0,0819
21	TCID	2013	Rp 160.563.780.833	Rp 1.182.990.689.957	0,1357
22	TSPC	2013	Rp 638.535.108.795	Rp 3.862.951.854.240	0,1653
23	ULTJ	2013	Rp 325.127.420.664	Rp 2.015.146.534.086	0,1613
24	UNVR	2013	Rp 5.352.625.000.000	Rp 4.254.670.000.000	1,2581
25	WIIM	2013	Rp 132.322.207.861	Rp 781.359.304.525	0,1693
26	ADES	2014	Rp 31.021.000.000	Rp 295.799.000.000	0,1049
27	CEKA	2014	Rp 41.001.414.954	Rp 537.551.172.122	0,0763
28	CINT	2014	Rp 25.375.295.609	Rp 291.645.820.824	0,0870
29	DLTA	2014	Rp 270.498.062.000	Rp 764.473.253.000	0,3538
30	DVLA	2014	Rp 80.929.476.000	Rp 962.431.483.000	0,0841
31	GGRM	2014	Rp 5.395.293.000.000	Rp 33.228.720.000.000	0,1624
32	HMSP	2014	Rp 10.181.083.000.000	Rp 13.498.114.000.000	0,7543
33	ICBP	2014	Rp 2.531.681.000.000	Rp 15.039.947.000.000	0,1683
34	INDF	2014	Rp 4.401.080.000.000	Rp 41.228.376.000.000	0,1067
35	KAEF	2014	Rp 236.531.070.864	Rp 1.811.143.949.913	0,1306
36	KLBF	2014	Rp 2.121.090.581.630	Rp 9.817.475.678.446	0,2161

37	MERK	2014	Rp 181.472.234.000	Rp 553.690.856.000	0,3278
38	MLBI	2014	Rp 794.883.000.000	Rp 553.797.000.000	1,4353
39	MYOR	2014	Rp 409.824.768.594	Rp 4.100.554.992.789	0,0999
40	PEHA	2014	Rp 45.437.136.000	Rp 408.249.877.000	0,1113
41	PYFA	2014	Rp 2.661.022.001	Rp 97.096.611.306	0,0274
42	ROTI	2014	Rp 188.577.521.074	Rp 960.122.354.744	0,1964
43	SIDO	2014	Rp 415.193.000.000	Rp 2.634.659.000.000	0,1576
44	SKBM	2014	Rp 89.115.994.107	Rp 317.909.776.363	0,2803
45	SKLT	2014	Rp 16.480.714.984	Rp 153.368.106.620	0,1075
46	TCID	2014	Rp 174.314.394.101	Rp 1.283.504.442.268	0,1358
47	TSPC	2014	Rp 584.293.062.124	Rp 4.132.338.998.550	0,1414
48	ULTJ	2014	Rp 283.360.914.211	Rp 2.265.097.759.730	0,1251
49	UNVR	2014	Rp 5.738.523.000.000	Rp 4.598.782.000.000	1,2478
50	WIIM	2014	Rp 112.304.822.060	Rp 854.425.098.590	0,1314
51	ADES	2015	Rp 32.839.000.000	Rp 328.369.000.000	0,1000
52	CEKA	2015	Rp 106.549.446.980	Rp 639.893.514.352	0,1665
53	CINT	2015	Rp 29.477.807.514	Rp 315.073.311.914	0,0936
54	DLTA	2015	Rp 192.045.199.000	Rp 849.621.481.000	0,2260
55	DVLA	2015	Rp 107.894.430.000	Rp 973.517.334.000	0,1108
56	GGRM	2015	Rp 6.452.834.000.000	Rp 38.007.909.000.000	0,1698
57	HMSP	2015	Rp 10.363.308.000.000	Rp 32.016.060.000.000	0,3237
58	ICBP	2015	Rp 2.923.148.000.000	Rp 16.386.911.000.000	0,1784
59	INDF	2015	Rp 3.709.501.000.000	Rp 43.121.593.000.000	0,0860
60	KAEF	2015	Rp 252.972.506.074	Rp 1.862.096.822.470	0,1359
61	KLBF	2015	Rp 2.057.694.281.873	Rp 10.938.285.985.269	0,1881
62	MERK	2015	Rp 142.545.462.000	Rp 473.543.282.000	0,3010
63	MLBI	2015	Rp 496.909.000.000	Rp 766.480.000.000	0,6483
64	MYOR	2015	Rp 1.250.233.128.560	Rp 5.194.459.927.187	0,2407
65	PEHA	2015	Rp 63.007.926.000	Rp 449.720.097.000	0,1401
66	PYFA	2015	Rp 3.087.104.465	Rp 101.222.059.197	0,0305
67	ROTI	2015	Rp 270.538.700.440	Rp 1.188.534.951.872	0,2276
68	SIDO	2015	Rp 437.475.000.000	Rp 2.796.111.000.000	0,1565
69	SKBM	2015	Rp 40.150.568.621	Rp 344.087.439.659	0,1167
70	SKLT	2015	Rp 20.066.791.849	Rp 152.044.668.111	0,1320
71	TCID	2015	Rp 544.474.278.014	Rp 1.714.871.478.033	0,3175
72	TSPC	2015	Rp 529.218.651.807	Rp 4.337.140.975.120	0,1220
73	ULTJ	2015	Rp 523.100.215.029	Rp 2.797.505.693.922	0,1870
74	UNVR	2015	Rp 5.851.805.000.000	Rp 4.827.360.000.000	1,2122
75	WIIM	2015	Rp 131.081.111.587	Rp 943.708.980.906	0,1389

76	ADES	2016	Rp 55.951.000.000	Rp 384.388.000.000	0,1456
77	CEKA	2016	Rp 249.697.013.626	Rp 887.920.113.728	0,2812
78	CINT	2016	Rp 20.619.309.858	Rp 326.429.838.956	0,0632
79	DLTA	2016	Rp 254.509.268.000	Rp 1.012.374.008.000	0,2514
80	DVLA	2016	Rp 152.083.400.000	Rp 1.079.579.612.000	0,1409
81	GGRM	2016	Rp 6.672.682.000.000	Rp 39.564.228.000.000	0,1687
82	HMSP	2016	Rp 12.762.229.000.000	Rp 34.175.014.000.000	0,3734
83	ICBP	2016	Rp 3.631.301.000.000	Rp 18.500.823.000.000	0,1963
84	INDF	2016	Rp 5.266.906.000.000	Rp 43.941.423.000.000	0,1199
85	KAEF	2016	Rp 271.597.947.663	Rp 2.271.407.409.194	0,1196
86	KLBF	2016	Rp 2.350.884.933.551	Rp 12.463.847.141.085	0,1886
87	MERK	2016	Rp 153.842.847.000	Rp 743.934.894.000	0,2068
88	MLBI	2016	Rp 982.129.000.000	Rp 820.640.000.000	1,1968
89	MYOR	2016	Rp 1.388.676.127.665	Rp 6.265.255.987.065	0,2216
90	PEHA	2016	Rp 87.002.410.000	Rp 622.080.344.000	0,1399
91	PYFA	2016	Rp 5.146.317.041	Rp 105.508.790.427	0,0488
92	ROTI	2016	Rp 279.777.368.831	Rp 1.442.751.772.026	0,1939
93	SIDO	2016	Rp 480.525.000.000	Rp 2.757.885.000.000	0,1742
94	SKBM	2016	Rp 22.545.456.050	Rp 368.389.286.646	0,0612
95	SKLT	2016	Rp 20.646.121.074	Rp 296.151.295.872	0,0697
96	TCID	2016	Rp 162.059.596.347	Rp 1.783.158.507.325	0,0909
97	TSPC	2016	Rp 545.493.536.262	Rp 4.635.273.142.692	0,1177
98	ULTJ	2016	Rp 709.825.635.742	Rp 3.489.233.494.783	0,2034
99	UNVR	2016	Rp 6.390.672.000.000	Rp 4.704.258.000.000	1,3585
100	WIIM	2016	Rp 106.290.306.868	Rp 991.093.391.804	0,1072
101	ADES	2017	Rp 38.242.000.000	Rp 423.011.000.000	0,0904
102	CEKA	2017	Rp 107.420.886.839	Rp 903.044.187.067	0,1190
103	CINT	2017	Rp 64.041.340.293	Rp 382.273.759.946	0,1675
104	DLTA	2017	Rp 279.772.635.000	Rp 1.144.645.393.000	0,2444
105	DVLA	2017	Rp 162.249.293.000	Rp 1.116.300.069.000	0,1453
106	GGRM	2017	Rp 7.755.347.000.000	Rp 42.187.664.000.000	0,1838
107	HMSP	2017	Rp 12.670.534.000.000	Rp 34.112.985.000.000	0,3714
108	ICBP	2017	Rp 3.543.173.000.000	Rp 20.324.330.000.000	0,1743
109	INDF	2017	Rp 5.145.063.000.000	Rp 46.756.724.000.000	0,1100
110	KAEF	2017	Rp 331.707.917.461	Rp 2.572.520.755.127	0,1289
111	KLBF	2017	Rp 2.453.251.410.604	Rp 13.894.031.782.689	0,1766
112	MERK	2017	Rp 144.677.294.000	Rp 615.437.441.000	0,2351
113	MLBI	2017	Rp 1.322.067.000.000	Rp 1.064.905.000.000	1,2415
114	MYOR	2017	Rp 1.630.953.830.893	Rp 7.354.346.366.072	0,2218

115	PEHA	2017	Rp 125.266.061.000	Rp 701.390.352.000	0,1786
116	PYFA	2017	Rp 7.127.402.168	Rp 108.856.000.711	0,0655
117	ROTI	2017	Rp 135.364.021.139	Rp 2.820.105.715.429	0,0480
118	SIDO	2017	Rp 533.799.000.000	Rp 2.895.865.000.000	0,1843
119	SKBM	2017	Rp 25.880.464.791	Rp 1.023.237.460.399	0,0253
120	SKLT	2017	Rp 22.970.715.348	Rp 307.569.774.228	0,0747
121	TCID	2017	Rp 179.126.382.068	Rp 1.858.326.336.424	0,0964
122	TSPC	2017	Rp 557.339.581.996	Rp 5.082.008.409.145	0,1097
123	ULTJ	2017	Rp 711.681.000.000	Rp 4.208.755.000.000	0,1691
124	UNVR	2017	Rp 7.004.562.000.000	Rp 5.173.388.000.000	1,3540
125	WIIM	2017	Rp 40.589.790.851	Rp 978.091.361.111	0,0415
126	ADES	2018	Rp 52.958.000.000	Rp 481.914.000.000	0,1099
127	CEKA	2018	Rp 92.649.656.775	Rp 976.647.575.842	0,0949
128	CINT	2018	Rp 13.554.152.161	Rp 388.678.577.828	0,0349
129	DLTA	2018	Rp 338.129.985.000	Rp 1.284.163.814.000	0,2633
130	DVLA	2018	Rp 200.651.968.000	Rp 1.200.261.863.000	0,1672
131	GGRM	2018	Rp 7.793.068.000.000	Rp 45.133.285.000.000	0,1727
132	HMSp	2018	Rp 13.538.418.000.000	Rp 35.358.253.000.000	0,3829
133	ICBP	2018	Rp 4.658.781.000.000	Rp 22.707.150.000.000	0,2052
134	INDF	2018	Rp 4.961.851.000.000	Rp 49.916.800.000.000	0,0994
135	KAEF	2018	Rp 401.792.808.948	Rp 3.356.459.729.851	0,1197
136	KLBF	2018	Rp 2.497.261.964.757	Rp 15.294.594.796.354	0,1633
137	MERK	2018	Rp 1.163.324.165.000	Rp 512.280.401.000	2,2709
138	MLBI	2018	Rp 1.224.807.000.000	Rp 1.167.536.000.000	1,0491
139	MYOR	2018	Rp 1.760.434.280.304	Rp 8.542.544.481.694	0,2061
140	PEHA	2018	Rp 133.292.514.000	Rp 789.798.337.000	0,1688
141	PYFA	2018	Rp 8.447.447.988	Rp 118.927.560.800	0,0710
142	ROTI	2018	Rp 127.171.436.363	Rp 2.916.901.120.111	0,0436
143	SIDO	2018	Rp 663.849.000.000	Rp 2.902.614.000.000	0,2287
144	SKBM	2018	Rp 15.954.632.472	Rp 1.040.576.552.571	0,0153
145	SKLT	2018	Rp 31.954.131.252	Rp 339.236.007.000	0,0942
146	TCID	2018	Rp 173.049.442.756	Rp 1.972.463.165.139	0,0877
147	TSPC	2018	Rp 540.378.145.887	Rp 5.432.848.070.494	0,0995
148	ULTJ	2018	Rp 701.607.000.000	Rp 4.774.956.000.000	0,1469
149	UNVR	2018	Rp 9.109.445.000.000	Rp 7.578.133.000.000	1,2021
150	WIIM	2018	Rp 51.142.850.919	Rp 1.005.236.802.665	0,0509

Lampiran 6

Data Komisaris Independen

No	Kode Perusahaan	Tahun	Komisaris Independen	Jumlah Dewan Komisaris	IND
1	ADES	2013	1	3	0,33
2	CEKA	2013	1	3	0,33
3	CINT	2013	1	2	0,50
4	DLTA	2013	2	6	0,33
5	DVLA	2013	3	7	0,43
6	GGRM	2013	1	3	0,33
7	HMSP	2013	3	6	0,50
8	ICBP	2013	3	7	0,43
9	INDF	2013	3	8	0,38
10	KAEF	2013	2	6	0,33
11	KLBF	2013	2	6	0,33
12	MERK	2013	1	3	0,33
13	MLBI	2013	3	7	0,43
14	MYOR	2013	2	5	0,40
15	PEHA	2013	1	4	0,25
16	PYFA	2013	1	3	0,33
17	ROTI	2013	1	3	0,33
18	SIDO	2013	1	3	0,33
19	SKBM	2013	1	3	0,33
20	SKLT	2013	1	3	0,33
21	TCID	2013	2	5	0,40
22	TSPC	2013	3	5	0,60
23	ULTJ	2013	1	3	0,33
24	UNVR	2013	4	5	0,80
25	WIIM	2013	1	3	0,33
26	ADES	2014	1	3	0,33
27	CEKA	2014	1	3	0,33
28	CINT	2014	1	2	0,50
29	DLTA	2014	2	5	0,40
30	DVLA	2014	3	7	0,43
31	GGRM	2014	2	4	0,50
32	HMSP	2014	3	6	0,50
33	ICBP	2014	3	6	0,50
34	INDF	2014	3	8	0,38
35	KAEF	2014	2	5	0,40
36	KLBF	2014	2	6	0,33

37	MERK	2014	1	3	0,33
38	MLBI	2014	4	8	0,50
39	MYOR	2014	2	5	0,40
40	PEHA	2014	1	4	0,25
41	PYFA	2014	1	3	0,33
42	ROTI	2014	1	3	0,33
43	SIDO	2014	1	3	0,33
44	SKBM	2014	1	3	0,33
45	SKLT	2014	1	3	0,33
46	TCID	2014	2	5	0,40
47	TSPC	2014	3	4	0,75
48	ULTJ	2014	1	3	0,33
49	UNVR	2014	4	5	0,80
50	WIIM	2014	1	3	0,33
51	ADES	2015	1	3	0,33
52	CEKA	2015	1	3	0,33
53	CINT	2015	1	2	0,50
54	DLTA	2015	2	5	0,40
55	DVLA	2015	2	6	0,33
56	GGRM	2015	2	4	0,50
57	HMSP	2015	2	5	0,40
58	ICBP	2015	2	6	0,33
59	INDF	2015	3	8	0,38
60	KAEF	2015	2	6	0,33
61	KLBF	2015	3	7	0,43
62	MERK	2015	1	3	0,33
63	MLBI	2015	4	7	0,57
64	MYOR	2015	2	5	0,40
65	PEHA	2015	1	3	0,33
66	PYFA	2015	2	4	0,50
67	ROTI	2015	1	3	0,33
68	SIDO	2015	1	3	0,33
69	SKBM	2015	1	3	0,33
70	SKLT	2015	1	3	0,33
71	TCID	2015	3	6	0,50
72	TSPC	2015	2	4	0,50
73	ULTJ	2015	1	3	0,33
74	UNVR	2015	4	5	0,80
75	WIIM	2015	1	3	0,33

76	ADES	2016	1	3	0,33
77	CEKA	2016	1	3	0,33
78	CINT	2016	1	2	0,50
79	DLTA	2016	2	5	0,40
80	DVLA	2016	3	7	0,43
81	GGRM	2016	2	4	0,50
82	HMSP	2016	2	5	0,40
83	ICBP	2016	3	6	0,50
84	INDF	2016	3	8	0,38
85	KAEF	2016	1	5	0,20
86	KLBF	2016	3	7	0,43
87	MERK	2016	1	3	0,33
88	MLBI	2016	4	7	0,57
89	MYOR	2016	2	5	0,40
90	PEHA	2016	1	3	0,33
91	PYFA	2016	2	4	0,50
92	ROTI	2016	1	3	0,33
93	SIDO	2016	1	3	0,33
94	SKBM	2016	1	3	0,33
95	SKLT	2016	1	3	0,33
96	TCID	2016	2	5	0,40
97	TSPC	2016	3	6	0,50
98	ULTJ	2016	1	3	0,33
99	UNVR	2016	4	5	0,80
100	WIIM	2016	1	3	0,33
101	ADES	2017	1	3	0,33
102	CEKA	2017	1	3	0,33
103	CINT	2017	1	2	0,50
104	DLTA	2017	2	5	0,40
105	DVLA	2017	3	7	0,43
106	GGRM	2017	2	4	0,50
107	HMSP	2017	3	6	0,50
108	ICBP	2017	3	6	0,50
109	INDF	2017	3	8	0,38
110	KAEF	2017	1	5	0,20
111	KLBF	2017	3	7	0,43
112	MERK	2017	1	3	0,33
113	MLBI	2017	3	6	0,50
114	MYOR	2017	2	5	0,40

115	PEHA	2017	1	3	0,33
116	PYFA	2017	2	4	0,50
117	ROTI	2017	1	3	0,33
118	SIDO	2017	1	3	0,33
119	SKBM	2017	1	3	0,33
120	SKLT	2017	1	3	0,33
121	TCID	2017	3	6	0,50
122	TSPC	2017	3	5	0,60
123	ULTJ	2017	1	3	0,33
124	UNVR	2017	4	5	0,80
125	WIIM	2017	1	3	0,33
126	ADES	2018	1	3	0,33
127	CEKA	2018	1	3	0,33
128	CINT	2018	1	2	0,50
129	DLTA	2018	2	5	0,40
130	DVLA	2018	3	7	0,43
131	GGRM	2018	2	4	0,50
132	HMSP	2018	3	7	0,43
133	ICBP	2018	3	6	0,50
134	INDF	2018	3	8	0,38
135	KAEF	2018	2	5	0,40
136	KLBF	2018	2	6	0,33
137	MERK	2018	1	2	0,50
138	MLBI	2018	3	6	0,50
139	MYOR	2018	2	5	0,40
140	PEHA	2018	2	4	0,50
141	PYFA	2018	2	4	0,50
142	ROTI	2018	1	3	0,33
143	SIDO	2018	2	5	0,40
144	SKBM	2018	1	3	0,33
145	SKLT	2018	1	3	0,33
146	TCID	2018	2	5	0,40
147	TSPC	2018	3	5	0,60
148	ULTJ	2018	1	3	0,33
149	UNVR	2018	4	5	0,80
150	WIIM	2018	1	3	0,33

Lampiran 7

Data Sampel Penelitian

No	Kode Perusahaan	Tahun	Size	DER	ROE	IND	ETR
1	ADES	2013	26,81	0,67	0,21	0,33	0,06
2	CEKA	2013	27,70	1,02	0,12	0,33	0,25
3	CINT	2013	26,30	0,42	0,23	0,50	0,18
4	DLTA	2013	27,49	0,28	0,43	0,33	0,25
5	DVLA	2013	27,81	0,30	0,14	0,43	0,28
6	GGRM	2013	31,56	0,73	0,15	0,33	0,26
7	HMSP	2013	30,94	0,94	0,76	0,50	0,25
8	ICBP	2013	30,69	0,60	0,17	0,43	0,25
9	INDF	2013	31,99	1,04	0,09	0,38	0,27
10	KAEF	2013	28,54	0,52	0,13	0,33	0,24
11	KLBF	2013	30,06	0,33	0,23	0,33	0,23
12	MERK	2013	27,27	0,07	0,34	0,33	0,25
13	MLBI	2013	28,21	0,80	1,19	0,43	0,26
14	MYOR	2013	29,90	1,47	0,26	0,40	0,25
15	PEHA	2013	27,19	0,64	0,11	0,25	0,25
16	PYFA	2013	25,89	0,86	0,07	0,33	0,27
17	ROTI	2013	28,23	1,32	0,20	0,33	0,25
18	SIDO	2013	28,71	0,12	0,15	0,33	0,30
19	SKBM	2013	26,93	1,47	0,29	0,33	0,26
20	SKLT	2013	26,43	1,16	0,08	0,33	0,31
21	TCID	2013	28,01	0,15	0,14	0,40	0,27
22	TSPC	2013	29,32	0,40	0,17	0,60	0,23
23	ULTJ	2013	28,66	0,40	0,16	0,33	0,26
24	UNVR	2013	30,22	2,14	1,26	0,80	0,25
25	WIIM	2013	27,84	0,57	0,17	0,33	0,24
26	ADES	2014	26,95	0,71	0,10	0,33	0,25
27	CEKA	2014	27,88	1,39	0,08	0,33	0,28
28	CINT	2014	26,62	0,25	0,09	0,50	0,29
29	DLTA	2014	27,62	0,30	0,35	0,40	0,24
30	DVLA	2014	27,84	0,28	0,08	0,43	0,24
31	GGRM	2014	31,70	0,75	0,16	0,50	0,25
32	HMSP	2014	30,98	1,10	0,75	0,50	0,26
33	ICBP	2014	30,85	0,66	0,17	0,50	0,25
34	INDF	2014	32,08	1,08	0,11	0,38	0,29
35	KAEF	2014	28,72	0,64	0,13	0,40	0,25
36	KLBF	2014	30,15	0,27	0,22	0,33	0,23

37	MERK	2014	27,30	0,29	0,33	0,33	0,27
38	MLBI	2014	28,43	3,03	1,44	0,50	0,26
39	MYOR	2014	29,96	1,51	0,10	0,40	0,23
40	PEHA	2014	27,18	0,56	0,11	0,25	0,27
41	PYFA	2014	25,88	0,78	0,03	0,33	0,37
42	ROTI	2014	28,39	1,90	0,20	0,33	0,25
43	SIDO	2014	28,67	0,07	0,16	0,33	0,20
44	SKBM	2014	27,20	1,04	0,28	0,33	0,19
45	SKLT	2014	26,53	1,16	0,11	0,33	0,30
46	TCID	2014	28,25	0,44	0,14	0,40	0,27
47	TSPC	2014	29,35	0,35	0,14	0,75	0,21
48	ULTJ	2014	28,70	0,29	0,13	0,33	0,25
49	UNVR	2014	30,29	2,11	1,25	0,80	0,25
50	WIIM	2014	27,92	0,56	0,13	0,33	0,25
51	ADES	2015	27,21	0,99	0,10	0,33	0,26
52	CEKA	2015	28,03	1,32	0,17	0,33	0,25
53	CINT	2015	26,67	0,21	0,09	0,50	0,28
54	DLTA	2015	27,67	0,22	0,23	0,40	0,23
55	DVLA	2015	27,95	0,41	0,11	0,33	0,25
56	GGRM	2015	31,78	0,67	0,17	0,50	0,25
57	HMSp	2015	31,27	0,19	0,32	0,40	0,26
58	ICBP	2015	30,91	0,62	0,18	0,33	0,27
59	INDF	2015	32,15	1,13	0,09	0,38	0,35
60	KAEF	2015	28,81	0,74	0,14	0,33	0,25
61	KLBF	2015	30,25	0,25	0,19	0,43	0,24
62	MERK	2015	27,19	0,35	0,30	0,33	0,27
63	MLBI	2015	28,37	1,74	0,65	0,57	0,26
64	MYOR	2015	30,06	1,18	0,24	0,40	0,24
65	PEHA	2015	27,25	0,51	0,14	0,33	0,27
66	PYFA	2015	25,80	0,58	0,03	0,50	0,32
67	ROTI	2015	28,63	1,28	0,23	0,33	0,28
68	SIDO	2015	28,66	0,07	0,16	0,33	0,22
69	SKBM	2015	27,36	1,22	0,12	0,33	0,25
70	SKLT	2015	26,66	1,48	0,13	0,33	0,27
71	TCID	2015	28,36	0,21	0,32	0,50	0,07
72	TSPC	2015	29,47	0,45	0,12	0,50	0,25
73	ULTJ	2015	28,90	0,27	0,19	0,33	0,25
74	UNVR	2015	30,39	2,26	1,21	0,80	0,25
75	WIIM	2015	27,93	0,42	0,14	0,33	0,26

76	ADES	2016	27,37	1,00	0,15	0,33	0,09
77	CEKA	2016	27,99	0,61	0,28	0,33	0,13
78	CINT	2016	26,71	0,22	0,06	0,50	0,27
79	DLTA	2016	27,81	0,18	0,25	0,40	0,22
80	DVLA	2016	28,06	0,42	0,14	0,43	0,29
81	GGRM	2016	31,77	0,59	0,17	0,50	0,25
82	HMSP	2016	31,38	0,24	0,37	0,40	0,25
83	ICBP	2016	30,99	0,56	0,20	0,50	0,27
84	INDF	2016	32,04	0,87	0,12	0,38	0,34
85	KAEF	2016	29,16	1,03	0,12	0,20	0,29
86	KLBF	2016	30,35	0,22	0,19	0,43	0,24
87	MERK	2016	27,34	0,22	0,21	0,33	0,28
88	MLBI	2016	28,45	1,77	1,20	0,57	0,26
89	MYOR	2016	30,19	1,06	0,22	0,40	0,25
90	PEHA	2016	27,51	0,42	0,14	0,33	0,29
91	PYFA	2016	25,84	0,58	0,05	0,50	0,27
92	ROTI	2016	28,70	1,02	0,19	0,33	0,24
93	SIDO	2016	28,73	0,08	0,17	0,33	0,24
94	SKBM	2016	27,63	1,72	0,06	0,33	0,27
95	SKLT	2016	27,07	0,92	0,07	0,33	0,18
96	TCID	2016	28,41	0,23	0,09	0,40	0,27
97	TSPC	2016	29,52	0,42	0,12	0,50	0,24
98	ULTJ	2016	29,08	0,21	0,20	0,33	0,24
99	UNVR	2016	30,45	2,56	1,36	0,80	0,25
100	WIIM	2016	27,93	0,37	0,11	0,33	0,22
101	ADES	2017	27,46	0,99	0,09	0,33	0,25
102	CEKA	2017	27,96	0,54	0,12	0,33	0,25
103	CINT	2017	26,89	0,25	0,17	0,50	0,23
104	DLTA	2017	27,92	0,17	0,24	0,40	0,24
105	DVLA	2017	28,13	0,47	0,15	0,43	0,28
106	GGRM	2017	31,83	0,58	0,18	0,50	0,26
107	HMSP	2017	31,40	0,26	0,37	0,50	0,25
108	ICBP	2017	31,08	0,56	0,17	0,50	0,32
109	INDF	2017	32,11	0,88	0,11	0,38	0,33
110	KAEF	2017	29,44	1,37	0,13	0,20	0,26
111	KLBF	2017	30,44	0,20	0,18	0,43	0,24
112	MERK	2017	27,46	0,38	0,24	0,33	0,30
113	MLBI	2017	28,55	1,36	1,24	0,50	0,26
114	MYOR	2017	30,33	1,03	0,22	0,40	0,25

115	PEHA	2017	27,79	0,68	0,18	0,33	0,27
116	PYFA	2017	25,80	0,47	0,07	0,50	0,26
117	ROTI	2017	29,15	0,62	0,05	0,33	0,27
118	SIDO	2017	28,78	0,09	0,18	0,33	0,22
119	SKBM	2017	28,12	0,59	0,03	0,33	0,19
120	SKLT	2017	27,18	1,07	0,07	0,33	0,16
121	TCID	2017	28,49	0,27	0,10	0,50	0,26
122	TSPC	2017	29,64	0,46	0,11	0,60	0,25
123	ULTJ	2017	29,28	0,23	0,17	0,33	0,31
124	UNVR	2017	30,57	2,65	1,35	0,80	0,25
125	WIIM	2017	27,83	0,25	0,04	0,33	0,26
126	ADES	2018	27,50	0,83	0,11	0,33	0,24
127	CEKA	2018	27,79	0,20	0,09	0,33	0,25
128	CINT	2018	26,92	0,26	0,03	0,50	0,39
129	DLTA	2018	28,05	0,19	0,26	0,40	0,23
130	DVLA	2018	28,15	0,40	0,17	0,43	0,26
131	GGRM	2018	31,87	0,53	0,17	0,50	0,26
132	HMSP	2018	31,47	0,32	0,38	0,43	0,25
133	ICBP	2018	31,17	0,51	0,21	0,50	0,28
134	INDF	2018	32,20	0,93	0,10	0,38	0,33
135	KAEF	2018	29,88	1,82	0,12	0,40	0,30
136	KLBF	2018	30,53	0,19	0,16	0,33	0,24
137	MERK	2018	27,86	1,44	2,27	0,50	0,26
138	MLBI	2018	28,69	1,47	1,05	0,50	0,27
139	MYOR	2018	30,50	1,06	0,21	0,40	0,26
140	PEHA	2018	28,27	1,37	0,17	0,50	0,25
141	PYFA	2018	25,95	0,57	0,07	0,50	0,25
142	ROTI	2018	29,11	0,51	0,04	0,33	0,32
143	SIDO	2018	28,84	0,15	0,23	0,40	0,24
144	SKBM	2018	28,20	0,70	0,02	0,33	0,24
145	SKLT	2018	27,34	1,20	0,09	0,33	0,19
146	TCID	2018	28,53	0,24	0,09	0,40	0,26
147	TSPC	2018	29,69	0,45	0,10	0,60	0,26
148	ULTJ	2018	29,35	0,16	0,15	0,33	0,26
149	UNVR	2018	30,60	1,58	1,20	0,80	0,25
150	WIIM	2018	27,86	0,25	0,05	0,33	0,28

Lampiran 8
Hasil Pengujian SPSS

Hasil Output SPSS 25 Sebelum Penghilangan Outlier

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	IND, SIZE, DER, ROE ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: ETR

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,202 ^a	,041	,014	,042200	1,655

a. Predictors: (Constant), IND, SIZE, DER, ROE

b. Dependent Variable: ETR

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,011	4	,003	1,546	,192 ^b
	Residual	,258	145	,002		
	Total	,269	149			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), IND, SIZE, DER, ROE

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,143	,061		2,325	,021		
	SIZE	,003	,002	,135	1,570	,119	,896	1,115
	DER	,010	,007	,132	1,322	,188	,665	1,503
	ROE	-,023	,014	-,186	-1,658	,099	,525	1,906
	IND	,024	,036	,068	,665	,507	,632	1,583

a. Dependent Variable: ETR

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition		Variance Proportions				
			Index	(Constant)	SIZE	DER	ROE	IND	
1	1	4,227	1,000	,00	,00	,01	,01	,00	
	2	,544	2,787	,00	,00	,04	,38	,00	
	3	,191	4,708	,00	,00	,95	,36	,01	
	4	,037	10,729	,01	,01	,00	,26	,95	
	5	,002	52,628	,99	,99	,00	,00	,04	

a. Dependent Variable: ETR

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	,21413	,27302	,25409	,008596	150
Residual	-,185965	,135588	,000000	,041630	150
Std. Predicted Value	-4,650	2,202	,000	1,000	150
Std. Residual	-4,407	3,213	,000	,986	150

a. Dependent Variable: ETR

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
	Unstandardized Residual	150	100,0%	0	0,0%	150

Descriptives

		Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	Mean	,0000000	,00339906
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	-,0067166	
	Upper Bound	,0067166	
	5% Trimmed Mean	,0021032	
	Median	-,0018506	
	Variance	,002	
	Std. Deviation	,04162982	
	Minimum	-,18596	
	Maximum	,13559	
	Range	,32155	
	Interquartile Range	,03118	
	Skewness	-1,257	,198
	Kurtosis	6,544	,394

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,183	150	,000	,852	150	,000

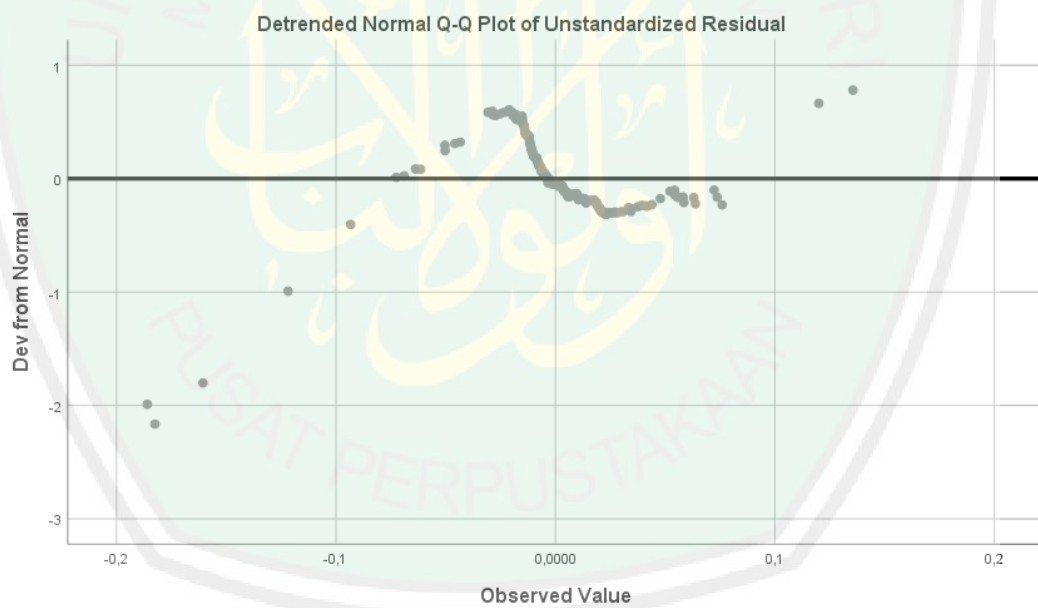
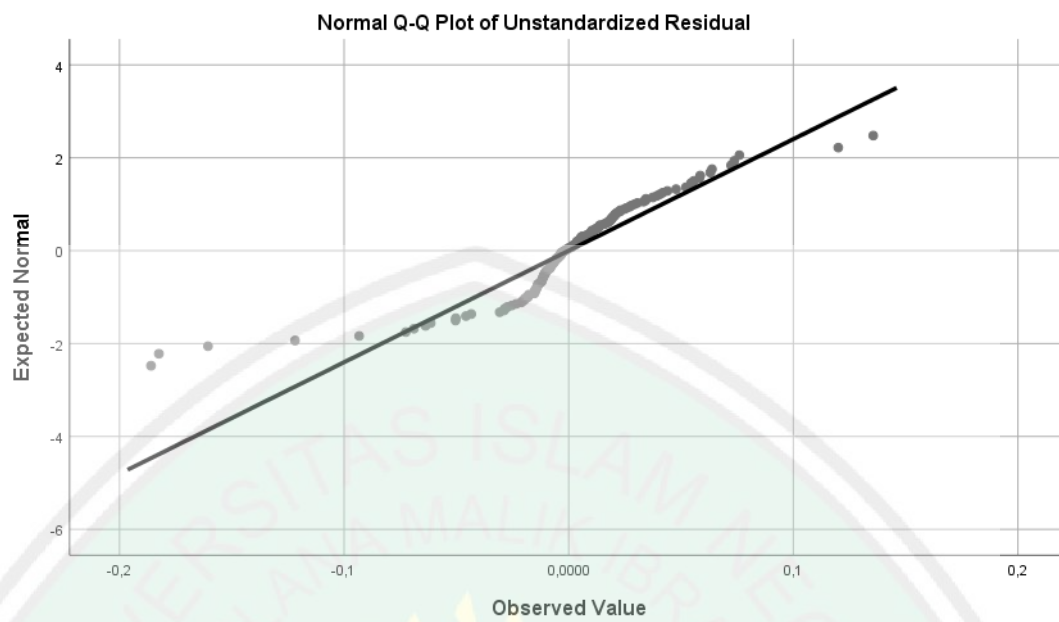
a. Lilliefors Significance Correction

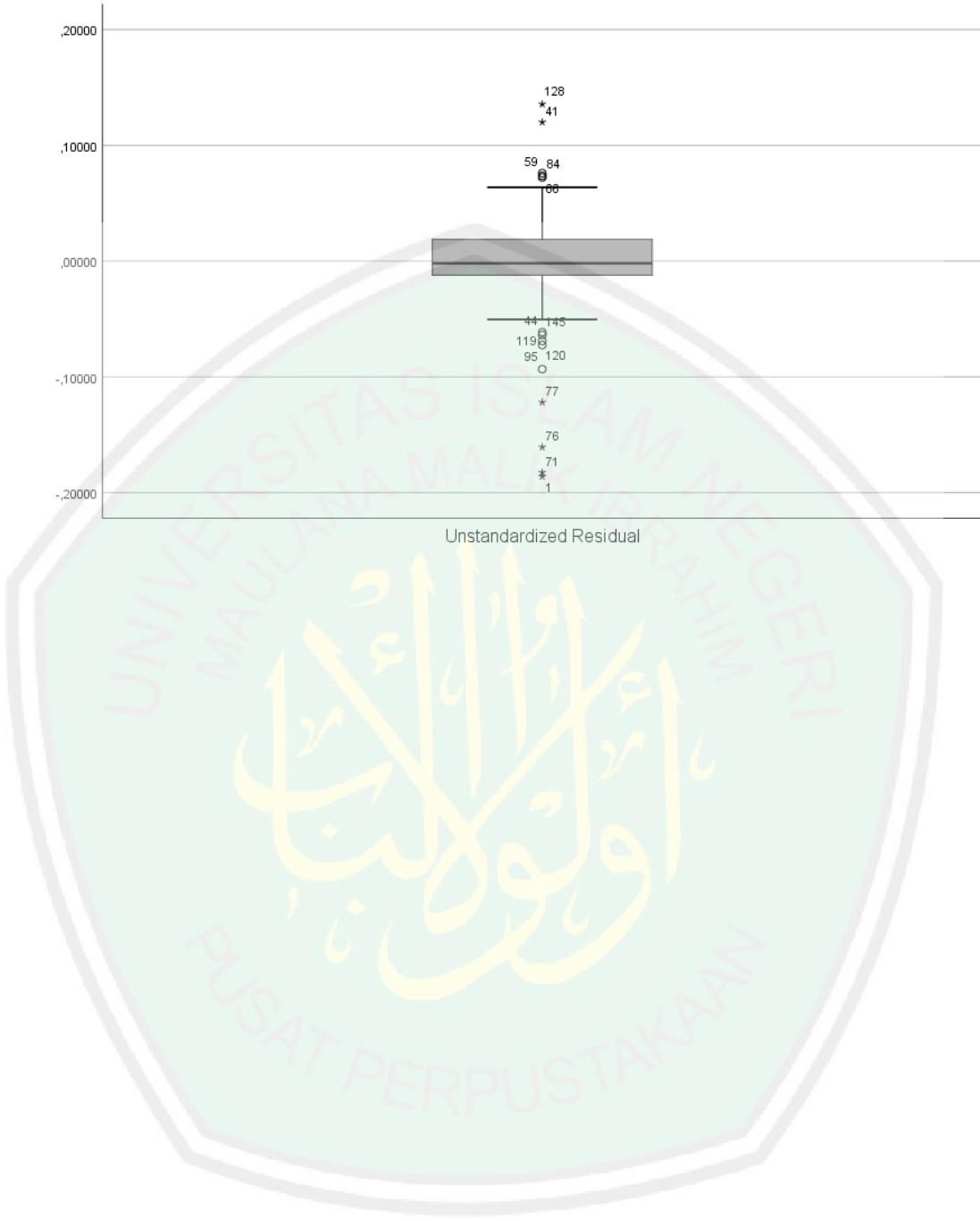
Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot

```

Frequency      Stem & Leaf
          9,00 Extremes      (= <-,061)
                2,00      -5 . 00
                2,00      -4 . 35
                1,00      -3 . 0
                7,00      -2 . 0135788
29,00      -1 . 00000111111122333444555577899
28,00      -0 . 0012233333444555666777788899
          20,00           0 . 0112333334555568899
          18,00           1 . 000123333567788999
          11,00           2 . 00112345779
           6,00           3 . 034479
           4,00           4 . 0137
           6,00           5 . 244588
           2,00           6 . 33
           5,00 Extremes      (>=,072)

Stem width:      ,01000
Each leaf:      1 case(s)
    
```





Hasil Output SPSS 25 Setelah Penghilangan Outlier (1)

Regression

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,005	4	,001	2,270	,065 ^b
	Residual	,068	131	,001		
	Total	,072	135			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,227	,036		6,296	,000		
	X1	,001	,001	,069	,769	,443	,882	1,134
	X2	,011	,004	,289	2,731	,007	,639	1,566
	X3	-,016	,008	-,248	-2,097	,038	,513	1,951
	X4	-,005	,020	-,026	-,240	,810	,611	1,636

a. Dependent Variable: Y

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	X1	X2	X3	X4
1	1	4,224	1,000	,00	,00	,01	,01	,00
	2	,548	2,777	,00	,00	,05	,34	,00
	3	,189	4,729	,00	,00	,94	,41	,01
	4	,038	10,564	,01	,01	,00	,24	,93
	5	,001	54,928	,99	,99	,00	,00	,05

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	,23286	,27400	,25806	,005893	136
Residual	-,071758	,067232	,000000	,022381	136
Std. Predicted Value	-4,276	2,705	,000	1,000	136
Std. Residual	-3,158	2,959	,000	,985	136

a. Dependent Variable: Y

Explore**Case Processing Summary**

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
	Unstandardized Residual	136	90,7%	14	9,3%	150

Descriptives

			Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	Mean		,0000000	,00191914
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-,0037955	
		Upper Bound	,0037955	
	5% Trimmed Mean		-,0006722	
	Median		-,0037559	
	Variance		,001	
	Std. Deviation		,02238080	
	Minimum		-,07176	
	Maximum		,06723	
	Range		,13899	
	Interquartile Range		,02561	
	Skewness		,538	,208
	Kurtosis		1,375	,413

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,115	136	,000	,955	136	,000

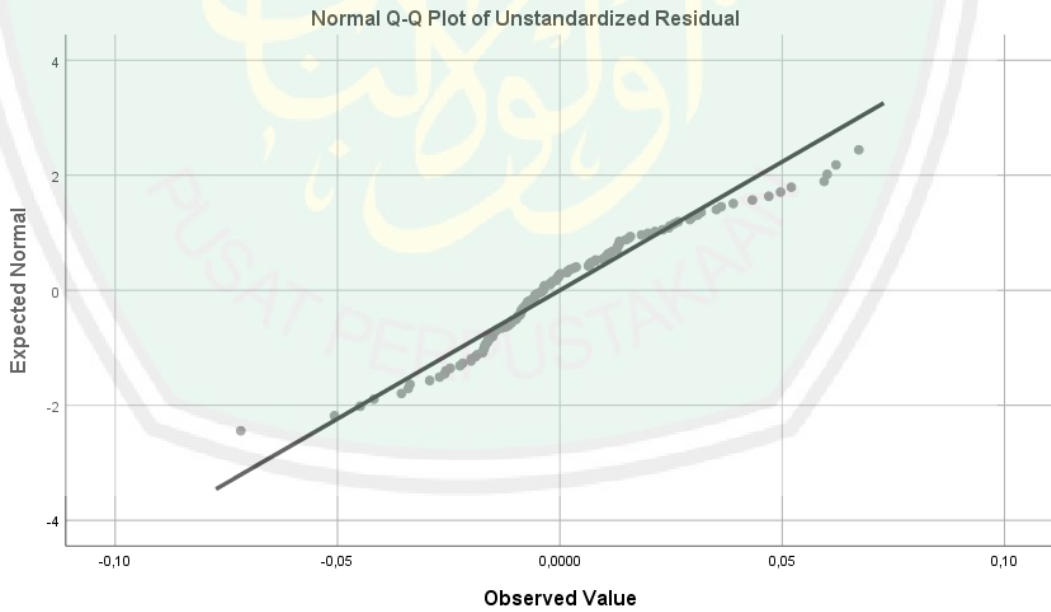
a. Lilliefors Significance Correction

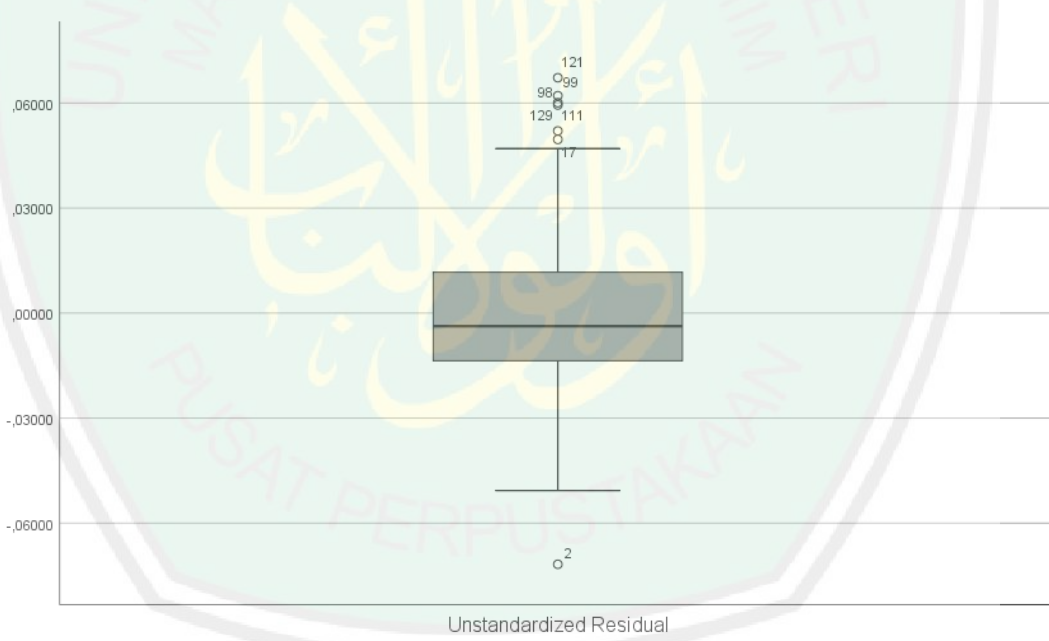
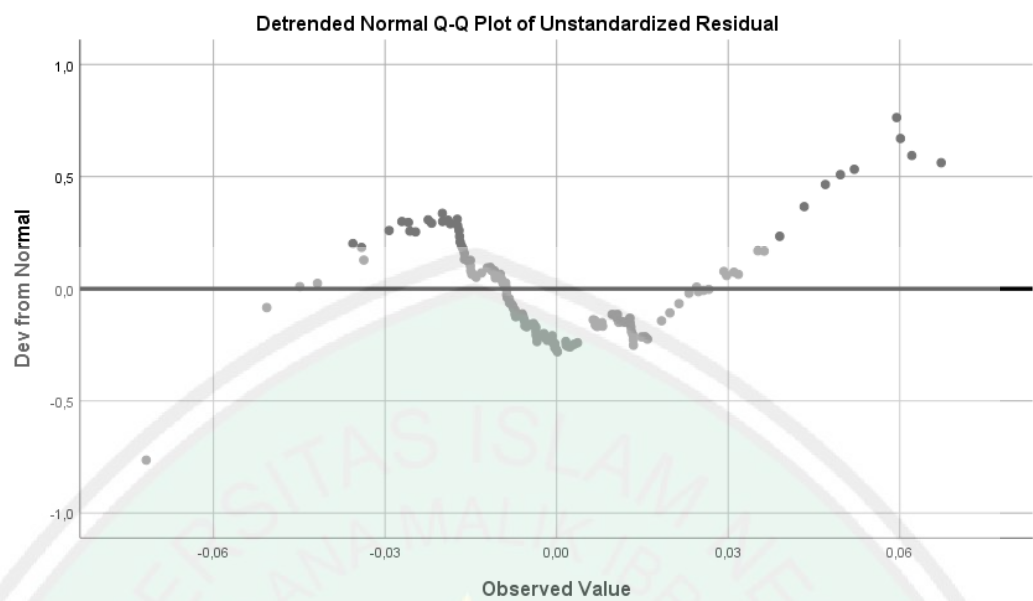
Unstandardized Residual

Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot

Frequency	Stem	Leaf
1,00	Extremes	(= $-\infty$, 072)
1,00	-5	. 0
2,00	-4	. 14
3,00	-3	. 345
7,00	-2	. 1245579
27,00	-1	. 00011234445555666667778899
42,00	0	. 00000011223333334455556677778888889999
14,00	0	. 01112336667789
18,00	1	. 0000112222333345589
8,00	2	. 13445699
5,00	3	. 01568
2,00	4	. 36
6,00	Extremes	(\geq 0,050)

Stem width: ,01000
Each leaf: 1 case(s)





Hasil Output SPSS 25 Setelah Penghilangan Outlier (2) dan Data Sudah Berdistribusi Normal

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	IND, SIZE, DER, ROE ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: ETR

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,332 ^a	,110	,082	,017649	2,012

a. Predictors: (Constant), IND, SIZE, DER, ROE

b. Dependent Variable: ETR

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,005	4	,001	3,841	,006 ^b
	Residual	,039	124	,000		
	Total	,043	128			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), IND, SIZE, DER, ROE

		Coefficients^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,302	,030		10,234	,000		
	SIZE	-,002	,001	-,134	-1,488	,139	,886	1,129
	DER	,011	,003	,363	3,425	,001	,637	1,569
	ROE	-,009	,006	-,178	-1,478	,142	,495	2,020
	IND	-,014	,017	-,093	-,852	,396	,598	1,673

a. Dependent Variable: ETR

		Collinearity Diagnostics^a						
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	SIZE	DER	ROE	IND
1	1	4,230	1,000	,00	,00	,01	,01	,00
	2	,546	2,783	,00	,00	,05	,33	,00
	3	,189	4,735	,00	,00	,94	,40	,01
	4	,034	11,135	,01	,01	,00	,27	,94
	5	,001	56,241	,99	,99	,00	,00	,04

a. Dependent Variable: ETR

		Residuals Statistics^a				
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
	Predicted Value	,24448	,27183	,25583	,006115	129
	Residual	-,048937	,043658	,000000	,017371	129
	Std. Predicted Value	-1,856	2,617	,000	1,000	129
	Std. Residual	-2,773	2,474	,000	,984	129

a. Dependent Variable: ETR

Explore

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Unstandardized Residual	129	100,0%	0	0,0%	129	100,0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	Mean	,0000000	,00152943
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	-,0030262	
	Upper Bound	,0030262	
	5% Trimmed Mean	-,0001102	
	Median	-,0003636	
	Variance	,000	
	Std. Deviation	,01737101	
	Minimum	-,04894	
	Maximum	,04366	
	Range	,09259	
	Interquartile Range	,02140	
	Skewness	,186	,213
	Kurtosis	,274	,423

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,066	129	,200 [*]	,985	129	,187

*. This is a lower bound of the true significance.

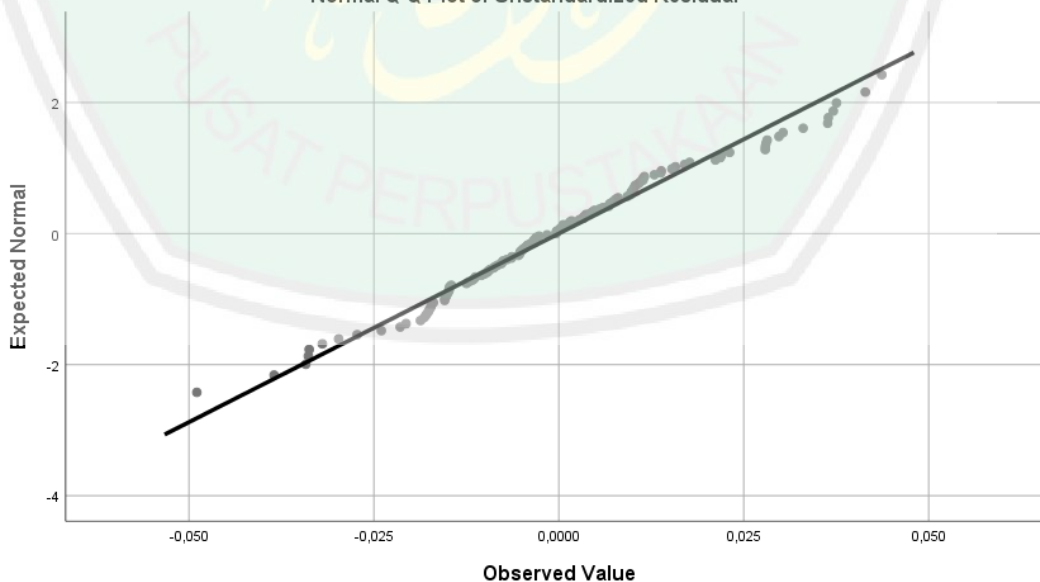
a. Lilliefors Significance Correction

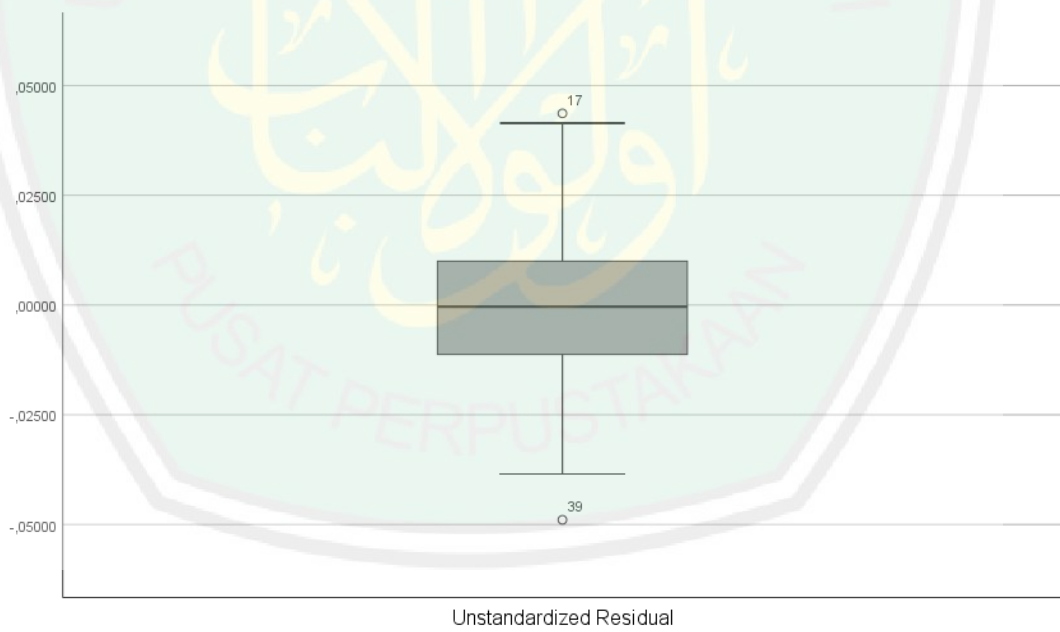
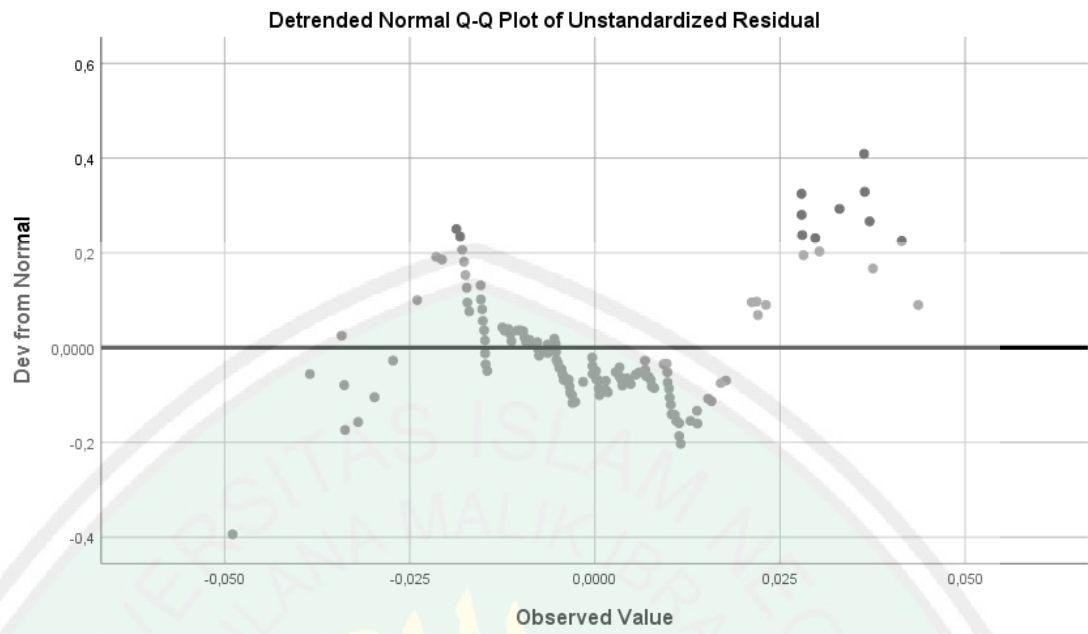
Unstandardized Residual

Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot

Frequency	Stem & Leaf
1,00	Extremes (= $-,049$)
1,00	-3 . 8
4,00	-3 . 1334
2,00	-2 . 79
3,00	-2 . 013
12,00	-1 . 555567777788
12,00	-1 . 001112244444
16,00	-0 . 5555667777888999
16,00	-0 . 0001233333344444
16,00	0 . 0000011123333444
13,00	0 . 5566677789999
12,00	1 . 000000111233
4,00	1 . 5567
4,00	2 . 1123
5,00	2 . 77889
2,00	3 . 03
4,00	3 . 6677
1,00	4 . 1
1,00	Extremes ($\geq,044$)
Stem width: ,01000	
Each leaf: 1 case(s)	

Normal Q-Q Plot of Unstandardized Residual





Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LN_IND, LN_DER, LN_SIZE, LN_ROE ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: LN_RESID

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,276 ^a	,076	,047	2,25264

a. Predictors: (Constant), LN_IND, LN_DER, LN_SIZE, LN_ROE

b. Dependent Variable: LN_RESID

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	52,072	4	13,018	2,565	,041 ^b
	Residual	629,225	124	5,074		
	Total	681,298	128			

a. Dependent Variable: LN_RESID

b. Predictors: (Constant), LN_IND, LN_DER, LN_SIZE, LN_ROE

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,884	13,822		,570	,569
	LN_SIZE	-5,649	4,029	-,131	-1,402	,163
	LN_DER	-,068	,250	-,025	-,273	,785
	LN_ROE	-,156	,285	-,057	-,547	,585
	LN_IND	-1,405	,905	-,158	-1,553	,123

a. Dependent Variable: LN_RESID

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-11,2372	-8,4422	-9,5102	,63782	129
Std. Predicted Value	-2,708	1,674	,000	1,000	129
Standard Error of Predicted Value	,223	,729	,427	,120	129
Adjusted Predicted Value	-11,3413	-8,2854	-9,5070	,65425	129
Residual	-7,42653	3,67445	,00000	2,21717	129
Std. Residual	-3,297	1,631	,000	,984	129
Stud. Residual	-3,364	1,700	-,001	1,006	129
Deleted Residual	-7,73389	3,99084	-,00319	2,31804	129
Stud. Deleted Residual	-3,515	1,713	-,007	1,027	129
Mahal. Distance	,260	12,412	3,969	2,822	129
Cook's Distance	,000	,170	,009	,025	129
Centered Leverage Value	,002	,097	,031	,022	129

a. Dependent Variable: LN_RESID

Tabel Sampel Penelitian dengan Pembeda Data Outlier dan Data Normal

No	Kode Perusahaan	Tahun	Size	DER	ROE	IND	ETR
1	ADES	2013	26,812	0,666	0,210	0,333	0,060
2	CEKA	2013	27,698	1,025	0,123	0,333	0,248
3	CINT	2013	26,295	0,420	0,228	0,000	0,183
4	DLTA	2013	27,488	0,282	0,426	0,333	0,245
5	DVLA	2013	27,805	0,301	0,138	0,429	0,284
6	GGRM	2013	31,558	0,726	0,149	0,333	0,261
7	HMSP	2013	30,942	0,936	0,764	0,500	0,254
8	ICBP	2013	30,688	0,603	0,168	0,429	0,247
9	INDF	2013	31,989	1,035	0,089	0,375	0,268
10	KAEF	2013	28,536	0,522	0,133	0,333	0,241
11	KLBF	2013	30,057	0,331	0,232	0,333	0,234
12	MERK	2013	27,270	0,072	0,343	0,333	0,252
13	MLBI	2013	28,209	0,805	1,186	0,429	0,257
14	MYOR	2013	29,904	1,465	0,257	0,400	0,253
15	PEHA	2013	27,189	0,640	0,108	0,250	0,250
16	PYFA	2013	25,889	0,865	0,066	0,333	0,271
17	ROTI	2013	28,231	1,315	0,201	0,333	0,250
18	SIDO	2013	28,713	0,124	0,155	0,333	0,303
19	SKBM	2013	26,933	1,474	0,290	0,333	0,256
20	SKLT	2013	26,434	1,162	0,082	0,333	0,311
21	TCID	2013	28,014	0,155	0,136	0,400	0,266
22	TSPC	2013	29,319	0,400	0,165	0,600	0,231
23	ULTJ	2013	28,665	0,395	0,161	0,333	0,256
24	UNVR	2013	30,222	2,137	1,258	0,800	0,252
25	WIIM	2013	27,837	0,573	0,169	0,333	0,243
26	ADES	2014	26,948	0,707	0,105	0,333	0,253
27	CEKA	2014	27,881	1,389	0,076	0,333	0,279
28	CINT	2014	26,623	0,252	0,087	0,500	0,292
29	DLTA	2014	27,623	0,298	0,354	0,400	0,241
30	DVLA	2014	27,843	0,285	0,084	0,429	0,236
31	GGRM	2014	31,695	0,752	0,162	0,500	0,251
32	HMSP	2014	30,977	1,103	0,754	0,500	0,258
33	ICBP	2014	30,846	0,656	0,168	0,500	0,253
34	INDF	2014	32,085	1,084	0,107	0,375	0,293
35	KAEF	2014	28,719	0,639	0,131	0,400	0,251
36	KLBF	2014	30,151	0,266	0,216	0,333	0,233

37	MERK	2014	27,298	0,294	0,328	0,333	0,267
38	MLBI	2014	28,433	3,029	1,435	0,500	0,263
39	MYOR	2014	29,962	1,510	0,100	0,400	0,226
40	PEHA	2014	27,182	0,563	0,111	0,250	0,265
41	PYFA	2014	25,875	0,777	0,027	0,333	0,368
42	ROTI	2014	28,393	1,904	0,196	0,333	0,254
43	SIDO	2014	28,668	0,071	0,158	0,333	0,202
44	SKBM	2014	27,200	1,043	0,280	0,333	0,188
45	SKLT	2014	26,527	1,162	0,107	0,333	0,300
46	TCID	2014	28,248	0,444	0,136	0,400	0,272
47	TSPC	2014	29,352	0,353	0,141	0,750	0,213
48	ULTJ	2014	28,702	0,288	0,125	0,333	0,245
49	UNVR	2014	30,290	2,105	1,248	0,800	0,252
50	WIIM	2014	27,918	0,560	0,131	0,333	0,249
51	ADES	2015	27,205	0,989	0,100	0,333	0,257
52	CEKA	2015	28,027	1,322	0,167	0,333	0,251
53	CINT	2015	26,671	0,215	0,094	0,500	0,277
54	DLTA	2015	27,669	0,222	0,226	0,400	0,232
55	DVLA	2015	27,950	0,414	0,111	0,333	0,253
56	GGRM	2015	31,782	0,671	0,170	0,500	0,253
57	HMSP	2015	31,269	0,187	0,324	0,400	0,256
58	ICBP	2015	30,910	0,621	0,178	0,333	0,271
59	INDF	2015	32,151	1,130	0,086	0,375	0,349
60	KAEF	2015	28,805	0,738	0,136	0,333	0,252
61	KLBF	2015	30,248	0,252	0,188	0,429	0,244
62	MERK	2015	27,187	0,355	0,301	0,333	0,265
63	MLBI	2015	28,373	1,741	0,648	0,571	0,264
64	MYOR	2015	30,060	1,184	0,241	0,400	0,238
65	PEHA	2015	27,246	0,514	0,140	0,333	0,268
66	PYFA	2015	25,798	0,580	0,030	0,500	0,322
67	ROTI	2015	28,627	1,277	0,228	0,333	0,285
68	SIDO	2015	28,659	0,071	0,156	0,333	0,219
69	SKBM	2015	27,362	1,222	0,117	0,333	0,251
70	SKLT	2015	26,656	1,480	0,132	0,333	0,267
71	TCID	2015	28,364	0,214	0,318	0,500	0,066
72	TSPC	2015	29,469	0,449	0,122	0,500	0,252
73	ULTJ	2015	28,895	0,265	0,187	0,333	0,253
74	UNVR	2015	30,387	2,258	1,212	0,800	0,253
75	WIIM	2015	27,926	0,423	0,139	0,333	0,263

76	ADES	2016	27,366	0,997	0,146	0,333	0,092
77	CEKA	2016	27,986	0,606	0,281	0,333	0,126
78	CINT	2016	26,713	0,223	0,063	0,500	0,268
79	DLTA	2016	27,812	0,183	0,251	0,400	0,222
80	DVLA	2016	28,057	0,418	0,141	0,429	0,291
81	GGRM	2016	31,773	0,589	0,169	0,500	0,253
82	HMSP	2016	31,381	0,244	0,373	0,400	0,250
83	ICBP	2016	30,995	0,562	0,196	0,500	0,272
84	INDF	2016	32,040	0,870	0,120	0,375	0,343
85	KAEF	2016	29,160	1,031	0,120	0,200	0,291
86	KLBF	2016	30,354	0,222	0,189	0,429	0,239
87	MERK	2016	27,335	0,217	0,207	0,333	0,284
88	MLBI	2016	28,453	1,772	1,197	0,571	0,256
89	MYOR	2016	30,190	1,063	0,222	0,400	0,248
90	PEHA	2016	27,507	0,420	0,140	0,333	0,285
91	PYFA	2016	25,842	0,583	0,049	0,500	0,270
92	ROTI	2016	28,702	1,024	0,194	0,333	0,243
93	SIDO	2016	28,725	0,083	0,174	0,333	0,236
94	SKBM	2016	27,633	1,719	0,061	0,333	0,268
95	SKLT	2016	27,066	0,919	0,070	0,333	0,180
96	TCID	2016	28,413	0,225	0,091	0,400	0,268
97	TSPC	2016	29,516	0,421	0,118	0,500	0,241
98	ULTJ	2016	29,075	0,215	0,203	0,333	0,239
99	UNVR	2016	30,449	2,560	1,358	0,800	0,254
100	WIIM	2016	27,934	0,366	0,107	0,333	0,222
101	ADES	2017	27,457	0,986	0,090	0,333	0,252
102	CEKA	2017	27,962	0,542	0,119	0,333	0,250
103	CINT	2017	26,890	0,247	0,168	0,500	0,226
104	DLTA	2017	27,924	0,171	0,244	0,400	0,242
105	DVLA	2017	28,126	0,470	0,145	0,429	0,283
106	GGRM	2017	31,832	0,582	0,184	0,500	0,257
107	HMSP	2017	31,395	0,265	0,371	0,500	0,250
108	ICBP	2017	31,085	0,556	0,174	0,500	0,319
109	INDF	2017	32,108	0,881	0,110	0,375	0,328
110	KAEF	2017	29,439	1,370	0,129	0,200	0,262
111	KLBF	2017	30,441	0,196	0,177	0,429	0,243
112	MERK	2017	27,465	0,376	0,235	0,333	0,297
113	MLBI	2017	28,551	1,357	1,241	0,500	0,257
114	MYOR	2017	30,333	1,028	0,222	0,400	0,254



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., MSA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Sherli Juliani
NIM : 15520128
Handphone : 085100745726
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Email : sherlijuliani28@gmail.com

Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Pada Perusahaan Industri Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Dalam Bei Periode 2013-2018)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
7%	5%	1%	14%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Mei 2019
UP2M

Zuraidah, SE., MSA
19761210 200912 2 001

Ssee

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

4%

2

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Student Paper

1%

3

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

1%

4

gcafeb.binadarma.ac.id

Internet Source

1%

5

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

6

pt.scribd.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



Lampiran 10

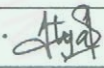
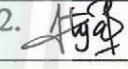
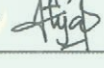
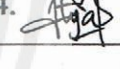
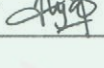
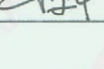
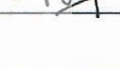
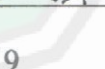
BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Sherli Juliani

NIM/Prodi : 15520128 / Akuntansi

Pembimbing : Ditya Permatasari, MSA.Ak

Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi pada Perusahaan Industri Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar dalam BEI Periode 2013-2018)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	05 Okt 2018	Pengajuan <i>Outline</i>	1. 
2.	30 Nov 2018	Proposal Bab I-III	2. 
3.	18 Des 2018	Revisi Proposal Bab I –III	3. 
4.	10 Jan 2019	Acc Proposal	4. 
5.	15 Feb 2019	Seminar Proposal	5. 
6.	4 Apr 2019	Bab IV	6. 
7.	16 Apr 2019	Revisi Bab IV	7. 
8.	08 Mei 2019	Bab V dan Acc Ujian Skripsi	8. 
9.	23 Mei 2019	Acc Keseluruhan	9. 

Malang, 23 Mei 2019

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP 19720322 200801 2 005

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Sherli Juliani
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 28 Juli 1997
Alamat asal : Lingk. Pasegan RT 01 RW 04 Kel. Petungasri Kec.
Pandaan, Pasuruan
Alamat di Malang : Jl. Simpang Remujung No.3, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru,
Malang
Telepon/ Hp : 085100745726
E-mail : sherlijuliani28@gmail.com
Facebook : Sherli Juliani

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK Kartika IV/68 Pandaan
2003-2009 : SD Muhammadiyah 3 Pandaan
2009-2012 : SMP Negeri 2 Pandaan
2012-2013 : SMA Negeri 1 Pandaan
2015-2019 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang
2016-2017 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun tahun 2015-2016
- Anggota Training of Trainer (TOT) El-Dinar Finance UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun tahun 2017-2018

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Kemahasiswaan dan Akademik “OPAK” Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
- Peserta Orientasi Pengenalan Kemahasiswaan dan Akademik “OSFAK” Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
- Peserta Orientasi Pengenalan Kemahasiswaan dan Akademik “Accounting Gathering” Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
- Peserta Manasik Haji di Ma’had Sunan Ampel Al Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
- Peserta Kuliah Tamu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tema “Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia” tahun 2015
- Peserta Demo Bahasa Mabna Asma’ Binti Abi Bakar di Ma’had Sunan Ampel Al Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016
- Peserta Workshop Kemahasiswaan dan Character Building Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016
- Peserta Bedah Buku “Sajak Langit” dan “Serasa Bukan Serasi” tahun 2016
- Peserta Seminar Nasional Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Malang “Menuju Wirausaha Berwawasan Koperasi sebagai Tantangan Menghadapi Era Pasar Bebas” tahun 2016
- Peserta Seminar Nasional dalam rangkaian agenda Pelatihan Kader Dasar (PKD) XIII dengan tema “Peran Kader Ulul Albab dalam Perkembangan Ekonomi”
- Peserta 4th “International Conference On Islamic Economics And Business” (ICONIES) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016
- Peserta Bedah Buku Nasional dengan tema “Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia” tahun 2016

- Panitia Revitalisasi Laboratorium El-Dinar Menuju Transaksi Riil “Entrepreneurial Banker” tahun 2017
- Peserta Accounting Study Club “Learning Accounting Easily and Joyfully” tahun 2017
- Peserta “Bimbingan dan Praktek Training of Trainer (TOT) El-Dinar Finance House 2017
- Peserta Pelatihan MYOB di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tema “Membangun Jati Diri Berjiwa Entrepreneur Muda tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional Revitalisasi Pergerakan Pemuda tahun 2017
- Peserta Pelatihan Peningkatan Program El-Dinar Finance House dengan tema “Optimalisasi Program Laku Pandai Guna Membangun Jiwa Entrepreneur” tahun 2018
- Peserta Penulisan Skripsi Integrasi Sains dan Islam Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018
- Peserta Workshop Penulisan Artikel & “How to Submit Article By OJS” Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019

Malang, 23 Mei 2019

Sherli Juliani